

GERAKAN MAHASISWA SEBAGAI KELOMPOK PENEKAN

Studi Kasus Keluarga
Mahasiswa UGM dari
Masa Orde Lama hingga
Pasca-Reformasi

Luthfi Hamzah Husin

**Gerakan Mahasiswa sebagai Kelompok Penekan:
Studi Kasus Keluarga Mahasiswa UGM
dari Masa Orde Lama hingga Pasca-Reformasi**

Hak cipta © Penerbit PolGov, 2014
All rights reserved

Penulis: Luthfi Hamzah Husin
Editor: Dewi Kharisma Michellia
Pemeriksa Aksara: Umi Nurun Ni'mah
Desain Cover: Damar N. Sasodoro
Tata Letak Isi: Dwi Fajar W.

Cetakan I, September 2014

Diterbitkan oleh Penerbit PolGov
Penerbit Polgov khusus menerbitkan buku-buku politik dan pemerintahan, berada di bawah payung *Research Centre of Politics and Government (PolGov)*.

Research Centre of Politics and Government (PolGov) adalah lembaga riset dan publikasi dari Jurusan Politik dan Pemerintahan (JPP) Fisipol UGM. Saat ini PolGov berfokus ke dalam empat tema kunci sesuai dengan kurikulum JPP, yaitu: 1) politik lokal dan otonomi daerah, 2) partai politik, pemilu, dan parlemen, 3) HAM dan demokrasi, 4) reformasi tata kelola pemerintahan dan pengembangan sistem integritas.

Lt. 4 Gedung Fisipol UGM
Jl. Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
<http://jpp.fisipol.ugm.ac.id>
Telp./Fax: (0274) 5522125
Surel: polgov.ugm@gmail.com

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)
Gerakan Mahasiswa sebagai Kelompok Penekan:
Studi Kasus Keluarga Mahasiswa UGM dari Masa Orde Lama hingga Pasca-Reformasi
Penulis: Luthfi Hamzah Husin; Editor: Dewi Kharisma Michellia
Cet.1 — Yogyakarta: Penerbit PolGov, September 2014
xx + 156 hlm. 14x21 cm
ISBN:

1. Sosial/Sejarah/Politik

I. Judul

... kupersembahkan untuk istriku Nadia,
dan segenap angkatan muda Indonesia ..

Daftar Singkatan

AAI	: Asistensi Agama Islam
ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AMPI	: Angkatan Muda Pemuda Indonesia
BHMN	: Badan Hukum Milik Negara
BHP	: Badan Hukum Pendidikan
BKM	: Badan Kesedjahteraan Mahasiswa Jogjakarta
BOP	: Biaya Operasional Pendidikan
BPPC	: Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CGMI	: Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia
CIA	: <i>Central Intelligence Agency</i>
CONEFO	: <i>Conference of the New Emerging Forces</i>
CSIS	: <i>Center for Strategic and International Studies</i>
DDII	: Dewan Dakwah Islam Indonesia
Dema	: Dewan Mahasiswa
DI-TII	: Darul Islam – Tentara Islam Indonesia
FMN	: Front Mahasiswa Nasionalis
FSLDK	: Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus
GATS	: <i>General Agreement of Trade and Services</i>
GBHN	: Garis-garis Besar Haluan Negara
Gemsos	: Gerakan Mahasiswa Sosialis
GMKI	: Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
GMNI	: Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
GNB	: Gerakan Non-Blok
Golkar	: Golongan Karya
GONEFO	: <i>Games of the New Emerging Forces</i>

HMI MPO	: HMI Majelis Penyelamat Organisasi
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
ICMI	: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
IK	: Inisiasi Kampus
IPB	: Institut Pertanian Bogor
ISDV	: <i>Indische Sociaal Democratische Vereniging</i>
ITB	: Institut Teknologi Bandung
JIB	: Jong Islamieten Bond
JS	: Jamaah Shalahuddin
CAA	: Konferensi Asia-Afrika
KAGAMA	: Keluarga Alumni Gadjah Mada
KAMI CT	: KAMI <i>Care Taker</i> Dema
KAMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
KAMMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
KAPI	: Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia
KASI	: Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia
KGB	: <i>Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti</i>
KKN-PPM	: Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat
KM UGM	: Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada
Komintern	: Komunis Internasional
LDK	: Lembaga Dakwah Kampus
LMND	: Liga Mahasiswa Nasionalis Demokrat
LPPM	: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Malari	: Malapetaka 11 Januari
Menpora	: Menteri Pemuda dan Olahraga
Menwa	: Resimen Mahasiswa
MM	: Majelis Mahasiswa
MMI	: Majelis Mahasiswa Indonesia
MPM	: Majelis Permusyawaratan Mahasiswa
NKK/BKK	: <i>Normalisasi</i> Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan
NU	: Nahdlatul Ulama
OSMA	: Orientasi Studi Mahasiswa

OTB	: Organisasi Tanpa Bentuk
Pangkopkamtib	: Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa
Pemira	: Pemilihan Raya Mahasiswa
Perhimi	: Perhimpunan Mahasiswa Indonesia
Peristiwa G30S	: Peristiwa Gerakan 30 September
Perti	: Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah
PII	: Pelajar Islam Indonesia
PK	: Partai Keadilan
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PMII	: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
PMKRI	: Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia
PNDI	: Pengkajian Nilai-nilai Dasar Islam
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PPMI	: Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia
PRD	: Partai Rakyat Demokratik
PRRI	: Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
PSI	: Partai Sosialis Indonesia
PT BHMN	: Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara
PTM	: Penempatan Tenaga Mahasiswa
RIS	: Republik Indonesia Serikat
Sema	: Senat Mahasiswa
SI	: Sarikat Islam
SKI	: Studi Kerohanian Islam
SKS	: Sistem Kredit Semester
SMPT	: Senat Mahasiswa Perguruan tinggi
SPMA	: Sumbangan Pendidikan Mutu Akademik
SPP	: Sumbangan Pembinaan Pendidikan
Supersemar	: Surat Perintah Sebelas Maret
TMII	: Taman Mini Indonesia Indah
UI	: Universitas Indonesia
UKM	: Unit Kegiatan Mahasiswa
UMNO	: <i>United Malays National Organisation</i>

Gerakan Mahasiswa sebagai Kelompok Penekan:
Studi Kasus Keluarga Mahasiswa UGM dari Masa Orde Lama hingga Pasca-Reformasi

Unair : Universitas Airlangga
Undip : Universitas Diponegoro
Unibraw : Universitas Brawijaya
Unpad : Universitas Padjadjaran
UNS : Universitas Sebelas Maret
UU PMA : UU Penanaman Modal Asing

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Persembahan	ii
Kata Pengantar	xiii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar dan Tabel Abstraksi	xi
BAB I Gerakan Mahasiswa Gadjah Mada	1
1.1 Mahasiswa dan Politik	2
1.2 Menjadi Kelompok Penekan: Ideologi dan Strategi Gerakan Mahasiswa	11
1.3 Penyajian Buku	29
BAB II KM UGM di Era Orde Lama	31
2.1 Sejarah Mahasiswa Gadjah Mada (1950-1962)	32
2.1.1 Pembentukan Dewan Mahasiswa UGM	34
2.1.2 Peran dan Metode Gerakan Dewan Mahasiswa UGM	38
2.1.3 Ideologi Gerakan Mahasiswa UGM	43
2.2 Konflik Politik Internasional (1962-1966)	49
2.2.1 Gebrakan Bung Karno	50
2.2.2 “Gerakan Oposisi” terhadap Bung Karno	52
2.2.3 Peran dan Metode Gerakan Dema UGM di Tengah Konflik	57
2.2.4 Kontestasi Ideologi Gerakan Mahasiswa	59
2.3 Kesimpulan	63
BAB III KM UGM di Era Orde Baru	65
3.1 Stabilisasi Politik (1966-1970)	66
3.1.1 Menguatnya Pengaruh KAMI Care Taker Dema UGM	68
3.1.2 Peran dan Metode Gerakan Dema UGM di Bawah KAMI CT Dema	69
3.2 Dema Melawan! (1970-1978)	70
3.2.1 Kekecewaan Mahasiswa	71

3.2.2	Konflik Tahun 1974	74
3.2.3	Gerakan 1978	80
3.3	Pembekuan Gerakan (1979-1987)	82
3.3.1	Gerakan Underground	84
3.3.2	Matinya Gerakan Ekstra-Universitas	86
3.3.3	Munculnya Gerakan Dakwah Kampus sebagai Alternatif Aktivisme Mahasiswa	88
3.3.4	Munculnya Gerakan Tarbiyah	91
3.4	Kebangkitan Gerakan (1987-1998)	92
3.4.1	Menguatnya Gerakan Mahasiswa Islamis di UGM	93
3.4.2	Menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa: Bangkitnya Politik Mahasiswa!	99
3.4.3	Gerakan Reformasi 1998	103
3.5	Kesimpulan	106
BAB IV KM UGM di Era Pasca-Reformasi		109
4.1	Demokratisasi Politik (1999-2004)	110
4.1.1	Perihal PT BHMN	114
4.1.2	Angkatan 2002	118
4.1.3	Ideologi Gerakan Mahasiswa	120
4.2	Usaha Kembali ke Isu Nasional (2004-sekarang)	122
4.2.1	Dibentuknya Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI)	124
4.3	Kesimpulan	125
BAB V Kesimpulan		129
5.1	KM UGM sebagai Kelompok Penekan	130
5.2	Pemetaan Ideologi	133
5.3	Metode Gerak	135
5.4	Saran dan Masukan	139
Bibliografi		142
Indeks		148

Daftar Gambar

Gambar 1: Model Sistem Politik Pertama dari Easton	13
Gambar 2: Model Sistem Politik Gabriel Almond	15
Tabel 1: Literature Review dan Relevansinya	10
Tabel 2: Peran KM UGM sebagai Kelompok Penekan	131
Tabel 3: Pemetaan Ideologi dalam KM UGM	133
Tabel 4: Perbandingan Garis Ideologi dan Metode Gerakan KM UGM	135

Pengantar

Demitosisasi Gerakan Mahasiswa

HARI-HARI INI, ketika gegap gempita media sosial membuat setiap orang bisa mengungkapkan berbagai pendapatnya secara bebas, ketika kanal-kanal aspirasi politik terbuka lebar, apa pentingnya membahas sejarah gerakan mahasiswa?

Pertanyaan klise tersebut barangkali mengandung nada pesimisme yang kental. Kita juga akan mendapat jawaban yang tidak pernah tuntas-paripurna-final terutama tentang peran politik gerakan mahasiswa. Meski demikian, ia tetap perlu dijawab setidaknya sebagai bahan refleksi bagi kondisi gerakan mahasiswa saat ini. Tidak untuk melakukan mitologisasi romantisme “kebesaran” gerakan mahasiswa. Lebih dari itu, jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi penting untuk mengetahui posisi gerakan mahasiswa saat ini, dalam konteks zaman seperti apa ia berada, dan apa yang selanjutnya harus ia lakukan dalam merespons derap langkah perubahan zaman tersebut.

Dalam lintasan sejarah di Indonesia, mahasiswa kerap ditempatkan dalam posisi yang penting dalam beberapa episode perubahan sosial politik. Secara politis, posisi itu tidak tercipta begitu saja. Ia justru merupakan realitas yang dikonstruksi dan direproduksi. Realitas yang dibekukan dan kita kenal dengan angkatan-angkatan atau tonggak-tonggak. Inilah yang membuat sebagian besar aktivis gerakan mahasiswa familiar dengan “keberhasilan” angkatan 1966, 1974, 1998, dan sebagainya.

Angkatan atau tonggak-tonggak tersebut bahkan kadang menjadi semacam beban yang diwariskan ke generasi penerusnya. Beberapa tokoh memiliki kategori masing-masing dalam merumuskan

periode angkatan-angkatan tersebut. Pramoedya Ananta Toer, misalnya. Dalam pidato pengukuhan sebagai anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada 21 Maret 1999, Pramoedya membagi tonggak-tonggak tersebut dalam enam bagian:

- *Pertama*, angkatan tahun belasan yang terdiri dari “para mahasiswa yang mendapat beasiswa dari pemerintah kolonial bersama dengan para eksterniran Indische Partij.”
- *Kedua*, angkatan ‘20-an dengan Sumpah Pemuda yang juga gemilang.
- *Ketiga*, angkatan ‘45 yang “tanpa sesuatu pamrih, tanpa bercadang, siap mengorbankan jiwa dan raga mereka mempertahankan kemerdekaan nasional di setiap jengkal tanah air.”
- *Keempat*, angkatan ‘66 yang menurut Pramoedya “tak ada sesuatu yang masih perlu dinilai.”
- *Kelima*, angkatan Malari (1974) yang menghendaki reformasi dengan pekikan “militer kembali ke barak.”
- *Keenam*, angkatan muda PRD yang dipercayai “akan lebih berhasil dari angkatan-angkatan sebelumnya” dan “tidak melecehkan harga manusia Indonesia dengan jalan pembantaian dan perampasan hak-hak asasinya.”

Dengan nada yang serupa, meski tak sama, Luthfi Hamzah Husin dalam bukunya ini juga mencoba membagi ke dalam angkatan-angkatan untuk melihat dinamika sejarah Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (KM UGM). Luthfi menggunakan masa sebuah rezim pemerintahan sebagai tonggak bagi eksistensi KM UGM yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Pascareformasi.

Dengan menggunakan masa pemerintahan sebuah rezim sebagai tonggak angkatan, kondisi KM UGM diasumsikan merupakan sebuah respons terhadap sistem politik yang sedang berlaku. Dari situ juga terlihat proses dialektis antara gerakan mahasiswa dengan konteks sosial politiknya. Kondisi objektif itu terlihat jelas dari bagaimana respons terhadap kondisi sistem politik yang bergerak baik dari pendulum otoriter maupun demokratik.

Di era Orde Lama, misalnya, ketika politik menjadi panglima dan dipenuhi jargon-jargon “ofensif revolusioner”, KM UGM melalui Dewan Mahasiswa sebagai lembaga perwakilannya, menjadi medan kontestasi bagi organisasi gerakan-gerakan mahasiswa ekstrakampus yang juga mencerminkan spektrum ideologi dan politik nasional saat itu. Ketika Orde Lama menemui senjakalanya, KM UGM memiliki peran signifikan dalam membantu proses identifikasi konseptual-teoretis yang menyumbangkan ide bagi tegaknya ideologi Orde Baru.

Francois Raillon dalam bukunya yang berjudul *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974* (1984) membantu kita untuk mencandra dinamika gerakan mahasiswa di masa tersebut. Sementara di era pascareformasi setelah jatuhnya rezim Soeharto, langkah gerak KM UGM segendang sepenarian dengan liberalisasi dan komersialisasi pendidikan yang salah satunya dimulai di UGM.

Penonggakan gerakan mahasiswa ke dalam angkatan-angkatan semacam itu sebenarnya juga bukan tanpa persoalan. Justru di situ terletak satu masalah mendasar ketika mendiskusikan sejarah dan eksistensi gerakan mahasiswa. Sebab, ia membawa kita pada kecenderungan untuk memitoskan dan bahkan percaya pada ilusi tentang “kebesaran” gerakan mahasiswa. Untuk melihat hal ini kita bisa membaca pendapat Taufik Abdullah dalam pengantar buku *Pemuda dan Perubahan Sosial* (1974).

Dengan mengutip pidato Max Weber, Taufik mengajukan sebuah pertanyaan penting: “Apalah arti hidup sebagai angkatan muda yang selalu dibayangi oleh kebanggaan generasi yang lebih tua tentang keagungan hasil yang mereka capai? Apakah generasi sesudah itu hanyalah pengekor, epigon yang menerima pewarisan?” Pada titik ini, “keberhasilan” generasi gerakan mahasiswa dahulu dianggap akan membebani generasi selanjutnya. Apalagi, standar-standar “kesuksesan” di masa lalu hampir selalu dijadikan rujukan generasi saat ini. Untuk ini, silakan perhatikan diskursus yang muncul dalam

tubuh internal organisasi gerakan mahasiswa baik intra maupun ekstrakampus.

Pada konteks ini, demitosisasi gerakan mahasiswa menjadi penting untuk dilakukan oleh aktivis-aktivis saat ini. Zaman terus bergerak. Kondisi objektif berbeda, yang artinya menuntut standar berbeda untuk mengukur sejauh apa mahasiswa bisa menampilkan perannya. Dalam rezim keterbukaan pasca otoritarianisme, demitosisasi juga penting karena era ini memunculkan jarak antara harapan dan kenyataan. Masa yang menumbuhkan semangat optimisme sekaligus pesimisme yang tak kalah besar dalam waktu yang bersamaan. Sjahrir dalam tulisannya di *Majalah Prisma* yang berjudul *Dilema Pembangunan dan Kebebasan: Mahasiswa di Masa Klimakterik* (1978) menyebut periode semacam ini dengan istilah klimakterik.

Di satu sisi, mahasiswa berada dalam lingkup perguruan tinggi yang menjadi asal pemikiran-pemikiran demokratis, yang menuntutnya untuk terus berpikir secara kritis. Sementara di lain sisi, dia berada dalam lingkungan masyarakat yang menuntutnya untuk mengabdikan, dan dengan demikian ia mesti melakukan pengabdian masyarakat. Ada jarak lebar antara teori-teori yang dipelajari di ruang-ruang kelas dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Ikhtiar demitosisasi sejak semula mesti kita tempatkan sebagai proses dialektis yang berjalan seiring di antara kondisi subjektif mahasiswa dan keadaan objektif. Jadi, laku reflektif bisa menemukan simpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Cermati pendapat Hermawan Sulistiyono dalam *Penakluk Rezim Orde Baru : Gerakan Mahasiswa 1998* (1999), yang mengajukan empat alasan utama mengalami disorientasi peran justru di era keterbukaan pasca Orde Baru runtuh.

Pertama, kerangka hukum bagi penanganan unjuk rasa melalui Undang-Undang (UU) No 9/1998. UU ini seolah-olah memberikan hak kepada masyarakat tentang kebebasan berpendapat. Namun,

di sisi lain justru mempersempit ruang gerak serta memberikan legitimasi hukum yang cukup kuat bagi para penegak hukum untuk bersikap keras dan represif.

Kedua, liberalisasi pers telah membuka koridor baru bagi kepentingan publik sehingga gerakan mahasiswa tidak lagi menjadi satu-satunya sarana penyaluran aspirasi masyarakat.

Ketiga, gerakan mahasiswa telah sampai pada titik jenuh. Hal ini disebabkan siklus sejarah yang memberikan terulangnya situasi pasca lengsernya Soeharto. Hal ini ditambah dengan liberalisasi kampus sejak 1999 yang membuat biaya pendidikan di Indonesia semakin mahal. Kondisi ini menyebabkan banyak mahasiswa mengalami kesulitan untuk bertahan hidup di gerakan dan kuliah.

Keempat, terbukanya koridor politik melalui liberalisasi pembentukan partai-partai politik. Kondisi ini, membuat sebagian kalangan mahasiswa ikut terjebak dalam euforia politik formal. Indikasinya, organisasi gerakan mahasiswa ekstra kampus yang seringkali mendominasi lembaga intrakampus memperlihatkan afiliasi yang bisa dirasakan terhadap parpol tertentu. Bahkan, seperti diungkapkan Abdul Gaffar Karim dalam kata pengantar di buku *Dynamics of Islamic Student Movement* (2009), afiliasi tersebut semakin tidak disangkal. Meskipun, afiliasi memang masih menimbulkan pertanyaan. Apakah “pengakuan” tersebut didasarkan pada kalkulasi politik jangka panjang yang matang, atau hanya sekadar impuls kegairahan mahasiswa semata.

Pembacaan atas konteks selanjutnya juga mesti melihat perkembangan teknologi komunikasi yang semakin masif. Bagaimanapun, perkembangan teknologi telah membuka kanal-kanal atau ruang-ruang baru bagi mahasiswa jika masih ingin memosisikan dirinya sebagai gerakan penekan sebagaimana ditegaskan Luthfi dalam buku ini. Pelajaran dari revolusi demokratik di berbagai belahan dunia seperti di Mesir, Libya, Tunisia, dan yang terbaru di Hong Kong menunjukkan betapa pentingnya penggunaan teknologi, khususnya media sosial.

Salah satu karakter penting media sosial adalah sebagai medium pembentuk opini publik. Dalam era di mana informasi menjadi oksigen demokrasi, perang opini menjadi tak terhindarkan. Mahasiswa akan sulit memperjuangkan ide-idenya jika gagal memaksimalkan ruang-ruang terbuka ini. Konglomerasi media di Indonesia telah menutup diskursus bagi narasi-narasi alternatif yang berpihak kepada rakyat yang termarginalkan. Sulit menyangkal bahwa media arus utama lebih berpihak kepada para pemilik modal. Hiruk-pikuk politik pemilihan presiden yang baru saja berlalu telah memberikan kepada kita sebuah gambaran yang gamblang mengenai keberpihakan media.

Sebagai catatan, di samping potensi radikalnya, era media sosial seperti sekarang sebenarnya juga mengandung potensi bonoisme gerakan mahasiswa. Istilah ini merujuk kepada Bono, vokalis U2, grup band asal Irlandia yang dalam setiap konsernya di berbagai negara selalu membawa isu-isu mengenai HAM, kemiskinan, antipemanasan global, dan lainnya. Persoalan mendasarnya, aksi-aksi semacam itu hanya bersifat permukaan, tambal sulam, dan tidak mampu menyentuh akar persoalan struktural yang menyebabkan kesenjangan sosial terjadi.

Kita tentu berharap hal ini tidak menimpa gerakan mahasiswa di mana mereka tidak berusaha menyentuh persoalan secara nyata, hanya melakukan berbagai perayaan dan selebrasi politik semata. Kecenderungan semacam ini sudah terlihat. Misalnya saja kegenitan mahasiswa menggunakan petisi *online*—yang akhir-akhir ini marak dilakukan—tapi enggan melakukan aksi turun ke bawah dengan konkret. Ini menurut saya adalah hal paling penting yang harus diperhatikan. Gerakan mahasiswa sudah semestinya menggabungkan peluang yang ditawarkan perkembangan media sosial dengan kerja-kerja turun ke bawah atau pengorganisasian rakyat.

UGM sudah memberikan pelajaran. Semಿನimnya bisa dilihat dari kemunculan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang digagas

eks Sekretaris Dewan Mahasiswa UGM Koesnadi Hardjasoemantri di tahun 1970-an. Hal ini yang sedikit luput dibahas Luthfi dalam bukunya. Terlepas dari berbagai kekurangannya yang semakin hari semakin terlihat, program semacam itu bisa mendekatkan ideal-ideal yang ada di benak mahasiswa dengan kondisi riil yang dihadapi rakyat. Dengan kata lain, mahasiswa tidak boleh terjebak dalam logika elit dengan gerakan yang juga elitis. Persatuan gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat bisa menjadi satu standar keberhasilan yang layak diajukan. Sehingga gerakan maupun ide-ide yang digagas tidak berjalan dalam ruang kosong.

bab I

Gerakan Mahasiswa
Gajah Mada

Gerakan Mahasiswa Gadjah Mada

1.1 Mahasiswa dan Politik

Buku ini menjelaskan gerakan mahasiswa sebagai gerakan politik, atau sekurang-kurangnya gerakan yang bernuansa politik, yaitu sebagai “kelompok penekan” atau *pressure group* (Sanit, 1999: 46), dengan memfokuskan pada Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (KM UGM) dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Pasca-Reformasi. Hal yang menjadi ciri khas dari pergerakan mahasiswa di Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan hingga kini, ditandai dengan satu fenomena di mana mereka selalu saja “terpanggil” untuk memasuki arena politik dengan melakukan tekanan-tekanan politik, terutama di saat-saat genting terjadinya perubahan. Artinya, ada kondisi-kondisi struktural tertentu yang “memaksa” mahasiswa turun beraksi secara politik.

Berulang kalinya mahasiswa “terpanggil” ke dalam arena politik, merupakan fenomena menarik untuk dikaji. Hal ini tentu tidak mengherankan apabila politik diberi makna luas sebagai “panggilan” jiwa (Alfian, 2011: 26), di mana mahasiswa sebagai salah satu elemen masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap situasi-kondisi politik yang genting yang terjadi di negerinya. Diakui bahwa gerakan mahasiswa sudah menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia (Slametmuljana, 1969: 100).

Munculnya gerakan kebangkitan nasional tahun 1908 dengan semangat *nation building* yang pada akhirnya termanifestasikan dalam Sumpah Pemuda di tahun 1928, gerakan revolusi kemerdekaan Indonesia pada 1945, gerakan penggulingan Bung Karno tahun 1965-1966, gerakan kekecewaan terhadap Pemerintahan Soeharto

tahun 1974 dan 1978, hingga gerakan Reformasi 1998 adalah di antara andil politik para mahasiswa di Indonesia. Keterlibatannya dalam dunia politik tersebut, membuktikan bahwa gerakan mahasiswa Indonesia selalu berperan menjadi kelompok penekan yang menghubungkan kegelisahan rakyat dengan negara.

Dalam kacamata internasional, fenomena tersebut menarik untuk dikomparasikan. Sebagai contoh, studi yang dilakukan Phillip G. Altbach (1988) yang meneliti gerakan mahasiswa di Amerika Serikat pada tahun 1900-an hingga 1970-an. Dari studinya, dapat disimpulkan bahwa kehadiran gerakan mahasiswa di Amerika Serikat tidak selalu melibatkan dirinya ke dalam politik. Menurutnya, kemunculan gerakan mahasiswa di Amerika Serikat selalu berubah progresif seiring dengan menguatnya politik internasional yang dihadapi oleh Pemerintah, seperti Perang Dunia II dan Perang Dingin. Namun setelah itu, gerakan mahasiswa akan kembali mengalami fase apatisme seperti pada akhir dekade 1970-an dengan menguatnya paham individualisme (Arthure Levine, dalam Altbach: 1988). Hal tersebut tentu sangat berbeda jika dibandingkan dengan fenomena gerakan mahasiswa di Indonesia sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Di dalam skema gerakan mahasiswa nasional, peran mahasiswa UGM tidak bisa diabaikan. Pada awal dekade 1950-an telah muncul formulasi baru dari gerakan mahasiswa UGM, sebagai bentuk lain dari organisasi gerakan mahasiswa yang sudah ada sejak revolusi. “Di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dibentuk Dewan Mahasiswa (Dema) pada tanggal 11 Januari 1950, sebagai organisasi yang melingkupi keseluruhan mahasiswa di lembaga pendidikan tinggi tersebut.” (Sanit, 1999: 101). Lalu dibentuk pula Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) sebagai badan legislatifnya.

Selanjutnya, Dewan Mahasiswa UGM atau sering disebut dengan singkatan Dema UGM sebagai organisasi mahasiswa intra kampus pertama di Indonesia yang diprakarsai oleh Prof. Koesnadi Hardjosoemantri telah menginspirasi terbentuknya Dema di kampus-kampus lain di Indonesia. Kemudian disusul dengan

dibentuknya Dema di Universitas Indonesia (UI) pada 1955 dan di Institut Teknologi Bandung (ITB) setelahnya. Formulasi tersebut dibentuk dalam rangka menaungi segala aktivisme mahasiswa dalam kampus tanpa melihat latar belakang gerakannya. Konsep inilah yang kemudian disebut oleh Sanit (1999) sebagai *student government*. Dengan fakta demikian, aktivisme Yogyakarta dengan kampus UGM di dalamnya menjadi inisiator dalam memformulasikan gerakan mahasiswa di Indonesia.

Fenomena menarik berikutnya dalam gerakan mahasiswa di Indonesia adalah kuatnya pengaruh ideologi politik terhadap pilihan sikap dan metode gerakannya, baik secara internal maupun secara struktural di luarnya (elit politik atau *setting* internasional). Dalam konteks Dema UGM, kehadirannya sebagai kelompok penekan dalam sistem politik di Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari nilai dan filosofi yang melekat di dalam UGM pada saat itu. Semenjak didirikan pada 1949 oleh Presiden Soekarno, UGM telah mendeklarasikan diri sebagai kampus yang “berasaskan bawaan Pancasila dan kebudayaan Indonesia” yang diwujudkan dengan dasar kerohanian, dasar nasional, dasar demokrasi, dasar kemasyarakatan, dan dasar kekeluargaan.¹ Sebagaimana yang telah didengung-dengungkan oleh Presiden Soekarno dalam pidato peresmian Gedung Pusat UGM pada tanggal 19 Desember 1959 bahwa,

“...Pancasila adalah isi daripada Gadjah Mada, isi daripada Universitas ini, dan saya minta kepada semua mahaguru, pada lektor-ektor supaya Pancasila, jiwa Pancasila itu, betul-betul dikobar-kobarkan, dihidup-hidupkan di dalam kalangan mahasiswa semua!” (Soekarno, 1959, dalam Santoso, 2010: 31).

Inilah kiranya semangat yang senantiasa “menjiwai” gerakan mahasiswa UGM ketika awal berdiri. Kekentalan ideologi Pancasila sangat berpengaruh pada corak ideologis dan pilihan metode gerak Dema UGM sebagai kelompok penekan yang berpengaruh di Indonesia pada waktu itu.

Di era Orde Lama, gerakan mahasiswa UGM termasuk yang sangat mendukung pemerintahan Bung Karno soal pro-kontra

¹ Lihat Statuta dan Peraturan Penyelenggaraan UGM 1949-2010, PSP-PRESS, hal 105.

ideologi negara. Di antaranya, Dema UGM mengadakan seminar terbuka yang bertemakan “Kembali ke UUD’45 dan *Follow-up-nya*” dengan menghadirkan Bung Karno sebagai pembicara (Soekarno, 2005: 1). Berikutnya, Dema UGM bersama GMNI² dan CGMI³ tercatat dalam sejarah sebagai gerakan yang tidak bergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) bentukan kekuatan militer yang bertujuan untuk menggulingkan Presiden Soekarno pada 1965-1966 (Raillon, 1989: 14). Sebaliknya pembentukan KAMI tersebut disambut dengan baik oleh HMI, PMII⁴, Gemsos⁵, PMKRI⁶, dan GMKI.⁷ Sikap ini telah menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa sangat terpengaruhi kontestasi ideologi gerakan di dalamnya dan juga elit di luarnya.

Memasuki era Orde Baru, Dema UGM termasuk di antara gerakan yang bersikap kritis terhadap pemerintahan Soeharto. Di antara peranannya adalah turut memanasakan gerakan kekecewaan terhadap Orde Baru pada 1970-1974, yang menolak masuknya modal asing ke Indonesia dan pembangunan Taman Mini Indonesia Indah usulan Bu Tien (Daulay, 2011: 45; Budiyarso, 2000: 37). Meskipun akhirnya di era Orde Baru terjadi pemberangusan gerakan mahasiswa dengan adanya pendudukan kampus oleh militer, pembubaran Dema se-Indonesia, dan diterapkannya NKK/BKK pada 1978 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef (Budiyarso, 2000: 147, 216, 226, 231), gerakan mahasiswa UGM dapat membangkitkan kembali aktivismenya ketika memasuki dekade 1990-an awal seiring dengan menguatnya gerakan mahasiswa Islamis di kampus. KM UGM kembali didirikan pada 1988, hingga mencapai titik klimaks gerakannya berupa Reformasi 1998 (Sanit, 1999: 179).

Di era Pasca-Reformasi 1998, beberapa gerakan yang dilakukan BEM KM UGM⁸ di awal era tersebut masih terwarnai agenda dan

² Akronim dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.

³ Akronim dari Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia.

⁴ Akronim dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

⁵ Akronim dari Gerakan Mahasiswa Sosialis.

⁶ Akronim dari Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia.

⁷ Akronim dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia.

⁸ Hingga kini, Dewan Mahasiswa UGM bertransformasi dan menggunakan istilah “Badan Eksekutif

isu yang diangkat ketika Reformasi 1998. Agenda tersebut ditujukan kepada pemerintahan Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Terlebih pada tahun 2000, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah⁹ yang menetapkan UGM dan beberapa kampus besar lainnya sebagai Badan Hak Milik Negara (BHMN) yang kerap dinilai kebijakan tersebut adalah bentuk dari komersialisasi dan privatisasi kampus (Baskoro, 2011: 69). Hal tersebut mengubah fokus gerakan KM UGM yang semula hanya tertuju pada Pemerintah Pusat menjadi kepada Pengurus Universitas.

Dari paparan di atas, dapat ditarik dua pokok permasalahan, yaitu: 1) Keterlibatan Keluarga Mahasiswa UGM sebagai kelompok penekan dalam sistem politik di Indonesia dinilai cukup efektif; dan 2) Keterpanggilan Keluarga Mahasiswa UGM sebagai gerakan moral dan intelektual untuk masuk ke arena politik tersebut, ternyata tidak bisa dilepaskan dari relasinya dengan elit politik atau kekuasaan, baik secara ideologis maupun politis. Dari dua pokok permasalahan tersebut, gerakan mahasiswa kerap dimaknai sebagai alat permainan politik yang secara tidak langsung merupakan arena konflik di antara berbagai kelompok (Raillon, 1989: 121). Hal tersebut dikarenakan “gerakan mahasiswa sebagai intelegensia dinilai merupakan salah satu –bahkan satu-satunya– dari kekuatan politik yang relatif otonom dan memiliki inisiatif sendiri terhadap penguasa.” (Raillon, 1989: 121).

Terdapat beberapa studi yang relevan dalam memahami gerakan mahasiswa dan politik. Di antaranya *pertama*, studi yang dilakukan Dr. Slametmuljana (1969) dengan judul “Nasionalisme sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia”. Studi tersebut berfokus melakukan kajian atas aktivisme gerakan mahasiswa pada masa kebangkitan nasional hingga berujung pada kemerdekaan 1945. Temuan penting yang Slametmuljana simpulkan bahwa gerakan nasionalisme dalam masa kebangkitan nasional yang kemudian berujung pada kemerdekaan Republik Indonesia, diinisiasi dan dimotori oleh tokoh-tokoh intelektual gerakan mahasiswa pada

Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada” yang disingkat BEM KM UGM.

⁹ Lihat PP 153-155 Tahun 2000 tentang BHMN.

waktu itu. Oleh karena itu menurutnya, sejarah bangsa Indonesia adalah sejarah mahasiswa itu sendiri (1969: 100). Slametmuljana juga menjelaskan kontestasi dan hubungan yang kuat antar ideologi gerakan pada waktu itu, sehingga studinya sangat relevan dengan dengan penelitian ini.

Kedua, studi yang dilakukan Rum Aly (2006) dengan judul “Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966”. Rum Aly memfokuskan pembahasannya pada *setting* transisi politik dari Orde Lama menuju Orde Baru. Disebutkan secara rinci dalam studi tersebut mengenai konstelasi politik yang terjadi antar aktor yang terlibat dalam masa transisi itu. Konflik politik yang terjadi ketika itu muncul sebagai ekspresi politik dari dilema hubungan antara Bung Karno, ABRI, dan PKI. Politik keseimbangan yang selama ini dipakai Bung Karno untuk mempertahankan kekuasaannya, akhirnya mengalami kehancuran, terutama setelah terjadinya peristiwa G30S di mana disinyalir Bung Karno terlibat didalamnya. Hal tersebut mengakibatkan semakin terbukanya konflik politik antara ABRI dengan PKI.

Rum Aly berkesimpulan bahwa gerakan mahasiswa telah berhasil menjadi “peran ketiga” dalam konflik tersebut, dengan menjadi kelompok penekan yang sangat tepat untuk memberikan wacana anti-Soekarno di masyarakat. Dalam studi ini pun, Aly telah berhasil menunjukkan bahwa peran gerakan mahasiswa sebagai kelompok penekan, sangat dipengaruhi oleh faktor ideologi gerakannya. Pembahasan gerakan mahasiswa dalam konteks Keluarga Mahasiswa atau *student government* pun cukup dibahas olehnya.

Ketiga, studi yang dilakukan oleh peneliti asing bernama Francois Raillon (1989) yang berjudul “Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia”. Raillon mengkaji peran gerakan mahasiswa sebagai kelompok penekan dalam konteks koran mahasiswa yang bernama “Mahasiswa Indonesia”. Koran mahasiswa tersebut mulai terbit pada masa transisi menuju Orde Baru dan akhirnya diberangus setelah peristiwa Malari 1974. Dari studinya tersebut,

Raillon berpendapat bahwa gerakan mahasiswa tidak bisa dianggap remeh perannya sebagai kelompok penekan.

Raillon menyimpulkan bahwa “Mahasiswa Indonesia” memiliki tiga peran sebagai kelompok penekan (1989: 330). *Pertama*, secara politis “Mahasiswa Indonesia” turut serta dalam membidani rezim Orde Baru dengan menjadi media bagi aktivis 1966 yang berlatarbelakang KAMI yang beroposisi dengan Bung Karno. *Kedua*, secara ideologis “Mahasiswa Indonesia” telah berhasil menyebarkan paham anti-Seokarnoisme dan menggantinya dengan wacana Modernisme dan pembangunan. *Ketiga*, secara kritik “Mahasiswa Indonesia” kemudian pada akhirnya mengalami fase kekecewaan terhadap rezim Orde Baru dan mulai balik mengkritisi Pemerintah. Menurut peneliti, Raillon telah berhasil menjelaskan hubungan antara gerakan mahasiswa dengan ideologi gerakannya. Namun dalam hal relevansinya dengan objek penelitian ini, Raillon tidak berfokus melakukan kajian terhadap gerakan mahasiswa dalam konteks Keluarga Mahasiswa atau *student government*, melainkan dalam konteks pers mahasiswa.

Keempat, studi yang dilakukan Philip G. Altbach (1988) dengan judul “Politik dan Mahasiswa”. Altbach mencoba untuk menjelaskan tentang dinamika gerakan mahasiswa dan hubungannya dengan Negara dan politik Internasional di Amerika Serikat. Altbach menjelaskan karakteristik dan tahapan gerak dari gerakan mahasiswa pada setiap dekadanya sejak tahun 1910-an hingga 1970-an. Ketika itu, Amerika Serikat sedang dihadapkan pada konflik politik internasional dengan kekuatan komunisme Uni Soviet. Altbach menyimpulkan bahwa, gerakan mahasiswa dapat memosisikan diri menjadi kelompok penekan yang efektif dalam konteks *setting* politik tersebut.

Kelima, studi Edy Budiaryso (2000) yang berjudul “Menentang Tirani, Aksi Mahasiswa ‘77/’78”. Dalam penelitiannya, Budiaryso menjabarkan peranan gerakan mahasiswa sebagai kelompok penekan bagi Pemerintah di berbagai daerah dalam setting awal Orde Baru hingga 1978. Salah satu kesimpulannya adalah, gerakan

mahasiswa tahun 1977/1978 terbukti berhasil menjadi sebuah kelompok penekan. Menurutnya gerakan mahasiswa di masa itu hadir sebagai bentuk perlawanan terhadap Negara yang telah menjadi simbol otoritarianisme politik dan juga praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Dalam konteks kajian gerakan mahasiswa sebagai kelompok penekan masih dikatakan relevan, tetapi kajian mengenai hubungan antara gerakan tersebut dengan kontestasi ideologi gerakan yang bermain tidak begitu dikupas dalam studi yang dilakukannya.

Keenam, studi yang dilakukan Anders Uhlin (1998) dengan judul “Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia”. Uhlin melakukan kajian dengan melihat proses demokratisasi di Indonesia pada kisaran tahun 1997 hingga 1998. Uhlin secara umum menjelaskan bahwa gerakan mahasiswa terbukti efektif menjadi aktor pro-demokrasi yang menjalankan misi-misi demokratisasi di Indonesia. Menurut penulis, Uhlin dengan sangat baik menjelaskan keterkaitan antara gerakan mahasiswa tersebut dengan ideologi yang bermain baik di internal ataupun di eksternalnya. Bahkan Uhlin telah melakukan pemetaan ideologi gerakan mahasiswa serta hubungannya dengan wacana demokratisasi. Namun dari segi objek penelitiannya, Uhlin membahas gerakan mahasiswa secara general dengan menjadikannya hanya salah satu aktor dari objek penelitian yang diambil.

Lalu *ketujuh*, studi yang dilakukan Arbi Sanit (1999) dengan judul “Pergolakan Melawan Kekuasaan”. Dalam studinya, Sanit mencoba menjelaskan peran gerakan mahasiswa di Indonesia sejak era Orde Lama hingga Reformasi 1998. Bahkan Sanit menambahkan beberapa analisis dan rekomendasi dalam melihat gerakan mahasiswa pada iklim pasca-reformasi. Dalam pengamatannya, Sanit menemukan bahwa gerakan mahasiswa dari masa ke masa merupakan kekuatan moral dan politik yang sangat efektif untuk menekan kekuasaan otoriter yang korup, pro-kapitalis, dan mengganggu hak-hak individu warga negaranya

(1999: 219). Menurutnya, gerakan mahasiswa tidak bisa lepas dari peranannya sebagai insan politik yang juga memiliki ideologi atau idealisme masing-masing. Namun, gerakan mahasiswa harus tetap menjunjung aspek moralitas yang harusnya menjadi landasan dalam berpolitik. Menurut peneliti, Sanit cukup baik menjelaskan hubungan gerakan mahasiswa dengan ideologinya, meski objek penelitiannya bersifat umum.

Berikut ini adalah konteks relevansi telaah pustaka tersebut terhadap isi buku ini:

Tabel 1
Literature Review dan Relevansinya

NO	Studi	Mengkaji Gerakan Mahasiswa sebagai Kelompok Penekan	Mengkaji hubungannya dengan ideologi gerakan
1	Slametmuljana (1969)	Iya. Dalam konteks gerakan mahasiswa pra-kemerdekaan.	Iya
2	Rum Aly (2006)	Iya. Dalam konteks gerakan mahasiswa pada tahun '66.	Iya
3	Franqois Raillon (1989)	Iya. Namun lebih melihat gerakan mahasiswa dalam konteks Pers Mahasiswa tahun '66-'74.	Iya
4	Phillip G. Altbach (1988)	Iya. Dalam konteks gerakan mahasiswa di AS pada tahun 1900-an hingga 1970-an.	Iya
5	Edi Budiwarso (2000)	Iya. Dalam konteks gerakan mahasiswa di tahun '77/'78.	Tidak
6	Anders Uhlin (1998)	Iya. Namun melihat gerakan mahasiswa secara umum pada 1998, dan menjadikannya sebagai salah satu objek penelitian.	Iya
7	Arbi Sanit (1999)	Iya. Dalam konteks gerakan mahasiswa secara umum dari Orde Lama hingga Reformasi.	Iya

Dari ketujuh temuan studi tersebut, kesemuanya menguatkan fenomena buku ini bahwa gerakan mahasiswa dianggap efektif menjadi kelompok penekan dalam suatu sistem politik. Bahkan, terdapat beberapa studi dengan temuan yang sama menyangkut

kuatnya pengaruh ideologi gerakan mahasiswa terhadap peranannya sebagai kelompok penekan, seperti yang dilakukan oleh Rum Aly dan Arbi Sanit. Namun, jika dilihat relevansinya, studi-studi tersebut masih terbilang kurang membahas peranan gerakan mahasiswa dalam konteks Keluarga Mahasiswa atau *student government* yang merepresentasikan Universitas, terlebih yang mengangkat kajian gerakan mahasiswa dari perspektif aktivisme Universitas Gadjah Mada dan Yogyakarta.

1.2 Menjadi Kelompok Penekan: Ideologi dan Strategi Gerakan Mahasiswa

Buku ini mengeksplorasi teori-teori politik yang berkenaan dengan kelompok penekan, gerakan mahasiswa sebagai kelompok penekan, garis ideologi gerakan mahasiswa, serta sikap dan metode gerakan mahasiswa. Teori-teori tersebut lantas disusun menjadi sebuah kerangka teoritik untuk menerjemahkan KM UGM sebagai kelompok penekan dari didirikannya pada tahun 1950 hingga pasca-reformasi.

1.2.1 Kelompok Penekan

Profesor dalam bidang Pemerintahan dari Universitas Harvard, V. O. Key, Jr., dalam bukunya *“Politics, Parties, and Pressure Groups”* menjelaskan istilah “kelompok penekan” sebagai berikut:

*“A striking feature of American politics is the extent to which political parties are supplemented by private associations formed to influence public policy. **These organizations, commonly called pressure groups, promote their interests by attempting to influence government rather than by nominating candidates and seeking responsibility for the management of government.**” (Key, 1958: 23).*

(Sebuah bentuk yang mencolok pada politik Amerika adalah eksistensi partai politik yang dilengkapi asosiasi-asosiasi privat untuk mempengaruhi kebijakan publik. Organisasi-organisasi tersebut, biasanya disebut sebagai kelompok penekan, menyuarakan kepentingannya dengan memberikan pengaruh pada pemerintah daripada menominasikan kandidat dan mengambil tanggungjawab dalam mengelola pemerintahan).

Sebagaimana dijelaskan Key, “kelompok penekan” atau “*pressure groups*” hadir sebagai konsekuensi atas adanya demokrasi dalam suatu negara. Demokrasi yang menerapkan penyebaran kekuasaan (*dispersion of power*) akan melahirkan kebebasan berpolitik pada masyarakat (*self-government*). Sehingga proses demokrasi tersebut akan melahirkan institusi-institusi demokrasi berupa: partai politik, lembaga representatif, pemilihan secara prosedural, dan bentuk-bentuk lain yang menghubungkan negara dengan rakyat (Key, 1958: 7, 9, 11). Karenanya, terdapat banyak aktor yang terlibat dalam sebuah arena politik.

Dari teori Key tersebut dapat ditarik beberapa ciri *pressure group*, yaitu: *pertama*, kelompok penekan melakukan aktivitas politik di luar sistem politik formal; *kedua*, dalam menyuarakan kepentingannya, kelompok penekan melakukan tekanan-tekanan politik pada sistem politik formal untuk memengaruhi suatu kebijakan publik; dan *ketiga*, kelompok penekan tidak berorientasi menominasikan kandidat untuk memasuki jabatan publik di dalam sistem politik formal. Hal ini berbeda dengan cara kerja partai politik yang menempuh jalur politik formal untuk mempengaruhi kebijakan publik.

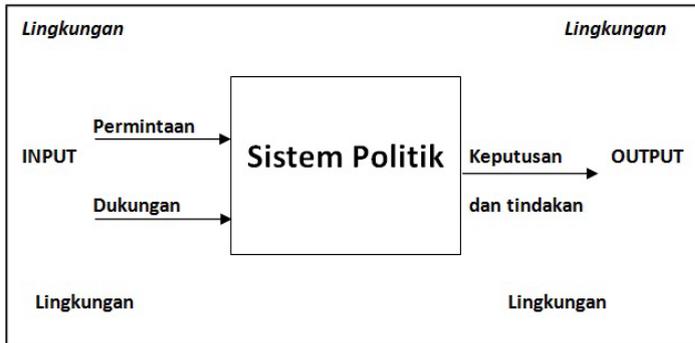
Terdapat beberapa perspektif dalam mendefinisikan peran dan posisi dari kelompok penekan. Hadirnya kelompok penekan dapat diposisikan sebagai aktor dan juga masuk secara inheren ke dalam sistem politik itu sendiri. David Easton, seorang ilmuwan politik modernis yang sangat terpengaruh oleh pemikiran positivistik Newtonian dan Comte berteori bahwa,

“... beberapa ciri sistem politik dalam upayanya mengarahkan pada sebuah teori sistem-sistem umum. Ciri-ciri tersebut adalah (1) sifat-sifat identifikasi dalam bentuk unit dan batas-batas, (2) input dan output, (3) pembedaan di dalam sistem, dan (4) integrasi di dalam sistem.” (Easton, 1953, dalam Chilcote, 2007: 199).

Dari teori tersebut, Easton menjelaskan bahwa dalam suatu sistem politik terdapat proses masukan (*input*) politik, konversi atau integrasi di dalam sistem, dan kemudian muncul keluaran (*output*) politik dalam bentuk kebijakan publik yang bisa menghasilkan

umpan balik (*feed back*). Lebih luas lagi, Easton menambahkan bahwa sistem politik tersebut tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan di mana mereka berada. Menurutnya, “masyarakat menggabungkan seluruh sistem sosial lain dan sebagai akibatnya merujuk pada suprasistem dominan dan menyeluruh di mana sekelompok individu berpartisipasi di dalamnya.” (Easton, 1953, dalam Chilcote, 2007: 201). Menurutnya lingkungan dibagi menjadi dua bagian, yaitu intrasosial dan ekstrasosial. Bagian intrasosial adalah bagian lingkungan sosial dan fisik yang terletak di luar batas-batas suatu sistem politik tetapi tetap di dalam masyarakat yang sama. Sedangkan bagian ekstrasosial menurutnya terletak di luar masyarakat di mana sistem politik itu berlaku. Berikut model sistem politik pertama dari Easton:

Gambar 1
Model Sistem Politik Pertama dari Easton



Sumber: Dicitak ulang dari David Easton, *A Framework for Political Analysis* (1965, hlm. 112) dalam Chilcote (2007: 200).

Dalam konteks itu, “kelompok penekan” sebagai pemain yang berada di luar sistem politik formal yang berlaku, melakukan tekanan politik dikarenakan mereka menjadi entitas di dalam masyarakat tersebut. Kelompok penekan hadir sebagai “lingkungan intrasosial” bagi sistem politik yang berlaku. Easton memandang

bahwa suatu sistem politik, tidak bisa terlepas dari proposisi bahwa, “kehidupan politik sebagai sebuah sistem terbuka yang menerima tekanan dari berbagai lingkungan yang mengelilinginya.” (Easton, 1953, dalam Chilcote, 2007: 203).

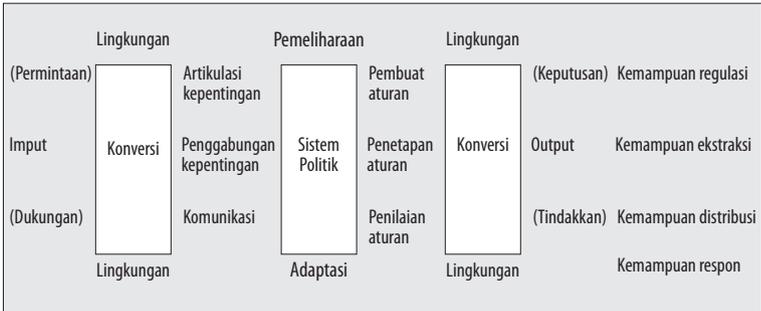
Teori lain mengenai kehadiran kelompok penekan berasal dari Gabriel Almond, dengan masih menggunakan pendekatan teori sistem politik. Sekalipun Almond mendapatkan banyak pengaruh dari pemikiran Easton, tetapi dia memberikan kritik terhadap teori sistem politik Easton dengan mengatakan bahwa,

“kerangka kerja ini bersifat terbatas, ia masih terlalu dekat dengan model sistem generik, dengan saling ketergantungannya, batas-batasnya, serta input dan outputnya, yang secara khusus mendiskriminasi bidang politik.” (Almond, 1956, dalam Chilcote, 2007: 222).

Menurutnya “sistem adalah sebuah konsep menyeluruh mencakup semua tindakan berpola yang relevan dengan pengambilan keputusan politik.” (Almond, 1956, dalam Chilcote, 2007: 220). Almond lebih melihat sistem politik secara fungsional yang menekankan pada peran dan struktur politiknya. Gagasan Almond yang terpengaruh pemikiran Max Webber kemudian masuk dalam pemikiran fungsionalisme. Sistem politik dimaknai tidak linier dan mekanistik antar organ sistem, tetapi juga dinamis dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Dalam konteks “kelompok penekan”, Almond berargumen bahwa “terdapat kategori-kategori fungsional dalam fungsi input, yaitu sosialisasi dan perekrutan politik, artikulasi kepentingan, penggabungan kepentingan, dan komunikasi politik.” (Almond, 1956, dalam Chilcote, 2007: 222). Menurut Almond, di dalam proses input pada suatu sistem politik, fungsi artikulasi kepentingan adalah “ekspresi kepentingan-kepentingan politik dan permintaan terhadap tindakan.” (Almond, 1956, dalam Chilcote, 2007: 222). Fungsi inilah yang masuk ke dalam kategori aktor sebagai kelompok penekan. Berikut gambar skematis dari sistem politik menurut Gabriel Almond:

Gambar 2
Model Sistem Politik Gabriel Almond



Sumber: Adaptasi dari Almond dan Powell (1966: 16-41), dalam Chilcote (2007: 226).

Berangkat dari teori-teori yang telah dikemukakan, peneliti mencoba membandingkan dengan teori lainnya dalam perspektif strukturalis. Sebagaimana yang dijelaskan Chilcote, para pemikir Marxisme klasik berpendapat bahwa,

“Almond dan Powell gagal mengamati pembelahan, ketegangan, dan konflik dalam analisis sistem mereka; gagal membedakan kelas-kelas sosial; dan gagal menghubungkan sistem-sistem nasional ke dalam suatu orde internasional, sehingga tidak menawarkan penjelasan apa pun menyangkut keterbelakangan yang menimpa kebanyakan negara.” (Chilcote, 2007: 254).

Menurut pendekatan Marxis, negara di atas kapitalisme telah memisahkan kepentingan publik dengan kepentingan privat. Karena itu, negara secara jelas melegitimasi kepentingan-kepentingan individu untuk memenuhi kebutuhannya, dan menjauhi kolektivisme. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dan ketidaksetaraan yang berujung pada terjadinya perpecahan dan konflik antar kelas.

“Kelompok penekan” dalam pemikiran pendekatan Marxis, lebih dimaknai hadir dikarenakan adanya konflik antar kelas. Hal tersebut terjadi dengan asumsi bahwa negara yang seharusnya menjamin kepentingan publik, hanya dikuasai oleh kelompok borjuasi dominan. Sehingga pada akhirnya kehadiran negara atau

suatu sistem politik hanya melayani segelintir kelompok kelas dominan itu. Kelompok penekan hadir sebagai bentuk ekspresi kelas bawah (proletarian) untuk menekan kelas borjuasi dominan yang menguasai negara dan alat produksi untuk melakukan perubahan politik.

Masih dalam perspektif Marxian, terdapat beberapa pen-
definisian mengenai kehadiran ‘kelompok penekan’. Salah seorang
pemikir neo-marxis, Antonio Gramsci, menuliskan dalam bukunya
“Selection from the Prison Notebooks” bahwa dalam konteks
sistem politik:

“...masyarakat tidak berada pada “momen” struktur, melainkan superstruktur. Superstruktur dibaginya menjadi dua bagian: masyarakat sipil, didefinisikan sebagai kumpulan organisme yang lazim disebut “privat”, dan “masyarakat politik” atau “negara”. Kedua tingkatan ini berkesesuaian dengan fungsi hegemoni, yang dilaksanakan kelompok dominan di seluruh masyarakat, dan juga “dominasi langsung” yang diekspresikan melalui negara dan pemerintahan “yuridis” (Gramsci, 1929, dalam Listiyono dkk, 2009: 77).

Gramsci melakukan kritik terhadap pemikiran Marx dengan memperluas determinasi konflik antar kelas yang semula hanya terpaut pada kapitalis dan proletar (dalam konteks ekonomi saja), menjadi konflik antara kaum dominan yang menghegemoni dengan kaum minoritas. Dengan demikian, menurut Gramsci, dominasi pada suatu sistem bisa juga terjadi karena adanya genggamannya ideologi atas kaum dominan (mainstream) terhadap kaum minoritas (sub-altern). Dalam kondisi yang seperti itu, perlawanan secara epistemis perlu dilakukan. Kehadiran “kelompok penekan” sangat diperlukan untuk menggoyang hegemoni yang terjadi dalam suatu sistem politik. Dalam bahasa Gramsci, kelompok penekan ini disebut sebagai kaum “intelektual organik” yang melakukan penyadaran secara epistemis kepada masyarakat untuk melawan hegemoni yang terjadi (Gramsci, 1929, dalam Listiyono dkk, 2009: 84).

1.2.2 Gerakan Mahasiswa sebagai Kelompok Penekan

Menurut konsep Arbi Sanit (1988), daya cerap lembaga politik berperan meredakan aktivitas politik mahasiswa, sebagaimana

diperlihatkan oleh kenyataan di masyarakat industri. Kemampuan lembaga politik masyarakat tersebut menyerap aspirasi dan kepentingan mahasiswa untuk mengadakan perubahan, menyebabkan mahasiswa berkesimpulan bahwa misi mereka segera tercapai. Perubahan yang mereka inginkan diambil alih institusi masyarakat.

Dalam situasi seperti itu, gerakan politik mahasiswa tergolong ke dalam *pressure politics*. Gerakan mahasiswa berada di luar struktur dan lembaga politik. Dari sana mereka melakukan desakan supaya aspirasi dan perjuangan mereka dipenuhi lewat kebijaksanaan yang dihasilkan oleh dan melalui lembaga-lembaga politik yang beroperasi.” (Arbi Sanit, 1988, dalam Altbach, 1988).

Menurut Sanit, gerakan mahasiswa perlahan dikonstruksi untuk menjadi *pressure group* seiring dengan semakin terinstitusionalisasikannya lembaga artikulasi politik pada suatu negara. Karena itu mereka lebih memilih untuk melakukan desakan dan tekanan politik terhadap lembaga-lembaga politik yang formal agar aspirasi dan perjuangan mereka dipenuhi.

Sedangkan menurut konsep Philip G. Altbach yang telah melakukan studi gerakan mahasiswa di Amerika Serikat pada periode 1960-1980-an, penyebab munculnya gerakan mahasiswa sebagai kelompok penekan adalah adanya dorongan untuk melakukan perubahan. Ia tumbuh karena adanya dorongan untuk mengubah kondisi kehidupan yang ada untuk digantikan dengan situasi yang dianggap lebih memenuhi harapan. “Dua fungsi gerakan mahasiswa sebagai proses perubahan, yaitu menumbuhkan perubahan sosial dan mendorong perubahan politik.” (Altbach, 1988).

Atas dasar keinginan berubah ke arah yang lebih baik, gerakan mahasiswa pada akhirnya muncul dan memberikan perubahan sosial di masyarakat dan mendorong terjadinya perubahan politik. Menurut Altbach, terdapat dua segmen yang kemudian dibidik gerakan mahasiswa, *pertama* dia berfokus pada perubahan sosial dengan membangun basis dan wacana di sosial masyarakat,

menerjemahkan permasalahan yang terjadi di dalamnya, dan ambil bagian secara konkret dalam merumuskan solusinya. *Kedua*, gerakan mahasiswa pun pada akhirnya harus memasuki dunia politik dengan menjadi kelompok penekan dan melakukan dorongan-dorongan kepada pengambil kebijakan untuk memenuhi harapan tersebut.

Dengan paparan Sanit dan Altbach di atas, gerakan mahasiswa dapat disebut sebagai kelompok penekan seperti yang dijelaskan Key. *Pertama*, gerakan mahasiswa merupakan aktor politik yang berada di luar sistem politik formal. *Kedua*, gerakan mahasiswa selalu melakukan aktivitas politiknya dengan melakukan tekanan-tekanan kepada institusi politik formal untuk mempengaruhi suatu kebijakan publik. Dan *ketiga*, gerakan mahasiswa tidak berorientasi pada menominasikan orangnya untuk masuk ke dalam sistem politik formal dan menduduki jabatan publik.

1.2.3 Ideologi Gerakan Mahasiswa

Fenomena terpenggilnya gerakan mahasiswa masuk ke dalam arena politik kerap kali selalu dibaca hadir dengan sendirinya dan dilihat hanya dari ruang lingkup internalnya saja. Bagaimana tidak, gerakan mahasiswa dinisbatkan sebagai gerakan moral (Sanit, 1999: 219), gerakan intelektual (Sanit, 1999: 10), dan solusi bagi setiap kebuntuan bangsa. Gerakan mahasiswa diposisikan sebagai “barang” yang terbebas dari pengaruh perpolitikan di luarnya. Namun, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian sebelumnya, gerakan mahasiswa ternyata tidak bisa dilihat secara parsial dari sisi internalnya saja, tetapi juga dilihat hubungannya dengan *setting* perpolitikan di luar. Di sini, peran ideologi politik menjadi sangat penting dalam gerakan mahasiswa.

Terdapat banyak pendefinisian ideologi dalam perkembangan ilmu politik. Dalam konteks membaca garis ideologi dalam gerakan mahasiswa, terdapat definisi dari Sanit yang menyatakan bahwa, “pengertian ideologi secara khusus, mengacu pada perangkat

cita-cita tentang kehidupan masyarakat dan negara yang tersusun secara alamiah atau dirancang secara sistematis dalam rangka memenuhi kebutuhan setiap warga negaranya.” (Sanit, 1999: 38).

Terdapat beberapa pemikiran ideologi yang berpengaruh di dalam gerakan mahasiswa yang merepresentasikan gerakan ideologi politik di Indonesia. Menurut temuan dari penelitian Herbert Feith dan Lance Castles (2007: 14), terdapat dua tradisi kuat di Indonesia, yaitu tradisi Islam dan tradisi Jawa Hindu. Menurutnya, tradisi Islam melahirkan Partai Masyumi (Islam reformis) dan Nahdlatul Ulama (Islam tradisional), dan tradisi Jawa Hindu melahirkan PNI (nasionalisme radikal), sementara ideologi Komunisme dan Sosialisme Demokrasi dipengaruhi oleh pemikiran Barat.

1.2.3.1. Nasionalisme Radikal

Pemahaman nasionalisme radikal yang dianut PNI dibahasakan dengan istilah “Marhaenisme” yang pertama kali dicetuskan Bung Karno sebagai adaptasi dari pemikiran Marxisme di Indonesia. Marhaenisme dapat disebut juga sebagai Marxisme yang di-Indonesia-kan. Pemikiran tersebut terilhami secara “kebetulan” ketika Bung Karno bertemu dengan salah seorang petani melarat bernama Marhaen (Feith dan Castles, ed., 1998: 142-143, dalam Al-Banjari, 2010: 37). Menurut Bung Karno, petani seperti Marhaen bukanlah Proletar sebagaimana gagasan yang dibawa Marx, karena dia tidak menjual tenaganya kepada orang lain, dengan tidak ikut memiliki alat produksi, bahkan sawahnya pun miliknya pribadi. Karena itu, menurut Bung Karno orang macam Marhaen bersama orang-orang melarat lainnya inilah yang harus diperjuangkan di Indonesia.

Dalam pergerakannya, teori Marhaenisme tidak hanya diposisikan sebagai teori politik tetapi juga menjadi teori perjuangan (Slametmujana, 1969: 16). Tujuan dari perjuangan tersebut adalah perbaikan nasib untuk keluar dari sistem *stelsel* kapitalisme dan imperialisme yang mengungkung bangsa. Untuk itu, kaum Marhaenis harus digerakkan dan disadarkan dalam suatu

kesatuan pergerakan massa aksi yang radikal (Slametmuljana: 1969). Radikalisme yang dimaksud Bung Karno adalah ketegasan anti-penjajah.

Setelah kemerdekaan bangsa ini tercapai, maka menurut Bung Karno, pergerakan Marhaenisme harus mewujudkan tujuannya sebagai berikut:

“...terbentuknya negara republik yang berdasarkan sistem politik ekonomi kerakyatan, yakni negara republik yang segala kedaulatannya ada di tangan rakyat. Urusan politik, urusan ekonomi, urusan pendidikan, urusan kebudayaan, urusan apa saja dan terutama sekali urusan ekonomi haruslah di baliknya negara, semua hasil-hasil perusahaan besar itu bagi keperluan rakyat. Tidak boleh ada satu perusahaan lagi yang secara kapitalistis menggemukkan kantong seseorang borjuis ataupun menggemukkan kantong burgerlijke staat, tetapi masyarakatnya satu kerukunan rakyat, satu pekerjaan bersama dari rakyat, satu kesama-rasamaan dari pada rakyat.” (Slametmuljana, 1969: 23).

Menurut Bung Karno, sistem itulah yang disebut dengan sosio-demokrasi, di mana sosio-demokrasi hanya bisa dibentuk hanya dari sosio-nasionalisme. Nasionalisme ketimuran yang tidak berkompromi sedikit pun dengan kepentingan borjuis kapitalis, tetapi nasionalisme yang membawa kepentingan Kaum Marhaen.

Cita-cita sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi itulah yang kemudian menjadi dasar pemikiran dari Pancasila yang termanifestasikan dalam sila ke-2 hingga ke-5.¹⁰ Karena itu, Bung Karno pernah menyebutkan bahwa Pancasila tersebut dapat diperas menjadi Trisila (tiga dasar), yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Sosio-nasionalisme, dan Sosio-demokrasi. Lalu, Trisila tersebut dapat diperas lagi menjadi Ekasila (satu dasar), yaitu gotong-royong. Jadi, inti dari Pancasila adalah gotong-royong (Soekarno, 1965).

Setelah mengkaji asas perjuangan Bung Karno, selanjutnya perlu dikaji teori perjuangan Bung Karno tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Bung Karno pernah mengeluarkan gagasan yang terkenal bernama Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Bung Karno sangat yakin bahwa dengan persatuan dan kesatuan bangsa, baik dari golongan Nasionalis, Agamis,

¹⁰ Sosio-nasionalisme adalah terjemahan dari sila ke-2 dan ke-3, dan sosio-demokrasi adalah terjemahan dari sila ke-4 dan ke-5.

maupun Komunis¹¹, bangsa ini akan mengalahkan kapitalisme dan imperialisme (Slametmuljana, 1969: 23-27). Perihal Nasakom, Bung Karno menyampaikan:

“...aku juga berkata bahwa Pancasila ini dapat diperas lagi dengan cara lain, bukan secara Ketuhanan Yang Maha Esa, Sosio-nasionalisme, Sosio-demokrasi, tetapi bisa diperas pula secara lain, dan perasan yang lain ini adalah Nasakom. Nasakom adalah pula perasaan Pancasila, dus Nasakom adalah sebenarnya juga gotong-royong, sebab gotong royong adalah de totale perasaan daripada Pancasila, maka perasan dari Nasakom adalah gotong-royong pula.” (Amanat Indoktrinasi Presiden Soekarno pada kursus kilat kader Nasakom, 1 Juni 1965).

Pemikiran Nasionalis Radikal yang dibawa Bung Karno juga sangat terpengaruh akar tradisinya yang berasal dari tradisi Jawa Hindu (Feith dan Castles, 2007: 16). Pemikiran tradisi Jawa-Hindu tidak memiliki bentuk yang jelas dalam pengorganisasiannya, tetapi menguat dalam aktivisme politik PNI (Feith dan Castles, 2007). Menurut Artawijaya (2010), dalam soal teologis, tradisi Jawa-Hindu serupa dengan ajaran Theosofi (aliran kebatinan) yang merujuk pada pemikiran Neo-Platonisme yang sudah ada sejak dulu dan juga digunakan oleh para mistikus dan okultis Kristen. Ajaran tersebut meyakini terjadinya kesatuan mistis yang tunggal antara makhluk dengan Tuhan (Anton Bakker, 1986, dalam Artawijaya, 2010: 44). Ajaran tersebut meyakini bahwa semua Tuhan pada hakikatnya adalah sama, Tuhan yang satu, Tuhan yang tidak terhingga. Dalam persoalan agama, ajaran ini melakukan netralisasi agama dengan menyamakan semua agama yang ada dengan satu Tuhan yang sama. Menurut mereka agama bukan merupakan ajaran syariat dan doktrin-doktrin, melainkan sifat cinta pada sesama, kemanusiaan, sopan budi, dan itu semua adalah perkara batin.

Pencetus ajaran Theosofi di Indonesia adalah Helena Petrovna Blavatsky, aristokrat Rusia berdarah Yahudi yang menjadi anggota Freemasonry, organisasi internasional Yahudi (Artawijaya, 2010). Di Indonesia, pegiat dari pemikiran kebatinan ini di antaranya adalah R. M. Soetatmo Soerjokoesoemo dan Prof. Soepomo (Feith dan Castles, 2007: 183, 188).

¹¹ Pada masa pemikiran ini digulirkan, ketiga golongan inilah yang menguat di masyarakat.

1.2.3.2. Islam

Yudi Latif, seorang ilmuwan politik, membagi identitas Islam sebagai ideologi politik di Indonesia ke dalam dua kelompok, yaitu Islam reformis-modernis dan Islam tradisional (2005: 116-120). Yudi menggunakan istilah muslim “reformis” untuk mendefinisikan kelompok muslim yang melakukan revitalisasi nilai-nilai Islam dengan mempurifikasi agama sesuai dengan orisinalitasnya, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai sosok sempurna dan panutan sehingga menghilangkan pengkultusan wali atau ulama, dan menghilangkan tradisi atau kebiasaan yang ketika zaman peredaran merembes masuk. Pemikiran Muslim reformis ini berasal dari gerakan ulama dan kaum sufi dari abad 17-18 untuk menjawab krisis sosial yang dialami umat Islam. Kemudian istilah muslim “modernis”, menurut Yudi adalah pemikiran yang berasal dari kelompok Ottoman Muda di Turki pada 1860-an dan 1870-an yang bertujuan mengadaptasi Islam dengan peradaban modern (Barat), tetapi dengan tetap mempertahankan kesetiaan terhadap kebudayaan Islam. Sedangkan, menurutnya muslim “tradisional”, lebih didefinisikan sebagai kelompok muslim yang menolak berkompromi dengan kemajuan ilmu pengetahuan Barat dan lebih memilih mempertahankan tradisi-tradisi yang telah ada sebelumnya.

Berikutnya, Drs. Poespoprodjo (1984: 13, 16, 20) yang berpandangan bahwa muslim reformis-modernis hadir di Indonesia lantaran masifnya keberangkatan Haji dari Nusantara ke Arab Saudi di penghujung 1890-an. Muslim reformis-modernis berkeyakinan bahwa Islam sebagai kesatuan *din wa daulah* (agama dan negara) sangat mampu membawa kebahagiaan bagi umat manusia, tidak hanya kelak di akhirat tetapi juga di dunia ini. Poespoprodjo menambahkan, bahwa kerap muslim tradisional (terutama di antara orang Jawa), mendakwa muslim reformis-modernis sebagai perusak agama Islam karena mereka dianggap melakukan peng-Arab-an Islam. Hal tersebut mengakibatkan orang Jawa Islam ingin menjadi Islam Jawa, bukan Islam Arab. Namun kemudian,

perbedaan antara muslim “reformis-modernis” dan muslim “tradisionalis” cukup cair.

Sedangkan, menurut teori Anders Uhlin (1998: 74-86), dalam konteks wacana demokrasi, ideologi Islam dibagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, pemikiran Islam modernis yang ditandai dengan penerimaannya pada wacana demokrasi mereka memakai bahasa Islam. Mereka meyakini bahwa wacana demokrasi sejatinya sudah ada dalam ajaran Islam itu sendiri. Menurut Uhlin, sekalipun pengaruh pemikiran Barat kuat dalam wacana ini, kaum modernis kerap menunjukkan sikap anti-Barat. *Kedua*, pemikiran Islam neo-modernis yang didefinisikan sebagai kaum muslim yang menerima pengaruh pemikiran Barat dan juga tidak melupakan tradisi. Kaum neo-modernis mengkombinasikan pemikiran tradisionalis dengan modernis (Barat). *Ketiga*, pemikiran Islam transformis yang merupakan wacana gerakan Islam yang lebih mengedepankan nilai-nilai populis kesetaraan dan keadilan sosial. Kaum muslim transformis menangkis nilai-nilai yang dipegang kaum menengah baru. Dalam pemikiran ini, dapat ditemukan konsep-konsep yang mendekati Marxian (Wertheim, 1986: 28, dalam Uhlin, 1998: 84). Kerap pemikiran ini disebut oleh sebagian ilmuwan politik sebagai persekutuan baru antara kaum Marxis dengan Muslim (Uhlin, 1998).

1.2.3.3. Komunisme

Sutan Sjahrir (1967: 2-4) menjelaskan dalam bukunya “Sosialisme dan Marxisme” bahwa, pemikiran komunisme berasal dari seorang tokoh filsafat politik bernama Karl Marx. Menurut alam pikirnya, Marx memakai cara berpikir materialisme-dialektis sebagai bentuk kritik dan perlawanan atas perkembangan filsafat spekulatif di zamannya. Ketika itu, pemikiran Kant dan Hegel sedang berkembang di tengah masyarakat intelektual Eropa. Dalam ajaran “materialisme”, Marx menggunakannya sebagai alat perlawanan terhadap teori Hegelian dengan mencari kekuatannya pada cara berpikir orang yang giat dalam ilmu alam. Marx memandang

dunia dari kacamata kebendaan yang dapat dipahami dan malah dikuasai. Di dalamnya terdapat kontestasi hukum yang menentukan kejadian dan kenyataan alam yang bersifat benda.

Sedangkan menurut Sjahrir, ajaran “dialektis” merupakan adaptasi Marx dari pemikiran Hegel yang mencoba mengkritisi pemikiran Aristoteles. Sifat dialektis dijelaskan dengan bentuk *thesis*, *anti-thesis*, dan *synthesis*. Pemikiran manusia tentang sesuatu pada suatu ketika dapat berubah di kemudian hari, dan selanjutnya dapat berubah kembali menuju pemikiran sebelumnya dengan pemahaman yang lain. Menurut Hegel yang kemudian diturunkan oleh Marx, dunia materi yang nyata ini disebut sebagai dunia objektif yang diposisikan sebagai hal utama, sedangkan cara berpikir subjektif manusia dalam memahami dan mendefinisikan materi yang nyata tersebut diposisikan sebagai hal sekunder. Hegel menyebut cara-cara berpikir manusia tersebut sebagai ide. Sedangkan menurut Marx, istilah “ide” tersebut diturunkan derajatnya menjadi pemahaman cara manusia memenuhi kebutuhan dasarnya berupa fisik dan jasmani (Sjahrir, 1967). Karena itu, dalam pemikiran materialisme-dialektis Marx, perihal ekonomi menjadi hal penting dalam memahami filsafat politik.

Berdasarkan pendapat Mohammad Hatta (1963: 2) dalam bukunya “Perihal Ekonomi Sosialis Indonesia”, Marxisme atau sering disebut sebagai sosialisme-ilmiah, merupakan ajaran yang paling populer dalam *madzhab* sosialisme. Menurutnya, “sosialisme dipahami sebagai tuntutan institusionil, yang bersumber dalam lubuk hati yang murni, berdasarkan perikemanusiaan dan keadilan sosial.” Pemikiran materialisme-dialektis Marx tersebut akhirnya diteruskan menjadi manifes pergerakan komunis internasional.

Menurut Sjahrir (1967: 25), dalam konteks PKI di era 1920-an hingga 1960-an, ajaran komunisme yang dianut ketika itu berasal dari ajaran Marxis-Leninis yang menguat terutama setelah terjadi revolusi Bolshevik di Rusia pada 1917. Menurutnya, ajaran Marxis-Leninis meyakini terbentuknya masyarakat komunis internasional yang berdasarkan pada satu partai pelopor yang merepresentasikan

diktator proletar pada sebuah negara. Diktator proletar tersebut dibentuk untuk memecah belenggu kapitalis dengan mengubah masyarakat kapitalis menjadi masyarakat sosialis. Lenin sebagai penerus dari ajaran dan gerakan Marxisme lebih menerangkan perkembangan kapitalisme dari faktor-faktor yang sangat politis, berbeda dengan penerus-penerus Marxisme lainnya seperti Rosa Luxembourg dan Rudolf Hilferding yang lebih cenderung berfokus pada ilmu ekonomi (Sjahrir, 1967: 11).

1.2.3.4. Sosialisme-Demokrasi

Pemikiran Sosialisme-Demokrat dibawa oleh Sjahrir sebagai pendiri Partai Sosialis Indonesia. Paham ini yang paling getol melawan ajaran dan gerakan Marxisme-Leninis di Indonesia. Beberapa kritik yang dilayangkan Sjahrir adalah teori Marx tentang “*Verelendung*” atau proletarisasi yang berarti menjalarnya kesengsaraan akibat berkembangnya kapitalisme, pada praktiknya hal ini terbukti tidak terjadi terutama di negara berkembang. Menurutnya, seiring berkembangnya kapitalisme, kaum buruh terbukti memperoleh penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya lantaran semakin bertambahnya *upah rielel* yang diterima oleh mereka dan munculnya *skilled labour* (buruh terlatih) yang berjiwa kaum menengah (1967: 15, 19).

Hal tersebut ditambah dengan kondisi di negara berkembang yang dominan adalah masyarakat tani ketimbang kaum buruh. Masyarakat tani memiliki alat produksinya, menikmati hasil produksinya, tetapi tetap dalam kondisi yang melarat¹² sehingga hubungan buruh, tani, dan kapitalis semakin kabur dan menumpul. Dengan demikian teori Marx tentang “*Klassenstrijd*” atau pertentangan kelas dianggap gagal (Sjahrir, 1967: 21). Kaum buruh terlatih dan terpelajar atau *hoeden proletariaat* (kaum buruh bertopi) terbukti lebih mendapatkan kedudukan dari berkembangnya kapitalisme itu sendiri daripada berjuang bersama masyarakat tani. Sjahrir menambahkan kritiknya pada

¹² Oleh Bung Karno, kaum ini disebut sebagai Marhaen.

ajaran Marxisme bahwa teori internasionalisme buruh dan krisis kapitalisme pun tidak terjadi dalam praktiknya terutama di negara-negara postkolonial (1967: 39, 59).

Selanjutnya menurut Sjahrir, pemikiran Sosialisme-Demokrat tidak bisa dilepaskan dari teori *Welfare State* (Negara Kemakmuran) yang mendukung hadirnya negara dengan dasar sosialis (kepentingan bersama) yang menjamin kemakmuran negeri, menjamin kehidupan dan kemajuan rakyatnya, serta menjamin kesehatannya. (Sjahrir, 1967: 26). Dalam bidang perekonomian, hak milik perusahaan tidak lagi dikuasai kapitalis orang per orang, tetapi berubah menjadi sistem perseroan sehingga kepemilikan perusahaan menjadi ada pada banyak orang. Para pemegang *sero* tersebut sekalipun memiliki saham dari perusahaan, tetapi mereka tidak memiliki sedikitpun kuasa langsung dari jalannya perusahaan yang secara teoretis dimilikinya itu. Dari sini kemudian dipisahkan antara “kekuasaan” atas perusahaan dengan “kepemilikan” atas perusahaan tersebut. Dengan demikian, para *hoeden proletariaat* dapat berkarir dari buruh biasa menjadi pemimpin dalam direksi atau manajer perusahaan, kedudukan tersebut disebut sebagai *managerial class* (Sjahrir, 1967: 22, 23). Sekalipun kaum buruh tersebut tidak memiliki perusahaan, dengan kedudukannya mereka telah menguasai perusahaan tersebut.

Hal yang kemudian paling dikritisi ideologi Sosialisme-Demokrasi terhadap ajaran Marxisme-Leninis adalah dalam bidang politik. Mereka sangat menentang pemikiran *diktatur proletar* yang diterapkan di Uni Soviet dan negara-negara sosialis lainnya. Kaum Sosialis-Demokrat lebih percaya akan pemilihan langsung secara liberal dan demokratis. Dengan adanya sistem politik demokrasi tersebut, maka akan sangat mungkin bagi kaum buruh untuk memperoleh kekuasaan dari serikat pekerja untuk mengontrol dan mencegah perkembangan kapitalisme sebagaimana yang diramalkan Marx (Sjahrir, 1967: 27). Dengan demikian, Negara hadir untuk menjamin kepentingan dan kesejahteraan kaum buruh.

1.2.3.5. Pemetaan Ideologi Gerakan Mahasiswa

Dalam mengategorikan ideologi gerakan mahasiswa, Sanit (1999: 38) membaginya ke dalam dua kelompok. *Pertama*, ideologi yang terjadi secara berangsur dan tanpa melalui suatu prosedur yang diatur secara ketat, seperti agama yang di ideologikan, ajaran Demokrasi, Nasionalisme, dan Liberalisme. Sedangkan yang *kedua* adalah ideologi yang dirancang secara sistematis oleh pecinta atau penggagasnya, seperti Marxisme, Komunisme, dan Marhaenisme.

Selanjutnya, terdapat teori lain yang dirumuskan oleh Anders Uhlin (1998: 133-142), yang memetakan garis ideologi mahasiswa dengan studi kasus gerakan pro-demokrasi tahun 1998 ke dalam empat kelompok: *Pertama, wacana radikal* melalui bentuk demokrasi partisipatoris yang berorientasi kemasyarakatan. Wacana ini di dalamnya adalah kaum Marxis, pemikiran populis kiri, dan Feminis. *Kedua, kelompok liberal* yang berfokus pada hak-hak individu dengan kebebasan ekonomi pasar sebagai titik pijak. Wacana ini dapat dijabarkan ke dalam Sosialisme Demokrat, liberal politis, dan liberal ekonomis. *Ketiga, wacana konservatif* yang meletakkan aturan dan standar normatif hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Wacana ini secara umum tidak kompromi atas reformasi sosio-ekonomi mendasar. *Keempat, wacana demokrasi* dengan dilandasi nilai-nilai dan semangat Islam yang didalamnya terdiri atas wacana modernis, neomodernis serta transformis.

Berdasarkan paparan tersebut, Uhlin melakukan pengkategorisasian garis ideologi gerakan mahasiswa lebih spesifik dan khusus dari pengkategorisasian yang dilakukan Sanit. Kutub ideologi yang terjadi secara alamiah sebagaimana yang dijabarkan oleh Sanit dapat dipecah menjadi Kelompok Liberal dan Kelompok Demokrasi menurut Uhlin. Sedangkan kutub ideologi yang diperjuangkan secara ketat dan sistematis, dapat diterjemahkan menjadi Kelompok Radikal dan Kelompok Konservatif.

1.2.4 Sikap dan Metode Gerakan Mahasiswa

Menurut Robert Michels, gerakan mahasiswa sebagai gerakan intelektual dan kelompok penekan dalam bersikap dibagi ke dalam dua titik ekstrem sebagai berikut,

“Kita bisa membedakan dua kategori intelektual. Yang pertama berhasil dalam memperoleh pekerjaan empuk di negara dan masyarakat dalam suatu posisi yang tepat bagi kelasnya...

... Kelompok-kelompok lain adalah musuh negara yang paling sejati, elemen-elemen tak kenal lelah yang menyulut setiap kekecewaan, yang menempatkan diri mereka pada penyelesaian setiap huru-hara...” (Michels, 1931, dalam Sanit, 1999: 48).

Sikap gerakan mahasiswa sangat ekstrem dibedakan oleh Michels dalam menyikapi atau berhubungan dengan pemerintah. Di satu sisi, gerakan mahasiswa hadir sebagai intelektual yang menjadi “*onderbouw*” atau “*good boy*” bagi pemerintah. Bahkan, kehadiran mereka dapat menjadi kelompok penekan bagi lawan-lawan politik pemerintah. Aktivistik-aktivisnnya menjadi pendukung dari pemerintah, dengan menerima kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, bahkan mereka mulai memasuki gerbong-gerbong kekuasaan dalam suatu negara ataupun masyarakat. Di sisi lain, mereka hadir sebagai musuh negara atau “*watch dog*” yang terus menekan dan mengkritisi pemerintah.

Dari pilihan sikap tersebut, selanjutnya akan dapat terlihat bagaimana metode gerakan yang dilakukan KM UGM untuk melancarkan tekanan-tekanannya. Arbi Sanit (1999: 126) menjabarkan bahwa metode gerakan mahasiswa dapat dikelompokkan ke dalam dua tipe. *Pertama* adalah gerakan yang mengkombinasikan sejumlah bentuk kegiatan yang tergolong ke dalam membujuk (persuasif). Pilihan yang tersedia dalam tindakan membujuk ialah lobby, petisi, pernyataan pendapat, demonstrasi secara tertib, menulis di media massa. *Kedua* adalah dalam bentuk tindakan paksaan (koersif) yang terdiri dari pawai kekuatan massa yang disertai huru-hara dan menghalangi kelancaran kehidupan sehari-hari, mengacaukan pekerjaan lembaga politik, menekan pejabat, mogok, boikot, sampai kepada melawan alat keamanan.

Namun menurutnya, pada umumnya gerakan mahasiswa mengandalkan kepada gerakan massa yang terkombinasi dengan metode lobby atau petisi sebelumnya.

1.3 Penyajian Buku

Buku ini disusun berdasarkan struktur kronologis waktu untuk memudahkan pembaca dalam memahami peran KM UGM sebagai kelompok penekan serta dinamikanya dari rezim ke rezim pemerintah. Namun, sistem penulisan berdasarkan struktur kronologis waktu memang memiliki kelemahan, menurut Robert K. Yin (2003: 187), “peneliti akan menghabiskan energi terlalu banyak untuk menulis pendahuluan suatu kasus, termasuk sejarah dan latar permulaannya, dan menyisakan waktu tak cukup untuk menulis peristiwa sekarang dari kasus tersebut.” Maka dari itu, penuturan buku ini dirancang tidak terlalu terjebak secara mendakik-dakik pada konteks kesejarahannya, tetapi lebih fokus terhadap proposisi-proposisi teoretis yang telah dijabarkan sebelumnya dengan merangkaikannya dalam kronologis waktu.

Pada bab pertama penulisan, dijabarkan mengenai pendahuluan penelitian. Pendahuluan tersebut mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta kerangka teoretis. Pada bab kedua, pembahasan akan memasuki peran KM UGM sebagai kelompok penekan, peta ideologi, sikap, dan metode gerakannya pada masa awal pembentukannya di tahun 1950 hingga penghujung akhir masa Orde Lama. Terdapat dua sub-bab dalam bab ini, *pertama* membahas tentang periode keemasan sejarah gerakan mahasiswa UGM juga termasuk sejarah pembentukan Dema UGM dengan fokus rentang waktu tahun 1950-1962. Sub-bab *kedua* lebih membahas mengenai periode meningkatnya suhu politik gerakan mahasiswa dalam Dema UGM sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas politik di nasional dan internasional pada 1962-1966.

Pada bab ketiga, bahasan dilanjutkan terkait mengenai peran KM UGM sebagai kelompok penekan, peta ideologi, sikap, dan metode gerakannya di masa Orde Baru. Terdapat empat sub-bab

dalam bab ini. Sub-bab *pertama* menjelaskan tentang stabilisasi Orde Baru dalam tubuh Dema dan gerakan mahasiswa UGM dari tahun 1966-1970. Sub-bab *kedua* menceritakan tentang perlawanan yang dilakukan Dema UGM terhadap rezim Orde Baru dalam rentang waktu tahun 1970-1978. Kemudian pada sub-bab *ketiga*, akan dijelaskan mengenai pemberangusan gerakan mahasiswa dengan dibubarkannya Dema dan diterapkannya NKK/BKK pada 1978-1987. Terakhir pada sub-bab *keempat*, akan dijelaskan kebangkitan gerakan mahasiswa di UGM dari tahun 1987 hingga mencapai klimaksnya pada 1998.

Bab keempat, narasi akan berfokus pada peran KM UGM sebagai kelompok penekan, peta ideologi, sikap, dan metode gerakannya di masa Pasca-Reformasi. Dalam bab keempat ini, KM UGM akan didedah ke dalam beberapa era kepemimpinan nasional, yaitu pada periode kepemimpinan B. J. Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudoyono. Bab ini terbagi menjadi dua sub-bab, *pertama* mengenai terjadinya proses demokratisasi dalam gerakan mahasiswa dan juga liberalisasi pendidikan di Indonesia. Dan pada sub-bab *kedua* akan dibahas mengenai usaha-usaha pengembalian fokus gerakan mahasiswa kepada isu nasional. Terakhir, dalam bab kelima sebagai penutup akan dibahas mengenai kesimpulan serta implikasi teoretis dari penelitian ini terhadap perkembangan studi mengenai gerakan mahasiswa ke depannya dan juga implikasi aplikatif bagi praktisi gerakan mahasiswa terutama bagi gerakan mahasiswa di UGM pada khususnya.

bab II

KM UGM di
Era Orde Lama

KM UGM di Era Orde Lama

Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (KM UGM) hadir sebagai bentuk konkret peran intelegensia mahasiswa Gadjah Mada untuk mengisi ruang-ruang pembangunan pasca-Proklamasi Kemerdekaan 1945. Terlebih, UGM memiliki filosofi kampus perjuangan dan kampus kerakyatan. Hal tersebut ditambah dengan kondisi politik Orde Lama, di mana bangsa ini masih berusaha menjadi suatu bangsa seutuhnya.

Bab ini akan membahas dua periode penting dalam dunia pergerakan mahasiswa UGM di era Orde Lama. *Pertama*, periode 1950-1962 yang akan membahas tentang sejarah awal gerakan mahasiswa Gadjah Mada dengan melihat sejarah pembentukan Keluarga Mahasiswa, tokoh mahasiswa yang terlibat, peran konkret sebagai kelompok penekan, dan juga ideologi gerakan mahasiswa yang berkontestasi. *Kedua*, pembahasan akan memasuki periode 1962-1966, tepat di mana mulai terjadinya dampak konflik politik internasional terhadap politik domestik yang juga melingkupi politik kampus.

2.1 Sejarah Mahasiswa UGM (1950-1962)

Gerakan intelegensia mahasiswa UGM sejatinya telah dimulai jauh sebelum Keluarga Mahasiswa UGM dibentuk pada 1950. Sebagai contoh, saat proses pendirian UGM pada 1946-1949, mahasiswa bersatu padu dengan para dosen untuk mengusung peralatan dari Jakarta (Insitut Pastur) demi keperluan pendirian Fakultas Kedokteran, sementara itu peralatan dari Bogor untuk pendirian Fakultas Kedokteran Hewan, dan juga pembentukan

Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Teknik di Yogyakarta. Beberapa balai pendidikan rakyat di Surabaya, Klaten, Malang, juga secara serentak dipindahkan ke Yogyakarta. Karena itu, bisa dibayangkan dosen dan mahasiswa adalah pendiri dari fakultas-fakultas tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat unsur mahasiswa yang terlibat dalam setiap upaya pendirian dan konstruksi filosofis fakultas-fakultas di UGM.¹

Mahasiswa UGM juga terlibat aktif dalam perang kemerdekaan 1945, dan gerakan perlawanan terhadap Agresi Militer Belanda pada 1947-1948.² Ketika Belanda melakukan pengepungan terhadap Yogyakarta sebagai Ibukota Negara pada Agresi Militer II, tentara dan rakyat bersatu melakukan perlawanan secara gerilya di bawah komando Panglima Besar Jenderal Soedirman. Mahasiswa dan dosen pun ikut serta menjadi gerilyawan, di antara yang terlibat adalah Prof. Dr. Sardjito³ dan Prof. Ir. Johannes⁴ (Slametmuljana, 1969: 284). Kemudian yang tidak kalah pentingnya, mahasiswa pun turut serta dalam melawan pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang diinisiasi oleh Muso di Madiun pada 1948. Mahasiswa ikut membantu mengatur administrasi di Madiun ketika itu.⁵ Hingga akhirnya pada tanggal 19 Desember 1949, Universitas Gadjah Mada secara resmi didirikan di Yogyakarta oleh Presiden Soekarno, dengan Prof. Dr. M. Sarjito sebagai Presidennya⁶. UGM menjadi universitas negeri nasional pertama yang didirikan oleh Republik ini.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang, tepat pada 1950 didirikanlah Keluarga Mahasiswa di UGM dengan Dewan Mahasiswa (Dema) sebagai lembaga perwakilannya yang bertujuan menaungi semua aktivisme mahasiswa sebagai *student government*. Pendirian Dema ini adalah bentuk dari pengkristalan

¹ Wawancara dengan Prof. Dr. dr. Sutaryo, Sp.A(K) di RSUD Sardjito UGM, pada tanggal 22 Oktober 2012. Beliau adalah mantan aktivis Dema UGM, Ketua Senat Akademik UGM tahun 2007-2012, dan Anggota Majelis Wali Amanat UGM tahun 2012.

² *Ibid.*

³ Kelak pada pendirian UGM di tahun 1949 beliau menjadi Rektor pertamanya.

⁴ Beliau adalah Rektor UGM setelah Prof. Dr. Sardjito.

⁵ *Ibid.*

⁶ Dahulu "Rektor" disebut sebagai "Presiden".

kontribusi nyata mahasiswa UGM bagi dunia gerakan mahasiswa di Indonesia. Periode tahun 1950 hingga menjelang 1962 ini sering disebut sebagai masa ideal Dema UGM.

2.1.1 Pembentukan Dewan Mahasiswa UGM

Tepat beberapa minggu setelah UGM didirikan, pada 11 Januari 1950 dibentuk suatu cikal bakal formulasi pengorganisasian gerakan mahasiswa intra-universitas pertama di Indonesia (Arbi Sanit, *Op.cit*). Gerakan itu diinisiasi sekelompok mahasiswa yang di antara tokohnya adalah Nashir Alwi, Sufa'at, dan Koesnadi Hardjosoemantri.⁷ Gerakan ini dibentuk untuk menyatukan gerakan mahasiswa ketika itu yang terkotak-kotak berdasar pada politik aliran atau ideologi gerakannya. Formulasi pengorganisasian gerakan mahasiswa itu disebut sebagai Dewan Mahasiswa (Dema) dan Majelis Mahasiswa (MM) yang merepresentasikan mahasiswa universitas.

Dema berperan sebagai lembaga yang melakukan fungsi eksekutif, sedangkan MM melakukan fungsi legislatif dan normatif.⁸ Hal tersebut diikuti dengan didirikannya Komisariat Dewan Mahasiswa (Kodema) beserta lembaga legislatifnya di fakultas.⁹ Pengurus Dema generasi pertama di antaranya terdiri dari Nashir Alwi menjabat sebagai Ketua, Sufa'at sebagai Wakil Ketua, dan Koesnadi Hardjosoemantri sebagai Badan Pekerja Dema UGM.¹⁰

Akhirnya, secara formal pembentukan Keluarga Mahasiswa yang didalamnya terdapat Dema dan MM disahkan oleh putusan sementara Senat Universitas No. 891/Sn/1/52 yang dikeluarkan pada 16 April 1952.¹¹ Menurut Prof. Dr. M. Sardjito dalam laporan tahunannya pada 1952, Keluarga Mahasiswa didirikan sebagai

⁷ Wawancara dengan Suwarni, di Arsip UGM pada 7 Februari 2013. Beliau pernah menjabat sebagai Direktorat Arsip UGM.

⁸ Wawancara dengan Drs. Bambang Praswanto, M.Sc, pada 23 Oktober 2012. Beliau adalah mantan aktivis Dema UGM periode 1972-1978, Sekjend KAGAMA 2012, dan Anggota Majelis Wali Amanat UGM 2012.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Wawancara dengan Suwarni, *Op.cit.*

¹¹ Lihat "Laporan Tahunan Universitas Negeri Gajah Mada Bagi Tahun Pengadjaran 1951/1952" oleh Prof. Dr. M. Sardjito selaku Presiden Universitas, diucapkan pada 19 September 1952.

bentuk kesatuan seluruh masyarakat mahasiswa Universitas Negeri Gadjah Mada¹², sedangkan Dema ditetapkan sebagai bentuk perwakilan Keluarga Mahasiswa tersebut yang dalam hal-hal tertentu mengenai kepentingan mahasiswa dapat diminta pendapatnya oleh instansi-instansi universitas, dan yang juga atas kehendak sendiri dapat mengajukan pendapatnya terhadap hal-hal lainnya. (1952: 17).

Pembentukan Dema di UGM tersebut diikuti pembentukan Dema di universitas-universitas lain yang didirikan setelahnya, seperti UI dan ITB. Dalam perkembangannya hingga tahun 1957, terbentuk pula forum nasional organisasi-organisasi intra-universitas (Dema) yang disebut sebagai Majelis Mahasiswa Indonesia (MMI). Forum nasional itu berada dibawah pengawasan Departemen Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan untuk mempermudah pengaruh pemerintah terhadap universitas (Yudi Latif, 2005: 440). Sedangkan untuk menaungi gerakan mahasiswa ekstra-universitas yang berkembang sebelumnya, dibentuklah Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) sepuluh tahun sebelum MMI didirikan, yaitu tepatnya pada tahun 1947 (Yudi Latif, 2005).

2.1.1.1 Filosofi Dewan Mahasiswa

Kata “dewan” setara maknanya dengan ‘perwakilan’, dalam hal ini diintensikan sebagai representasi kearifan, kebijaksanaan, dan intelektualitas.¹³ “Dewan Mahasiswa UGM” berarti sekelompok perwakilan mahasiswa yang mewakili kearifan, kebijaksanaan, dan intelektualitas dari nilai-nilai ke-UGM-an dan berkontribusi nyata bagi rakyat sebagai bentuk implementasi dari filosofi kampus perjuangan. Dema dan MM bersifat kekeluargaan dan gotong-royong dengan sesama mahasiswa, dosen, dan juga universitas.¹⁴ Hal tersebut sebagai cerminan peran penting mahasiswa dahulu

¹² Sebelum disebut Universitas Gadjah Mada, dahulu disebut sebagai Universitas Negeri Gadjah Mada.

¹³ Wawancara dengan Prof. Dr. Sutaryo, *Op. cit.*

¹⁴ *Ibid.*

sebelum didirikannya UGM. Karena itu, gerakan Dema selalu menyatu dengan kegiatan di fakultas dan universitas. Dalam hal ini, universitas turut bertanggungjawab atas gerakan mahasiswa dalam berkontribusi bagi bangsa dan negara.

Dema sebagai aktivisme yang menaungi keseluruhan mahasiswa berada dalam satu wadah dengan dosen dalam universitas, sehingga menjadi sebuah kesatuan gerak atau “organisme”.¹⁵ Filosofi “organisme” dimaksudkan sebagai situasi di mana seluruh anggota keluarga besar UGM merupakan satu tubuh yang masing-masing anggotanya saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada satu di antara lain merasa lebih penting dan atau mementingkan kepentingannya saja. Dari kesatuan gerak organisme itulah, Dema mengambil peran penting dalam setiap penyelesaian permasalahan bangsa.

Ketika itu, gerakan yang dibangun Dema UGM lebih ke arah penalaran dan akademik.¹⁶ Mereka mengadakan tutorial mata kuliah untuk junior-junior di kampus. Begitupun dengan gerakan-gerakan ekstra-universitas, mereka melakukan hal yang sama kepada junior-junior mereka, sehingga cara untuk menarik anggota baru ketika itu bukan berdasarkan pada sentimen ideologi, tetapi berbasiskan pada baik atau tidaknya *mentoring* mata kuliah yang diberikan kepada juniornya. Hal tersebut akhirnya berhasil mencairkan hubungan antar gerakan mahasiswa yang ada di UGM, sehingga tidak masalah bagi mahasiswa untuk bergabung dan berdiskusi dengan gerakan mana saja. Meski kegiatan kaderisasi gerakan mahasiswa tetap dilakukan oleh gerakan mahasiswa ekstra-universitas, ketika sudah memasuki kampus, mereka kembali melakukan tutorial/tenteer mata kuliah bagi juniornya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa, Dema UGM sangat menerapkan benar sifat kekeluargaan dan gotong-royong dalam aktivismenya. Generasi awal Dema UGM telah berhasil memberikan contoh yang baik dalam memformulasikan gerakan mahasiswa di Indonesia.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

2.1.1.2 Sosok Koesnadi Hardjasoemantri

Pembentukan Dema UGM tidak bisa dilepaskan dari sosok Koesnadi Hardjasoemantri sebagai Ketua Badan Kerja pertama. Koesnadi adalah putra kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat dan tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Salah satu hal yang menarik dari sosok Koesnadi adalah kepribadiannya yang sangat *welcome* dan responsif kepada semua orang.¹⁷ Koesnadi adalah orang yang berusaha untuk tidak mengecewakan semua pihak. Selama bisa dan mampu, Koesnadi akan berusaha memberikan manfaat yang terbaik kepada orang lain, termasuk ketika dia dipercaya menjadi Rektor UGM pada 1986. Ketika itu, Koesnadi sangat pro dengan mahasiswa dan rakyat, bahkan pernah mengantarkan mahasiswa melakukan protes ke DPR RI.¹⁸

Terdapat dua hal yang menjadi dasar pemikiran Koesnadi. **Pertama**, Koesnadi sangat konsisten terhadap pemikirannya bahwa dunia kampus adalah dunia penalaran.¹⁹ Koesnadi mengatakan bahwa mahasiswa itu bukanlah “calon intelektual”, tetapi mahasiswa adalah “intelektual muda”.²⁰ Karena itu, Dema UGM sejatinya didirikan untuk membentuk suatu dewan yang dapat menghimpun kekuatan penalaran mahasiswa.

Kedua, Koesnadi menyadari betul bahwa UGM sebagai kampus perjuangan dan kampus kerakyatan, mengharuskan mahasiswanya untuk terjun langsung ke masyarakat.²¹ Karena itu, tidak hanya berfokus pada penalaran saja, Koesnadi dengan Dema-nya pun turut aktif menjadi garda terdepan dalam penyelesaian permasalahan bangsa.²² Gerakan yang dibentuk Dema tidak menjadi menara gading yang hanya memuaskan aktualisasi intelektualitas mahasiswa saja, tetapi Dema langsung memberikan kontribusi yang membumi

¹⁷ Wawancara dengan Prof. Haryana, di kediamannya di Komplek Perumahan Dosen Sekip UGM, pada 10 Oktober 2012. Beliau adalah aktivis mahasiswa UGM periode 1962-1969, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan era Rektor Koesnadi Hardjasoemantri, dan Ketua Senat Akademik UGM pertama.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Wawancara dengan Prof. Dr. Sutaryo, *Op.cit.*

²² Wawancara dengan Prof. Haryana, *Op.cit.*

kepada rakyat dengan tetap menjadikan penalaran sebagai basis gerakan.

2.1.2 Peran dan Metode Gerakan Dewan Mahasiswa UGM

Sepanjang tahun 1950-1962 dapat dikatakan sebagai periode keemasan hubungan Dema UGM dengan universitas dan juga pemerintah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam filosofi Dema UGM di awal, bahwa mahasiswa dan universitas merupakan satu “organisme” dalam berkontribusi bagi bangsa dan negara. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya keterlibatan Dema UGM dan Universitas dalam mengawal jatuh banggunya bangsa ini di awal era Presiden Soekarno.

Sepanjang tahun 1951-1954, Dema UGM memiliki peran yang sangat signifikan baik ke luar maupun ke dalam Universitas. Di antaranya yang paling fenomenal adalah adanya program Penempatan Tenaga Mahasiswa (PTM) yang bertujuan membantu pengajaran di sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar, juga melakukan pengabdian ke desa-desa baik di Jawa maupun di luar Jawa.²³ Tercatat, Dema menginisiasi penerjunan PTM sebanyak empat gelombang sepanjang periode awal tersebut.²⁴ Penerjunan langsung mahasiswa kepada masyarakat inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari Kuliah Kerja Nyata – Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat atau yang sering disingkat KKN-PPM. Dalam konteks dunia internasional, Dema UGM pun tercatat pernah mengadakan komunikasi dengan organisasi-organisasi mahasiswa luar negeri untuk mengetahui keadaan dan kemajuan mahasiswa di negeri lain.²⁵

Sedangkan untuk ke dalam universitas, Dema UGM aktif mengadvokasi masalah kesejahteraan mahasiswa. Dema aktif memantau asrama-asrama mahasiswa dan mengusahakan keperluan para mahasiswa, seperti melalui pengadaan diktat-diktat

²³ *Ibid.*

²⁴ Lihat “Laporan Tahunan Universitas Negeri Gadjah Mada Bagi Tahun Pengajaran 1953-1954” oleh Prof. Dr. M. Sardjito, diucapkan pada 19 September 1954.

²⁵ *Ibid.*

kuliah, menjual buku tulis yang lebih murah dari toko-toko pada umumnya, juga mengusahakan penjualan sepeda dengan jalan angsuran yang terjangkau bagi mahasiswa. Dema pun mengadakan taman bacaan (perpustakaan) dan menerbitkan majalah mahasiswa bernama Intra Gama Press. Program-program tersebut dijalankan dalam kondisi dana terbatas, meski tetap mendapatkan subsidi dari pihak universitas.²⁶ Dema UGM juga mengadakan hubungan dan kerjasama dengan tokoh-tokoh negara pada waktu itu, di antaranya adalah dengan Bung Hatta dalam rangka menyempurnakan pendidikan di Jurusan Ekonomi untuk menciptakan kader-kader pembangunan negara. Dema juga pernah melakukan hubungan dengan Menteri Luar Negeri untuk mendidik secara informal para mahasiswa di Jurusan Hubungan Internasional.²⁷

Dalam bidang kesenian dan olah raga, Dema aktif menggalang malam pentas seni yang berisikan tari-tarian daerah, kontes menyanyi, dan sandiwara dengan tema cerita “Asrama Mahasiswa”. Pagelaran seni itu dilakukan pada saat Dies Natalis Universitas dengan tujuan usaha amal dalam membantu para korban bencana Merapi. Dema juga memfasilitasi minta mahasiswa di bidang olahraga, meski lagi-lagi terbentur akan keterbatasan alat dan infrastruktur.²⁸

Setelah masa-masa awal tersebut, peran Dema UGM pun terlihat ketika terjadinya Perang Nasionalisasi Suez di Mesir. UGM mengirimkan perwakilan mahasiswa dari Dema dan Resimen Mahasiswa (Menwa) sebagai delegasi perdamaian ke Mesir.²⁹ Salah satu mahasiswa yang ditugaskan adalah Agus Supriyo.³⁰ Ini menunjukkan bahwa aktivisme mahasiswa yang menyatu dengan universitas tidak hanya memfokuskan kontribusinya di dalam negeri saja, tetapi juga sampai ke luar negeri.

Selain itu, kejadian pada 1958 juga patut dikaji, karena ketika itu Dewan Konstituante yang dibentuk untuk merumuskan asas negara

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Wawancara dengan Prof. Dr. Sutaryo, *Op.cit.*

³⁰ *Ibid.*

akhirnya mengalami kebuntuan setelah bersidang selama lebih dari tiga tahun. Akibat dari perpecahan di pihak internal, Konstituante pun akhirnya terancam bubar dan konstitusi negara masih berada dalam ketidakpastian.³¹ Ketika itu, negara ini memakai konstitusi sementara tahun 1950 dan masih bernama Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan menganut bentuk negara federalisme dan sistem pemerintahan parlementer. Ditambah lagi, Indonesia menganut sistem multi-partai yang sangat liberal.³² Hal tersebut sangat memperlemah posisi Bung Karno sebagai presiden. Terlebih di waktu yang bersamaan, Indonesia sedang dihadapkan pada konflik diplomasi dengan Belanda perihal perebutan Irian Barat.

Melihat hal tersebut, Dema UGM yang diketuai Mahaga sebagai pemimpin generasi kedua Dema, bersatu dengan para dosen untuk menekan pemerintahan Bung Karno kembali pada asas Pancasila dan UUD 1945.³³ Dema UGM mengadakan Seminar Terbuka yang bertemakan “Kembali ke UUD ’45 dan *Follow-up-nya*” pada bulan April 1959 di kampus Yogyakarta dengan menghadirkan Presiden Soekarno sendiri sebagai pembicara.³⁴ Hal serupa dilakukan Keluarga Alumni Gajah Mada (KAGAMA) dengan diadakannya diskusi publik bertema serupa tepat sebulan sebelumnya.³⁵ Bahkan dari sisi militer, tekanan politik serupa pun dilakukan oleh Angkatan Darat kepada Presiden Soekarno untuk menghindari disintegrasi bangsa (Valdano, 2011: 54). Situasi politik dalam negeri ketika itu cukup genting, dikarenakan terdapat banyak pemberontakan di beberapa daerah dan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno.³⁶

³¹ Wawancara dengan Prof. Dr. Sutaryo, *Op.cit.*

³² Diterapkannya sistem pemerintahan parlementer dan sistem multi-partai disebabkan adanya Maklumat negara no. X pada 16 Oktober 1945 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Isi dari Maklumat tersebut di antaranya adalah bahwa pemerintah memberikan kekuasaan dan wewenang kepada legislatif untuk merumuskan GBHN. Kemudian, hal ini disusul dengan keluarnya Maklumat politik pemerintah I pada 1 November 1945 yang berisikan tentang pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik. Keputusan tersebut dilakukan Hatta secara sepihak dan memperkuat posisi Sutan Syahrir yang menjadi Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (Slametmuljana, *Op.cit.*)

³³ Wawancara dengan Suwarni, *Op.cit.*

³⁴ Lihat Soekarno, *Op.cit.*

³⁵ Wawancara dengan Suwarni, *Op.cit.*

³⁶ Juga dijelaskan bahwa beberapa pemberontakan dan percobaan pembunuhan terhadap Soekarno

Oleh karena itu, kaum intelektual, militer, serta rakyat sudah terkonsolidasi dengan baik oleh Bung Karno. Tercatat pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisikan pembubaran Konstituante dan kembalinya konstitusi negara kepada UUD 1945. Dengan Dekrit Presiden itu, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensial, setelah sebelumnya Presiden Soekarno memperkenalkan konsep Demokrasi Terpimpin

Selanjutnya memasuki tahun 1960-an, konflik Indonesia dengan Belanda perihal Irian Barat³⁷ semakin memuncak. Janji penyerahan Irian Barat yang disepakati di Konferensi Meja Bundar pada 1949 akhirnya sama sekali tidak digubris oleh Belanda. Usaha-usaha diplomasi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selalu tidak membuahkan hasil. Pembahasan mengenai persengketaan Irian Barat di Sidang Umum PBB yang pertama kali diangkat tahun 1954, dan terus dibahas di sidang berikutnya pada 1955, 1956, dan 1957 selalu mengalami kebuntuan akibat Indonesia gagal memenangkan opini dari Majelis PBB (Atmadji Sumarkidjo, 2010, dalam Ferry Valdano, 2011: 51). Menurut Prof. Dr. Sutaryo, Belanda ketika itu mengetahui potensi kekayaan sumber daya alam yang ada di bumi Papua. Bahkan data bumi Papua telah diserahkan Belanda kepada Amerika Serikat.³⁸

Setelah diperkenalkannya konsepsi Demokrasi Terpimpin pada 1957 dan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 1959, Presiden Soekarno mengalihkan politik luar negeri Indonesia yang tadinya hanya berkonflik dalam persidangan dan diplomasi menjadi konfrontasi fisik dengan pendekatan kekuatan militer. Presiden Soekarno memperkuat militer Indonesia dengan memanfaatkan

tersebut didalangi oleh pihak-pihak yang anti-komunis. Salah satunya adalah percobaan pembunuhan Soekarno pada tanggal 30 November 1957 yang menurut buku karya Mangil, Kolonel Zulkifli Lubis yang bekas wakil KSAD terlibat dengan kelompok tersebut (Seri Buku Tempo: Bapak Bangsa, 2010: 23).

³⁷ Presiden Soekarno mengganti dan menyebut istilah "Papua" menjadi "Irian" sebagai akronim dari "Ikut Republik Indonesia Anti Nederland".

³⁸ Wawancara dengan Prof. Dr. Sutaryo, *Op.cit.*

momentum Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ketika itu (Valdano, 2011: 63). Amerika Serikat yang sedang berada pengaruh di dunia ketiga, termasuk Indonesia, merasa tidak nyaman untuk memberikan dukungannya kepada Belanda yang jelas-jelas sekutunya sehingga Amerika Serikat lebih berpihak pada Indonesia dalam persidangan di PBB, dan Uni Soviet membantu Indonesia dalam bidang militer.³⁹

Posisi tawar Indonesia ketika itu sangat kuat di mata internasional. Hal tersebut dikarenakan Presiden Soekarno berhasil melakukan konsolidasi negara-negara berkembang di Asia dan Afrika yang notabene terdiri dari mayoritas negara postkolonial dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955. Konferensi itu memperkuat posisi Indonesia dari segi kedaulatan di luar negeri. Setelah itu, Presiden Soekarno berhasil mempersatukan semua elemen bangsa untuk melawan Belanda sebagai bentuk kedaulatan di dalam negeri.

Di akhir perebutan Irian Barat tersebut, Dema UGM bersatu dengan dosen dan Universitas untuk bergabung dengan Republik dalam perebutan Irian Barat.⁴⁰ Universitas menginisiasi pengiriman tenaga mahasiswa untuk membantu pemerintah dalam operasi perebutan Irian Barat, di antaranya ada yang dikirim sebagai tim perdamaian dengan menyelenggarakan pagelaran seni di latihan Komandan KOMPI di Magelang dan ke Irian Barat.⁴¹

Memasuki tahun 1962, Dema memelopori berdirinya BKMJ (Badan Kesedjahteraan Mahasiswa Jogjakarta) yang aktif menyelenggarakan beras bagi mahasiswa, mendirikan Poliklinik Mahasiswa UGM, dan ikut mengambil bagian dalam Jajanan Kesehatan Mahasiswa.⁴² Dema juga mengadakan Festival Band antar Perguruan Tinggi se-Yogyakarta dan konser amal untuk fakir miskin. Dalam bidang olahraga, pada tahun itu 18 cabang olahraga telah diaktifkan. Beberapa mahasiswa UGM menduduki

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Lihat "Laporan Tahunan Universitas Gadjah Mada Bagi Tahun Pengajaran 1962/1963" oleh Prof. Ir. H. Johannes selaku Rektor, diucapkan pada 19 September 1963.

⁴² *Ibid.*

kejuaraan daerah dan nasional, seperti sepak bola, bola basket, tenis dan bulu tangkis.⁴³

Berdasarkan pemaparan peran-peran yang dilakukan oleh Dema UGM tersebut dapat terlihat bahwa, sejak didirikannya Dema UGM pada 1950 hingga 1962, Dema UGM selalu bergerak menyatu dengan dosen dan universitas, dan juga mendukung pemerintahan Presiden Soekarno. Dema UGM tidak hanya mengerahkan semua kekuatan penalaran mahasiswa untuk berkontribusi bagi rakyat, tetapi juga secara langsung melancarkan tekanan-tekanan politiknya demi mendukung pemerintah dalam setiap pengambilan kebijakan. Tekanan-tekanan politik itu dilakukan dengan cara yang masih terbilang persuasif, seperti melalui pengadaan agenda pemberdayaan masyarakat sebagai alternatif pembangunan yang tidak *state centris*, pengiriman delegasi, dan penyelenggaraan seminar.

2.1.3 Ideologi Gerakan Mahasiswa UGM

Pada periode keemasan tersebut, terdapat tiga gerakan mahasiswa yang menguat dalam Dema UGM, yaitu: GMNI yang berhaluan Marhaenisme⁴⁴, HMI yang berhaluan Islam, dan CGMI yang berhaluan Komunisme.⁴⁵ Gemos yang berhaluan Sosialisme-Demokrasi tidak terlalu kuat di UGM. Ketika itu hubungan antar gerakan mahasiswa di awal dekade 1950-an masih rukun dan damai, gerakan mereka lebih berbasiskan pada tutorial-tutorial mata kuliah di kampus.⁴⁶ Dalam membantu pemetaan ideologi gerakan mahasiswa tersebut, maka perlu untuk dikaji lebih lanjut mengenai sejarah, filosofi, dan pengaruh gerakannya.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Hampir semua narasumber yang notabene adalah alumni aktivis GMNI menyebutkan bahwa gerakannya berhaluan Nasionalisme. Padahal GMNI secara formal dalam pembentukannya menyatakan gerakannya berideologi Marhaenisme. Menurut Bambang Praswanto, di era Orde Baru pengaruh Soekarnoisme-Marhaenisme yang dijadikan asas dalam semangat Nasionalisme Bung Karno tersebut tidak lagi begitu kuat. Hal tersebut dikarenakan lebih dominannya pemikiran Nasionalisme dan ke-Jogja-an dalam gerakan mahasiswa di UGM.

⁴⁵ Wawancara dengan Prof. Dr. Sutaryo, *Op.cit.*

⁴⁶ Wawancara dengan Prof. Ichlasul Amal, di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UGM, pada 10 oktober 2012. Beliau adalah aktivis mahasiswa tahun 1964 dan Rektor UGM tahun 1997.

2.1.3.1 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)

Sebagai gerakan mahasiswa yang berhaluan nasionalis-sekularis, GMNI didirikan pada 1954 di Surabaya. GMNI merupakan fusi dari tiga organisasi mahasiswa nasionalis yang telah ada sebelumnya, yaitu Gerakan Mahasiswa Marhaenis yang berpusat di Yogyakarta, Gerakan Mahasiswa Merdeka yang berpusat di Surabaya, dan Gerakan Mahasiswa Demokrat yang berpusat di Jakarta (Agung Baskoro, 2011: 43). GMNI secara formal berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan jumlah anggotanya pada awal tahun 1960-an sebanyak 77.000 orang (Seri Buku Tempo: Soekarno, 2010: 55; Maxwell, 1997: 118, dalam Yudi Latif, 2005: 438). Sebagai gerakan nasionalis yang berasaskan Marhaenisme, GMNI tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Bung Karno.

2.1.3.2 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Pendirian HMI sejatinya lebih diinspirasi oleh beberapa pemimpin Islam modernis seperti H. Agus Salim dan rekanannya, dengan didahului ide pembentukan Jong Islamieten Bond (JIB). Tujuan pendiriannya adalah untuk menciptakan intelegensia muslim yang memiliki keseimbangan antara penguasaan keilmuan umum dengan nilai-nilai Islam (Tanja, 1982: 51-520, dalam Yudi Latif, 2005: 425). Atas prakarsa Lafran Pane dan beberapa mahasiswa Sekolah Tinggi Islam⁴⁷, HMI didirikan pada 5 Februari 1947 di Yogyakarta.

Dalam gerakannya, HMI meniru JIB dengan melakukan Islamisasi kaum terpelajar melalui modernisasi institusi-institusi Islam. Yudi Latif, berpendapat dalam bukunya “Intelegensia Muslim dan Kuasa” bahwa sekalipun HMI terinspirasi oleh pendirian JIB, generasi Pane yang berada dalam HMI cenderung lebih nasionalistis (Yudi Latif, 2005: 426). HMI ingin menunjukkan bahwa nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan tidak berbenturan dengan nilai-nilai Islam. Bahkan, Yudi menambahkan bahwa para pemimpin awal HMI menerima konsepsi Pancasila dan memiliki kedekatan hubungan dengan Bung Karno. Secara formal, HMI memang tidak

⁴⁷ Sekarang berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

memiliki hubungan struktural dengan partai politik manapun, termasuk dengan Masyumi. Namun pada ranah pemikiran, aktivis-aktivis HMI memiliki pandangan yang sama dengan muslim reformis-modernis di Masyumi. Sekalipun begitu, HMI tetap berusaha tampil netral dengan berusaha mengakomodasi muslim tradisional.

Namun, semua itu berubah ketika memasuki akhir dekade 1950-an, terdapat serangan politik yang cukup keras dari kubu Nasionalis dan Komunis terhadap kubu Islamis. Hal tersebut akhirnya berdampak pada adanya radikalisasi ideologi di dalam tubuh HMI. Pada kongres HMI di Medan tanggal 24-31 Desember 1957, HMI memutuskan untuk mendukung Islam politik dengan menjadikan Islam sebagai dasar negara Republik Indonesia (Yudi Latif, 2005: 429).

2.1.3.3 Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI)

Sebagai organisasi *onderbouw* dari PKI, CGMI didirikan pada 1956. CGMI merupakan gabungan dari tiga organisasi mahasiswa lokal di Bandung, Bogor, dan Yogyakarta yang mengklaim bahwa mereka memiliki anggota sejumlah 35.000 orang pada tahun 1964-1965. Namun, sebaran anggotanya sangat sedikit di Jakarta, dan sangat sedikit lagi yang berkuliah di UI. Sebaran terbanyak anggotanya berada di kampus-kampus swasta Yogyakarta dan Solo, yang mayoritas mahasiswanya tidak memiliki status sosial mapan (Yudi Latif, 2005: 439).

Sebagaimana diketahui bersama bahwa asas dari CGMI adalah paham Marxisme-Leninisme yang berakar pada ajaran Komunisme. Kisah penyebaran paham Komunisme mula-mula dibawa oleh Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet dengan mendirikan *Indische Sociaal Democratische Vereniging* (ISDV) pada 9 Mei 1914. Pergerakan itu pada awalnya hendak memperkenalkan sosialisme dan tidak memasuki ranah politik. Namun lantaran perhimpunan tersebut semakin terlibat dalam politik lokal, maka pengaruh ke ranah politik mulai diperlebar. Pengembaraan ISDV untuk

menanamkan pengaruh akhirnya menemukan hasil ketika mereka mulai melirik gerakan Sarikat Islam (SI), melalui rumah indeks HOS Tjokroaminoto di Surabaya. Di sana mereka bertemu dengan Alimin, Musso, Soekarno, dan Kartosoewirjo. Rumah indeks tersebut itu menjadi sangat strategis karena juga dijadikan kantor SI. Sneevliet dan Adolf Baars beserta aktivis ISDV lain seperti Semaun dan Darsono akhirnya sering hadir ke indeks tersebut untuk berdiskusi (Seri Buku Tempo: Tan Malaka, 2010: 58).

ISDV akhirnya berganti nama menjadi Partai Komunis Hindia pada 23 Mei 1920 dan langsung berkiblat pada Komunis Internasional (Komintern) di Rusia. Hal tersebut dikarenakan pada Oktober 1917, terjadi Revolusi Bolshevik di Rusia yang berujung pada pembentukan pemerintahan Komunis Rusia di bawah pimpinan Vladimir Lenin (Slametmuljana, 1969: 9). Partai Komunis Hindia inilah yang menjadi cikal bakal PKI.

Pada 1921, SI dibawah pengaruh H. Agus Salim dan Abdul Moeis melakukan disiplin organisasi, sehingga mereka yang terindikasi komunis harus dikeluarkan dari SI (Poespoprodjo, 1984: 59). PKI terlibat dalam berbagai pemberontakan baik kepada Pemerintah Kolonial, maupun kepada Republik Indonesia setelah kemerdekaan, kendati pemberontakan tersebut dipertentangkan oleh pihak internal PKI sendiri.

2.1.3.4 Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos)

Di antara beberapa gerakan mahasiswa ekstra-universitas, Gemsos merupakan gerakan yang kurang populer dan tidak cukup menguat di UGM. Namun sebaliknya menurut Yudi (2005: 439), gerakan ini justru sangat berpengaruh dan memiliki basis kader di UI dan ITB. Berawal dari adanya sekumpulan mahasiswa yang pernah tergabung dalam Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo, didirikan pada 1945), yang kemudian membentuk Gemsos pada 1955 (Yudi Latif, 2005).

Pemikiran yang dibawa berakar dari ajaran Sosialisme-Demokrat yang dibawa Sutan Sjahrir sebagai pendiri Partai Sosialis Indonesia

(PSI). Dalam corak pergerakannya, Gemos dan PSI meyakini bahwa persatuan yang sebagaimana Bung Karno dengung-dengungkan bukanlah merupakan suatu tujuan, melainkan persatuan hanyalah merupakan suatu strategi dan taktik. Persatuan yang dimaksud adalah yang terdapat dalam tubuh partai politik (Sjahrir, 1947: 22). Oleh karena itu, pemikiran Sjahrir sangat bertentangan dengan pemikiran Bung Karno yang meyakini bahwa semua golongan dan ideologi harus bersatu, salah satunya adalah melalui konsep Nasakom. Gerakan sosialis-demokrat lebih menekankan pada keteguhan internal organisasi dengan gerakan berbasis kader (Sjahrir, 1947: 57, 58).

2.1.3.5 Pemetaan Ideologi

Peran Dema UGM sebagai kelompok penekan pada periode keemasannya (1950-1962), bahkan dari tahun-tahun sebelumnya, melibatkan penerapan ideologi Pancasila yang telah menjadi asas UGM. Gerakan mahasiswa menjadi suatu kesatuan aktivisme dengan Universitas yang dituangkan dalam sikap gotong-royong dan kekeluargaan, dengan melakukan pembelaan dan pemberdayaan terhadap kaum Marhaen, serta menumbuhkan rasa Sosio-nasionalisme dalam kegiatannya. Terkait hal persatuan gerak sebagaimana Bung Karno gariskan dalam gagasan Nasakom, pada periode tersebut Dema UGM bergerak harmonis antar gerakan mahasiswa ekstra-universitas, meski di kemudian waktu kondisi cukup memanas.

Menurut Prof. Haryana, sejak awal didirikannya, Dema UGM lebih didominasi oleh aktivis-aktivis GMNI.⁴⁸ Di tingkat Universitas bisa dikatakan “merahnya” termasuk kuat, sekalipun ada beberapa Kodema Fakultas yang “hijaunya” kuat.⁴⁹ Melihat dominannya aktivis GMNI dalam Dema UGM pada periode tersebut, maka sangat wajar jika ideologi Marhaenisme dan Pancasila demikian diterapkannya dalam aktivisme mahasiswa. Terlebih ketika itu,

⁴⁸ Wawancara dengan Prof. Haryana, *Op.cit.*

⁴⁹ Penggunaan istilah “merah” kerap ditujukan pada gerakan mahasiswa nasionalis, sedangkan istilah “hijau” ditujukan pada gerakan mahasiswa Islamis.

terdapat sosok Koesnadi Hardjasoemantri yang memahami filosofi ke-UGM-an.

Dalam konteks politik nasional, hubungan Dema UGM dengan pemerintahan Soekarno sangat erat. Hal tersebut dikarenakan adanya kesamaan ideologis maupun politis antara gerakan mahasiswa di UGM dengan pemerintahan ketika itu. Bung Karno sebagai Bapak Marhaenisme dan penggagas Pancasila sangat dicintai oleh sivitas akademika UGM.⁵⁰ Oleh karena itu, hubungan Universitas dengan Pemerintah adalah “menunggu perintah”, terutama bagi aktivis Nasionalis.⁵¹

Menurut pemetaan ideologi gerakan mahasiswa oleh Arbi Sanit, GMNI dengan ideologi Marhaenisme dan CGMI dengan ideologi Komunisme termasuk dalam kategori ideologi yang diperjuangkan secara ketat dan sistematis. Sedangkan HMI dengan ideologi Islam (yang pada akhirnya cenderung pada Islam reformis-modernis) dan Gemos yang berideologi Sosialisme-Demokrasi termasuk dalam ideologi yang terjadi secara alamiah.

Sementara itu menurut pemetaan ideologi oleh Uhlin, GMNI termasuk dalam wacana Radikal dan Konservatif, HMI termasuk dalam wacana Demokrasi, CGMI termasuk dalam wacana Radikal, dan Gemos termasuk dalam kelompok Liberal. Hal tersebut jika menggunakan analisis Uhlin, GMNI yang berasaskan Marhaenisme membawa wacana Radikal dengan mengadaptasi Marxisme ke dalam alam Indonesia. Hal tersebut terlihat dengan dijadikannya Sosio-nasionalisme yang meperjuangkan kaum Marhaen sebagai dasar perjuangan dan menjadikan neo-kolonialisme dan imperialisme sebagai musuh bangsa yang nyata. Gerakan ini pun masuk ke dalam wacana Konservatif dikarenakan gerakan ini meletakkan norma UUD 1945 dengan tidak berkompromi terhadap segala perubahan pada asas Sosio-demokrasi. CGMI pun masuk ke dalam wacana Radikal, hal tersebut sudah sangat jelas karena ideologi Marxisme-Leninis yang dibawanya.

⁵⁰ Wawancara dengan Prof. Haryana, *Op.cit.*

⁵¹ *Ibid.*

HMI yang condong kepada pemikiran Islam reformis-modernis cenderung menerima iklim demokrasi, terutama setelah munculnya penolakan terhadap konsep Demokrasi Terpimpin. Sehingga gerakan Islam yang termanifestasikan dalam HMI dapat digolongkan ke dalam wacana Demokrasi. Sedangkan Gemsos yang beridologi Sosialisme-Demokrat termasuk ke dalam kelompok Liberal, dengan memosisikan diri sebagai gerakan yang menolak pengaruh Komunis dan mendukung pengaruh positif dari perkembangan kapitalisme di Indonesia. Gemsos pun memperjuangkan politik liberal dan anti partai pelopor.

2.2 Konflik Politik Internasional (1962-1966)

Berdasarkan pada penjelasan Prof. Ichlasul Amal, kondisi politik gerakan mahasiswa yang tadinya harmonis pada akhirnya memanas, terutama setelah tahun 1962.⁵² Hal tersebut adalah dampak dari memanasnya situasi politik di tingkat nasional. Terdapat beberapa peristiwa yang menjadi penyebab tingginya aktivitas politik dalam periode ini, di antaranya adalah pengunduran diri Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 1956, mandeknya Konstituante yang berakhir dengan adanya Dekrit Presiden tahun 1959, dan terutama dibubarkannya Masyumi dan PSI melalui Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1960 pada 15 Agustus. Pembubaran Masyumi dan PSI tersebut karena dicurigai terlibat dalam pemberontakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (Seri Buku Tempo: Sjahrir, 2010: 179).

Setelah Bung Karno kembali dapat mempersatukan semua elemen bangsa ini untuk melawan nekolim (neo-kolonialisme dan imperialisme) dan merebut kembali Irian Barat hingga tahun 1962, Bung Karno lebih banyak melakukan manuver dalam percaturan politik internasional. Namun, gebrakan dari Bung Karno ini banyak menuai pertentangan, terutama dari rival-rival politiknya yang merasa teralienasi dalam politik nasional sebelumnya. Hal tersebut diperburuk dengan adanya intervensi *outsiders* yang memecah

⁵² Wawancara dengan Prof. Ichlasul Amal, *Op.cit.*

belah persatuan dan kesatuan bangsa, hingga berujung pada digulingkannya Bung Karno pada 1966.

2.2.1 Gebrakan Bung Karno

Kedaulatan Republik Indonesia ketika itu sudah sangat mengkhawatirkan negara-negara adidaya di dunia. Bagaimana tidak, Bung Karno pada 1955 berhasil menginisiasi Konferensi Asia-Afrika yang dihadiri lebih dari 25 negara. Konferensi ini diselenggarakan dalam rangka mengumandangkan semangat anti neo-kolonialisme dan imperialisme, baik terhadap kekuatan Amerika Serikat, Uni Soviet, maupun negara-negara lainnya. Akhirnya konferensi ini menjadi cikal bakal terbentuknya Gerakan Non-Blok pada 1961 yang diinisiasi beberapa pemimpin Asia-Afrika, termasuk Bung Karno di dalamnya.⁵³

Salah satu bentuk ketakutan negara adidaya tersebut adalah adanya sabotase terhadap salah satu delegasi Konferensi Asia-Afrika dari Tionghoa yang diledakkan di udara oleh Amerika Serikat. Ketika itu tim dari UGM diturunkan untuk melakukan operasi terhadap serpihan-serpihan pesawat delegasi Tionghoa tersebut.⁵⁴ Ini menunjukkan bahwa rivalitas Tionghoa dengan Amerika Serikat sudah terjadi sedari dulu.

Gerakan Non-Blok (biasa disingkat GNB) yang menyatakan dirinya tidak memihak baik kepada kubu Washington maupun Moskow, memiliki posisi tawar yang sangat kuat dalam politik internasional. GNB dapat menghimpun negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Mulanya anggota GNB hanya belasan, hingga akhirnya menyusul lebih dari seratus negara. Bahkan, grup komunis Quba pun ikut masuk ke GNB. Kekuatan GNB pada waktu itu membuat negara adidaya tidak memiliki pilihan lain selain menggulingkan Bung Karno.⁵⁵

⁵³ Wawancara dengan Prof. Dr. Sutaryo, *Op.cit.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

Dari segi politik, Bung Karno telah dianggap menyaingi kekuatan Amerika Serikat dan Uni Soviet pada waktu itu. Dari segi ekonomi, Bung Karno telah tiga kali menolak permintaan AS untuk mengelola kekayaan Papua. Hal tersebut diminta AS sebagai bentuk politik “balas budi” atas jasa AS yang telah “membantu” Indonesia secara diplomatis di PBB perihal sengketa Irian Barat. Namun, Bung Karno telah mengetahui bahwa motif sebenarnya dari bantuan AS adalah untuk mendukung kekayaan yang dimiliki Irian Barat setelahnya, karena itu Bung Karno menolak penawaran.⁵⁶ Lagi-lagi, hal tersebut memaksa negara adidaya untuk menggulingkan Bung Karno dari jabatannya.

Memasuki tahun 1963, Bung Karno menyatakan “Ganyang Malaysia!” sebagai bentuk persetujuan antara Indonesia dengan Malaysia.⁵⁷ Wacana pembentukan Negara Federasi Malaysia dianggap oleh Bung Karno telah melanggar Persetujuan Manila (*Manila Accord*) dan menjadi negara boneka Inggris yang dapat mengancam keamanan dan kedaulatan Indonesia. Inggris, Australia, dan Selandia Baru pun terbukti turut serta dalam konflik tersebut dengan memberikan bantuan militer kepada Malaysia. Konflik Indonesia-Malaysia itu terus memanas yang berujung pada konflik militer hingga tahun 1965. Tepat di tahun tersebut, Bung Karno akhirnya menarik Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Hal itu dikarenakan PBB telah menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Bung Karno mendirikan kekuatan tandingan dari PBB yang dikenal dengan sebutan *Conference of the New Emerging Forces* (CONEFO). Bahkan untuk menyaingi Olimpiade Internasional pada waktu itu, Bung Karno mendirikan *Games of the New Emerging Forces* (GONEFO).⁵⁸

Akibat dari manuver politik yang diambil itulah akhirnya Bung Karno memiliki kelemahan dalam bidang ekonomi sehingga pada waktu itu Indonesia mengalami *hyper inflation*.⁵⁹ Tipikal Bung

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Wawancara dengan Prof. Ichlasul Amal, *Op.cit.*

⁵⁸ Wawancara dengan Prof. Haryana, *Op.cit.*

⁵⁹ Wawancara dengan Prof. Dr. Sutaryo, *Op.cit.*

Karno, ia adalah pemimpin yang berusaha mendidik rakyatnya untuk bisa “berdiri di atas kaki sendiri” atau sering disingkat “*berdikari*” dan memiliki semangat nasionalisme yang kuat.⁶⁰ Karena itu, Bung Karno lebih mementingkan urusan politik ketimbang urusan ekonomi. Hal inilah yang paling dikritisi Hatta dalam tulisannya yang berjudul “Demokrasi Kita”.

Menurut Prof. Dr. Sutaryo, teori perjuangan Bung Karno mengenai persatuan bangsa sebenarnya efektif. Selama bangsa ini solid dan bersatu maka tidak akan mudah untuk dijatuhkan. Namun, ketika ada unsur di dalam yang pecah, dan terlebih adanya pengaruh dari pihak luar, maka dipastikan bangsa ini akan jatuh.⁶¹ Meski bangsa ini dikatakan negara yang baru merdeka dengan perekonomian yang masih lemah, dengan berdasar pada ajaran persatuan dari Bung Karno, maka bangsa ini akan bertahan untuk melawan serangan-serangan nekolim.

2.2.2 “Gerakan Oposisi” terhadap Bung Karno

Menanggapi gebrakan politik yang dilakukan Bung Karno tersebut, bermunculanlah gerakan-gerakan oposisi terhadap pemerintah. Pada periode 1962 hingga 1965, gerakan mahasiswa mulai dipolitisir untuk menjatuhkan Presiden Soekarno.⁶² Dalam teori revolusi, gerakan mahasiswa itu tidak akan berhasil kecuali didukung oleh angkatan bersenjata dan gerakan rakyat. Karena itu, gerakan mahasiswa murni selalu mengalami kegagalan, sebagai contoh: gerakan Malapetaka 11 Januari atau yang biasa disebut “Malari” pada 1974 yang diinisiasi oleh gerakan mahasiswa dan segelintir sokongan militer.⁶³

⁶⁰ Wawancara dengan Prof. Haryana, *Op.cit.*

⁶¹ Wawancara dengan Prof. Dr. Sutaryo, *Op.cit.*

⁶² *Ibid.* Tambah beliau, pola politisasi gerakan mahasiswa ini diulang kembali ketika penggulingan Presiden Soeharto di tahun 1998. Jadi jika ada yang berminat menjatuhkan Presiden, dipastikan dia akan mendekati gerakan mahasiswa.

⁶³ Oleh karena itulah, Bung Karno sering mengingatkan gerakan mahasiswa agar tidak melakukan *steriliteit* gerakan. Yaitu menjauhkan dirinya dari kaum marhaen yang dibelanya. Gerakan mahasiswa harus menyatu dengan massa-aksi atau gerakan rakyat (Soekarno dalam sambutannya pada Konferensi Besar GMNI di Kaliurang, Yogyakarta, 17 Februari 1959, dalam Bung Karno dan partai Politik, 2001: 80).

Bahkan sebelumnya, terdapat usaha-usaha mempolitisir gerakan rakyat dalam bentuk pemberontakan terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Gerakan separatisme yang menguat pada 1958, seperti yang dipimpin oleh Samuel dan Husein, itu tidak bisa dilepaskan dari peran *Central Intelligence Agency* (CIA) dari Amerika Serikat. Kasus yang paling fenomenal adalah penembakan pesawat intelijen AS U-2 dengan mata-mata Allan Pope. Termasuk pemberontakan Darul Islam – Tentara Islam Indonesia (DI-TII) yang dipelopori Kartosoewirjo (teman satu kontrakan Soekarno ketika di Surabaya), dan juga hadirnya tokoh ekonom Soemitro Djojohadikoesoemo dengan PSI-nya itu yang juga didukung AS. Pada akhirnya, turunan dari Soemitro *cs* itu menjadi kelompok ekonom-ekonom Berkeley, atau sering disebut sebagai “Mafia Berkeley”.⁶⁴ Usaha-usaha intervensi asing ini ditujukan untuk memecah belah bangsa kita, sehingga persatuan bangsa sebagaimana ajaran Bung Karno tidak tercapai.

Pada waktu itu, pihak yang paling rentan untuk disusupi adalah gerakan mahasiswa dan tentara, sedangkan gerakan massa rakyat masih sangat sulit. Hal tersebut dikarenakan masih kuatnya kecintaan rakyat (baik yang agamis, komunis, terutama yang nasionalis) kepada Bung Karno. Akhirnya, hanya gerakan mahasiswa dan militerlah yang bisa dipolitisir untuk menjatuhkan Bung Karno.⁶⁵

Menurut Prof Sutaryo, setidaknya ada empat cikal bakal kekuatan oposisi kepada Bung Karno: *Pertama*, dibentuknya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada 1965. Juga dibentuk Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI) untuk mengorganisir pelajar, dan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) untuk alumni universitas. Gerakan tersebut disokong oleh kekuatan Militer dan didanai oleh Amerika Serikat.⁶⁶ KAMI adalah gerakan mahasiswa anti-komunis dan bertujuan untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Gerakan mahasiswa yang tercatat masuk ke dalam KAMI adalah HMI,

⁶⁴ Wawancara dengan Prof. Dr. Sutaryo, *Op.cit.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

Gemsos, PMKRI, GMKI, dan PMII. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa KAMI lebih didukung oleh gerakan mahasiswa Agamis dan Sosialis-Demokrat.

Kedua, adanya rivalitas Bung Karno dengan Masyumi dan PSI. Setelah Konstituante dibubarkan dengan adanya Dekrit Presiden 1959, hubungan kubu Islamis dan Sosialis-Demokrat dengan Bung Karno semakin memanas. Terlebih lagi ketika Masyumi dan PSI dibubarkan pada 1960. Tokoh Masyumi seperti Mohammad Natsir dan tokoh PSI seperti Sutan Sjahrir ditangkap dan dipenjara. Secara ideologis, ketika itu Masyumi ingin mendirikan asas Islam di Indonesia, dan AS menjanjikan akan hal itu.⁶⁷ Sedangkan kubu PSI memang sedari awal kemerdekaan tidak memiliki kesamaan ideologis dengan Bung Karno.

Ketiga, retaknya hubungan antara Soekarno dan Hatta. Di antara peristiwa yang paling penting adalah retaknya hubungan Presiden Soekarno dengan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang berujung pada pengunduran diri Hatta pada 1956 (Seri Buku Tempo: Hatta, 2010: 96). Terdapat perbedaan konsepsi demokrasi politik antara Bung Karno dan Bung Hatta. Perbedaan tersebut dimulai ketika Maklumat Nomor X November 1945 yang dikeluarkan Bung Hatta secara sepihak yang berisikan isyarat diterapkannya sistem multi-partai. Sedangkan dalam konsep sistem kepartaian, Bung Karno memiliki konsepsi Partai Pelopor dengan dibentuknya suatu partai besar nasional untuk melakukan pembangunan negara.⁶⁸ Partai-partai kecil lain diperbolehkan eksis, tetapi bersifat oposisi terhadap negara. Teori ini yang dipakai oleh Lee Kuan Yew di Singapura dan Mahathir Mohamad di Malaysia dengan *United Malays National Organisation* (UMNO).

Setelah keluar dari Istana, Bung Hatta adalah orang yang paling keras dalam melancarkan kritik kepada Bung Karno. Bung Hatta sangat menolak pemusatan kekuasaan di tangan Bung Karno yang menerapkan Demokrasi Terpimpin dan menjadikannya

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

presiden seumur hidup. Bung Hatta menganggap Bung Karno telah mencederai cita-cita kemerdekaan dan nilai-nilai demokrasi, sehingga ia menyebut Bung Karno sebagai neo-feodalis dan diktator militer (Seri Buku Tempo: Hatta, 2010: 97). Bahkan Bung Karno pernah melakukan pemberedelan terhadap tulisan-tulisan Bung Hatta di media massa. Bung Hatta pernah dilarang memberi kuliah di Universitas Gadjah Mada, yang memang tempatnya semula mengajar (Seri Buku Tempo: Hatta, 2010: 145). Bung Hatta dianggap lebih terpengaruh ideologi liberalisme dalam hal politik. Hal tersebut menjadi wajar, mengingat latar belakang Bung Hatta yang dibesarkan dalam alam pendidikan Barat. Namun, sekalipun keduanya memiliki konsepsi yang berbeda tentang demokrasi politik, mereka tetap memiliki kesamaan pandangan dalam demokrasi ekonomi.⁶⁹

Yang menjadi menarik adalah, meski ideologi mereka berbeda, Bung Karno dan Bung Hatta tetap memiliki hubungan yang dekat secara pribadi. Hal tersebut terbukti dengan sikap Bung Karno yang tidak mau memproklamasikan kemerdekaan tanpa Bung Hatta, mencarikan istri untuk Bung Hatta, dan menjadikan Bung Hatta sebagai wali nikah putranya. Ideologi mereka berbeda, namun tetap dekat secara personal.

Dalam hal demokrasi politik, Bung Karno memiliki konsep “Demokrasi Terpimpin”. Konsep tersebut berawal dari seorang Theosof, R. M. Soetatmo Soerjokoesoemo⁷⁰, yang merupakan anggota dari Volksraad tahun 1919, keluarga Pakualaman, dan juga Ketua Majelis Luhur Taman Siswa pertama.⁷¹ Dari Soerjokoesoemo, ajaran tersebut diturunkan kepada Soewardi Soerjaningrat atau sering dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, dan kemudian

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ R. M. Soetatmo Soerjokoesoemo adalah anggota dari diskusi rutin pada Selasa Kliwon yang dipimpin oleh Soerjamentaram alias Ki Ageng Soerjamentaram yang merupakan nama lain dari Bendara Raden Mas Kudiarmadji, putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Pengembaraan batin Ki Ageng Soerjamentaram sangat luas dengan masuknya ia ke dalam Gerakan Theosofi (kebatinan). Karya terbesarnya adalah membuat konsep kebahagiaan yang ia sebut sebagai *Kawruh Begia*. Diskusi rutin Selasa Kliwon itulah yang menjadi cikal bakal dari dibentuknya Taman Siswa (Artawijaya, 2010: 202).

⁷¹ Wawancara dengan Prof. Dr. Sutaryo, *Op.cit.*

diteruskan kepada Bung Karno.⁷² Secara substansi, ajaran tersebut memiliki pemikiran sebagai berikut⁷³:

1. Mengkritisi konsep demokrasi ala Barat yang memiliki prinsip *one man one vote*. Konsep tersebut hanya mendasarkan pada kekuatan saja, tidak kepada kebenaran. Akhirnya pengelolaan politik menjadi seperti di zaman primitif, penentuannya berdasarkan siapa yang kuat, maka dia yang menang.
2. Demokrasi ala Barat tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia, karena bangsa ini sudah mempunyai prinsip politik tersendiri, yaitu kekeluargaan. Istilah “kekeluargaan” tersebut berasal dari kata bahasa Jawa yaitu “*kawulo*” dan “*wargo*”. *Kawulo* dalam konsep Jawa berarti “*abd*”, yaitu mengabdikan pada tuannya dengan penuh kerelaan, sepuh hati, dan keikhlasan. Sedangkan *wargo* adalah masyarakat yang mengatur arah dan implementasi kebijakan.
3. Pemimpin ataupun “tuan” dalam konsep Soerjokoesoemo yang dimatangkan oleh Ki Hadjar Dewantara adalah “hikmah kebijaksanaan”. Jadi yang dijadikan pemimpin bukan orang, tetapi suatu idealisme bersama. Hal yang dijadikan kepemimpinan adalah kebijaksanaan itu sendiri, sedangkan orang yang dijadikan pemimpin adalah termasuk dalam anggota dari *kawulo* dan *wargo* itu sendiri. Konsep ini kemudian turun menjadi sila ke-4 dalam Pancasila yang berbunyi: “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*”.

Sementara itu, demokrasi politik versi Bung Hatta lebih dilatarbelakangi oleh pendidikannya di Belanda yang sedang berkembang, yakni ajaran demokrasi berbasis pada individual. Namun ia melihat kebaikan dari individualisme di sana dalam kasus pembentukan Rabo Bank. Bank tersebut didirikan dari penggabungan kelompok-kelompok individual menjadi ekonomi terpadu koperasi. Bung Hatta melihat perkembangan koperasi tersebut di Skandinavia dan Eropa pada umumnya. Dalam

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

praktiknya, sifat kepentingan individual dilebur menjadi sifat kepentingan bersama melalui koperasi itu. Setelah Bung Hatta kembali ke tanah air dan bertemu dengan Bung Karno, ia pun memahami pemikiran “kekeluargaan”. Karena itu, dalam UUD 1945 pada Pasal 33 disebutkan bahwa koperasi berasaskan kekeluargaan.⁷⁴

Keempat, adanya peran dan intervensi internasional. Secara spesifik, tingginya suhu politik dan juga munculnya konflik politik pada periode ini tidak bisa dilepaskan dari adanya peran internasional (*outsiders*). Hal tersebut terjadi lantaran adanya refleksi dari perang pengaruh dalam Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kajian sebelumnya, menguatnya manuver politik Bung Karno yang disertai adanya gerakan oposisi terhadap Bung Karno selalu terkait dengan kepentingan politik internasional. Di antara peran internasional yang paling terasa adalah propaganda PKI sebagai kaki tangan Uni Soviet yang membangun opini bahwa Bung Hatta adalah kapitalis dan komprador. Sedangkan grup pro-AS menghembuskan isu bahwa Bung Karno adalah komunis yang menjalin poros Jakarta-Peking. Sehingga pada waktu itu teori konspirasi bergabung antara CIA dan *Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti* (KGB)⁷⁵ untuk menggulingkan Bung Karno. Dari KGB memunculkan PKI, sedangkan AS menekan dari segi ekonominya.⁷⁶

2.2.3 Peran dan Metode Gerakan Dema UGM di Tengah Konflik

Menurut Prof. Haryana, aktivisme mahasiswa ketika itu sangat terpengaruhi politik nasional.⁷⁷ Gesekan antar gerakan mahasiswa di UGM sangat kuat. Mahasiswa dipaksa harus memilih gerakan ekstra-universitas apa yang hendak diikuti.⁷⁸ Ketika di Dema itu dominan aktivis merah, maka kekuatan massa akan merah juga. Bahkan, antar gerakan mahasiswa sangat rentan untuk bertrokan fisik. Hal tersebut membuat Dema layaknya seperti organisasi

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Dinas intelejen dan keamanan Uni Soviet.

⁷⁶ Wawancara dengan Prof. Dr. Sutaryo, *Op.cit.*

⁷⁷ Wawancara dengan Prof. Haryana, *Op.cit.*

⁷⁸ Ketika itu menguat GMNI, HMI, dan CGMI. Lalu terakhir menguat pengaruh KAMI.

ekstra kampus tetapi resmi di dalam kampus. Universitas tidak bisa menyentuh Dema sebagai pemerintahan mahasiswa.⁷⁹

Dema UGM dalam periode ini lebih berperan sebagai perpanjangan tangan dari partai politik.⁸⁰ Terjadi pergeseran aktivisme mahasiswa dalam Dema UGM, yang semula pada periode keemasan menunjukkan aktivisme yang ideal dengan mengedepankan penalaran sebagai kekuatan utama mahasiswa, mengedepankan nilai gotong-royong antar gerakan mahasiswa, dan berkontribusi secara konkret terhadap rakyat dan negara. Tak mengherankan ketika kemudian aktivisme Dema UGM lebih diwarnai sentimen politik komunalisme (politik golongan).⁸¹

Tercatat, Dema UGM mendukung sepenuhnya kebijaksanaan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dalam pengganyangan Malaysia melalui Komando Dwikora.⁸² Dema pun menerima kunjungan mahasiswa dari Irian Barat dan mengadakan pernyataan bahwa Irian Barat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia dan nasib Irian Barat berada dalam tangan putra-putri Irian Barat bersama-sama dengan seluruh bangsa Indonesia.⁸³ Dalam bidang olahraga, Dema UGM turut membantu pelaksanaan GANEFO dengan mengirimkan Tim Pelaksanaan Ganefo.⁸⁴ Bahkan menurut Prof. Ir. H. Johannes selaku Rektor UGM pada tahun itu, Dema UGM pada periode tahun 1964-1966 terbentuk dalam situasi nasional internasional yang semakin menguntungkan bagi kekuatan progresif revolusioner, di mana pada sisi lain kaum kontra-revolusi semakin kalap dengan tindakan-tindakan pemecah belah persatuan progresif revolusioner.⁸⁵

⁷⁹ Wawancara dengan Prof. Haryana, *Op.cit.*

⁸⁰ Wawancara dengan Prof. Ichlasul Amal, yang juga senada dengan apa yang diungkapkan Prof. Dr. Sutaryo, *Op.cit.*

⁸¹ Wawancara dengan Prof. Haryana, *Op.cit.*

⁸² Lihat "Laporan Tahunan Universitas Gadjah Mada Tahun Pengajaran 1963/1964" oleh Prof. Ir. H. Johannes selaku Rektor UGM. Diucapkan pada 19 September 1964.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Lihat "Laporan Tahunan Universitas Gadjah Mada Tahun Pengajaran 1964/1965" oleh Prof. Ir. H. Johannes. Diucapkan pada 20 September 1965.

Secara metode gerakan, Dema dan juga gerakan mahasiswa ekstra-universitas di UGM sering menyelenggarakan rapat akbar dan mobilisasi massa besar-besaran untuk ajang menonjolkan kekuatan. Ketika PNI dengan *onderbouw*-nya GMNI mengadakan rapat, di waktu yang bersamaan gerakan lain melakukan persiapan untuk jaga-jaga. Bahkan pada malam hari, mahasiswa tidur di tempat kawan yang “sealiran” agar aman. Aktivis GMNI tidur di tempat orang PNI, sedangkan daerah Koncowinatan adalah titik konsentrasinya aktivis HMI.⁸⁶

2.2.4 Kontestasi Ideologi Gerakan Mahasiswa

Menurut Prof. Ichlasul Amal, ideologi gerakan mahasiswa di UGM ketika itu terbagi menjadi dua kutub besar. ***Kutub pertama*** adalah mereka yang pro-Bung Karno, yaitu GMNI dan CGMI, dan ***kutub kedua*** adalah mereka yang anti-Bung Karno, yaitu HMI, Gemos, dan beberapa gerakan keagamaan lain.⁸⁷ Namun kontestasi pada waktu itu menjadikan CGMI sebagai *common enemy*.⁸⁸ Ketika itu terdapat desakan dari kubu Nasionalis dan Komunis kepada Bung Karno untuk membubarkan HMI. Namun, Bung Karno tetap tidak mau membubarkan HMI, dengan mengatakan “*Go ahead HMI!*”⁸⁹ Konflik antar gerakan ekstra tersebut berdampak pada pemilihan pimpinan Dema UGM. Aktivis-aktivis yang terindikasi anggota HMI dijegal dan dialienasi dari Dema. Ketika itu, Dema UGM sangat dikuasai oleh aktivis GMNI dan CGMI, terutama Kodema di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM. Setiap calon dari HMI, atau yang bukan berasal dari GMNI dan CGMI, akan dihalangi untuk bisa masuk ke Dema UGM.⁹⁰

Dikarenakan HMI terus diblokir, HMI mewajahkan diri ke dalam beberapa organisasi, seperti: PMII, IMM, dan juga SEMI dari Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Prof. Ichlasul Amal pun terlibat dalam pembentukan organisasi-organisasi

⁸⁶ Wawancara dengan Prof. Haryana, *Op.cit.*

⁸⁷ Wawancara dengan Prof. Ichlasul Amal, *Op.cit.*

⁸⁸ Wawancara dengan Prof. Dr. Sutaryo, *Op.cit.*

⁸⁹ Wawancara dengan Prof. Ichlasul Amal, *Op.cit.*

⁹⁰ *Ibid.*

mahasiswa Islam tersebut di UGM. Melalui gerakan tersebut, akhirnya kubu Islamis bisa masuk ke Dema UGM. Ketika itu Bung Karno mengeluarkan kebijakan larangan “*text book thinking*” karena mahasiswa dianggap kebanyakan menghafal sehingga menjadi ‘sarjana diktat’ yang tidak kreatif. Kebijakan tersebut melarang mahasiswa untuk membaca buku terbitan dari Amerika. Akhirnya, gerakan HMI lebih bergerak dalam bentuk *tenteer* pelajaran bagi mahasiswa untuk menyasiasi kebijakan tersebut.⁹¹ Namun, kutubisasi tersebut tetap terjadi bahkan di kalangan dosen-dosen UGM. Pernah suatu ketika diselenggarakan Pemilihan Dekan, tetapi karena ada kandidat yang dari HMI, akhirnya dijegal oleh Dema dan dosen yang pro-Bung Karno.⁹²

Sementara itu, CGMI memiliki ciri khas tersendiri dalam pergerakannya. Kader-kader CGMI merupakan orang-orang yang sangat militan dan ideologis. Menurut Prof. Haryana, di UGM CGMI bergerak tidak dengan menunjukkan identitas komunisnya, tetapi mereka berlindung di bawah kedok keilmuan.⁹³ Ditambahkan oleh Prof. Dr. Sutaryo bahwa pengorganisasian gerakan CGMI berdasarkan pada sistem sel bertingkat dengan menggunakan teknik mobilisasi massa sebagai ajang menunjukkan kekuatannya. Mereka memiliki diktat-diktat khusus yang hanya didapat di sekretariat mereka di luar kampus. Organisasi mereka sangat responsif dalam melakukan pelayanan terhadap mahasiswa-mahasiswa umum untuk menarik simpati. Di tingkatan nasional, pengaruh mereka sangat kuat di PPMI dan MMI (Arbi Sanit, 1999: 105).

Memasuki tahun 1965, mulai muncul pengaruh ideologi KAMI dalam tubuh Dema UGM. Aktivis-aktivis KAMI tersebut merekrut aktivis-aktivis yang justru memiliki kedekatan dengan Bung Karno.⁹⁴ Mereka menggunakan teori gerakan massa Bung Karno dan menerapkannya untuk menggulingkan Bung Karno sendiri. KAMI kerap melakukan aksi-aksi anti-Bung Karno yang

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

⁹³ Wawancara dengan Prof. Haryana, *Op.cit.*

⁹⁴ Wawancara dengan Prof. Dr. Sutaryo, *Op.cit.*

didanai oleh militer dan AS. Karena itu di UGM, KAMI secara langsung menjadi “musuh” bagi GMNI dan terutama CGMI.⁹⁵ Namun demikian, KAMI tidak memiliki pengaruh yang cukup jika dibanding dengan kekuatan GMNI di UGM. Mereka lebih kuat basisnya di kampus-kampus selain UGM, seperti UI dan ITB. Di Dema UGM para aktivis KAMI belum berani menunjukkan sikap anti-Bung Karno, sehingga mereka lebih mengangkat isu anti-PKI/CGMI.⁹⁶

Peristiwa ditembaknya Arief Rahman Hakim di UI adalah peristiwa menarik untuk menilik pertentangan ini. Dalam teorinya, memang harus ada yang dikorbankan (*martyr*) dalam setiap revolusi sebagai pemicu gerakan massa. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang melakukan penembakan itu.⁹⁷ Sekalipun terdapat beberapa versi sejarah yang mencatat bahwa penembakan adalah tentara. Pada 1998, strategi ini pun diulangi lagi dengan adanya Tragedi Semanggi dan Trisakti.⁹⁸

Pasca terjadinya peristiwa G30S, oposisi Bung Karno mulai memunculkan politik de-Soekarnoisasi. Isu utama yang diembuskan oleh KAMI adalah pembubaran PKI dan kebencian terhadap Bung Karno. Gerakan de-Soekarnoisasi tersebut berkembang di Dema UGM dan memengaruhi mahasiswa baru. Bahkan ketika masa orientasi mahasiswa baru, aktivis KAMI mengajarkan lagu-lagu agitasi khusus. Hal itu membuat GMNI pincang sejenak, sementara aktivis-aktivis HMI semakin intens berkonsolidasi, meskipun gerakan mereka tetap konstan di UGM.⁹⁹ Pada 1965, terbit Instruksi Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan nomor 02/Dar/1965 tentang pembekuan sementara waktu organisasi mahasiswa CGMI dan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (Perhimi) yang notabene *onderbouw* dari PKI.¹⁰⁰ Instruksi ini kemudian disusul dengan Surat Keputusan Rektor UGM No.

⁹⁵ Wawancara dengan Prof. Haryana, *Op.cit.*

⁹⁶ Wawancara dengan Prof. Dr. Sutaryo, *Op.cit.*

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Lihat SK Rektor UGM Nomor 14 Tahun 1965.

3 Tahun 1966 tentang pembekuan Majelis Mahasiswa, Dewan Mahasiswa, dan Kodema.¹⁰¹

Pada 1966, CGMI akhirnya dihabisi oleh militer. Semua gerakan seperti GP Ansor, termasuk sebagian Pemuda Marhaenis, dan sekutunya ikut menghabisi PKI dan CGMI.¹⁰² Pada waktu itu, GMNI terpecah dua, yaitu GMNI yang asli pendukung Bung Karno dan GMNI *osek-osek* pendukung Soeharto.¹⁰³ GMNI *osek-osek* bergabung dengan kekuatan KAMI untuk menggulingkan Bung Karno. Menurut Prof. Dr. Sutaryo, GMNI dihabiskan bukan dengan cara-cara fisik sebagaimana CGMI “dihabiskan”, melainkan GMNI “dihabiskan” melalui cara-cara politis. Hal tersebut dikarenakan Bung Karno kerap dikait-kaitkan dengan peristiwa G30S/PKI oleh oposisi. Hal itu menjadi ironis dikarenakan GMNI sebenarnya memiliki rivalitas yang cukup kuat dengan CGMI sedari tahun 1963¹⁰⁴ sehingga pada waktu itu, ada usaha untuk memotong pemikiran dan generasi Pancasila Soekarno dari level Rektor, Dekan, hingga ke Dema di UGM. Sebagai catatan, Ketua Dema UGM dari GMNI yang kali terakhir menjabat di pengujung Orde Lama tersebut bernama Tejo Suminto.¹⁰⁵

Akan tetapi, karena kekuatan GMNI pada saat itu masih relatif besar di UGM, mereka tetap dapat bertahan di universitas. Sekalipun sejarah mencatat Dema UGM dan semua Kodema di Fakultas akhirnya dikuasai oleh aktivis-aktivis KAMI.¹⁰⁶ Dikarenakan terjadi masa transisi kepemimpinan nasional dari Bung Karno ke Soeharto, UGM sempat meliburkan para mahasiswa hingga satu semester yang kemudian diundur satu semester lagi (hampir setahun lamanya).¹⁰⁷ Masa vakum tersebut semakin memudahkan aktivis-aktivis KAMI untuk mulai “mengkondisikan” UGM.

¹⁰¹ Lihat SK Rektor UGM Nomor 3 Tahun 1966.

¹⁰² Wawancara dengan Prof. Dr. Sutaryo, *Op.cit.*

¹⁰³ Wawancara dengan Prof. Ichlasul Amal, *Op.cit.*

¹⁰⁴ Wawancara dengan Drs. Bambang Praswanto, *Op.cit.*

¹⁰⁵ Wawancara dengan Prof. Haryana, *Op.cit.* Ir. Tejo Suminto pernah menjabat sebagai Bupati Sukoharjo.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Prof. Dr. Sutaryo, *Op.cit.*

¹⁰⁷ Wawancara dengan Prof. Haryana, *Op.cit.*

2.3 Peran Dema UGM di Era Orde Lama

Pada periode awal Orde Lama (1950-1962), Dema UGM memperlihatkan peranannya dengan memposisikan diri sebagai kelompok penekan yang paling mendukung pemerintahan Bung Karno. Hal yang menarik adalah tekanan-tekanan politik itu dilakukan melalui metode gerakan persuasif dengan mengandalkan penalaran sebagai koor utama gerakannya. Dema kerap melakukan seminar-seminar yang mendukung pemerintah, mengikuti program-program yang diselenggarakan pemerintah, dan turut serta berkontribusi dalam setiap manuver yang pemerintah lakukan. Di samping itu, Dema UGM pun aktif melakukan kontribusi kepada rakyat dengan melakukan pemberdayaan langsung berdasarkan disiplin keilmuan yang dimiliki. Namun sejak tahun 1962 hingga 1966, Dema UGM mulai menekan lawan-lawan politik Bung Karno baik di pemerintahan maupun dalam gerakan mahasiswa. Pilihan metode gerakannya pun berubah menjadi gerakan paksaan (koersif) dengan mengandalkan mobilisasi aksi massa untuk menunjukkan kekuatan.

Secara ideologis, sejak didirikan, Dema UGM dominan dikuasai oleh kekuatan GMNI yang berketub pada poros Nasionalis-Sekuler. Menurut Sanit, GMNI yang berasaskan Marhaenisme tergolong ke dalam ideologi yang disusun secara sistematis. Sedangkan, menurut Uhlin ideologi tersebut tergolong dalam wacana radikal dan konservatif. Dikarenakan aktivis-aktivis GMNI banyak mewarnai aktivisme Dema UGM sejak zaman pembentukannya, maka hadirnya Dema UGM sebagai kelompok penekan lebih dikarenakan ekspresi ideologis dari Marhaenisme dan Pancasila sebagaimana ajaran Bung Karno. Namun demikian, di periode awal Dema UGM gerakan-gerakan lain tetap bermunculan seperti HMI, CGMI, dan lainnya. Meskipun pasca 1962 gesekan antar gerakan semakin meruncing diakibatkan adanya gerakan KAMI.

bab III

KM UGM di
Era Orde Baru

KM UGM di Era Orde Baru

Setelah perubahan politik nasional dan internasional “melahirkan” rezim Presiden Soeharto di Indonesia, KM UGM harus menghadapi berbagai dinamika baru dengan Pemerintah yang berideologi developmentalisme. Memasuki tahun 1971, Presiden Soeharto mulai menunjukkan wajah aslinya dengan menerapkan pemerintahan otoritarian militeristis dengan mengandalkan represivitas Negara terhadap gerakan mahasiswa. Terlebih, di era tersebut Pemerintah sangat erat hubungannya dengan kapitalis asing.

Tulisan ini akan dibagi menjadi empat periode, *pertama* periode 1966-1970 yang merupakan fase stabilisasi rezim Orde Baru terhadap politik kampus termasuk KM UGM. Di dalam sub-bab tersebut akan dibahas mengenai kemunculan pengaruh KAMI *Care Taker* Dema. *Kedua*, pembahasan akan memasuki periode 1970-1978 yang diawali dengan adanya gerakan berbasis kekecewaan dari mahasiswa terhadap Pemerintah. Dalam sub-bab ini dibahas juga mengenai kebangkitan Dema UGM yang mulai melakukan perlawanan terhadap Pemerintah. *Ketiga*, periode 1979-1987 yang merupakan fase pemberangusan gerakan mahasiswa di UGM dengan diterapkannya Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK). Dan *keempat*, periode 1988-1998 yang merupakan fase kebangkitan kembali KM UGM dengan terjadinya Reformasi sebagai titik kulminasi gerakannya.

3.1 Stabilisasi Politik (1966-1970)

Setelah Bung Karno digulingkan pada 1966, mulailah diberlakukan stabilisasi politik oleh Orde Baru dibawah kepemimpinan

Soeharto. Segala perencanaan administrasi dan prosedur dalam pemerintah diatur secara *rigid* dari level nasional hingga tingkat terbawah. Pengorganisasian pemerintah itu dilakukan secara sentralistik di bawah supervisi militer, termasuk secara ideologis dikontrol dengan adanya Pancasila “versi” Soeharto. Perubahan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan masa kepemimpinan Bung Karno adalah adanya pembangunan ekonomi yang sangat pesat dengan masuknya perusahaan dan modal asing ke Indonesia. Beberapa tokoh oposisi Bung Karno memasuki kabinet Soeharto dengan menjadi menteri-menteri Orde Baru, seperti Emil Salim, Ali Wardana, dan Soemitro Djojohadikoesoemo. Kerap mereka sering disebut sebagai Kelompok Berkeley.¹

Menurut Prof. Ichlasul Amal, periode politik dari digulingkannya Bung Karno hingga tahun 1970, dianggap sebagai kondisi Indonesia yang paling demokratis bagi gerakan mahasiswa.² Ketika itu kebebasan pers sangat terjamin dengan terbitnya beberapa surat kabar mahasiswa, seperti: Demokrasi Indonesia, Mahasiswa Indonesia, Gelanggang Mahasiswa, dan terbitan lainnya. Tidak seperti pada masa Orde Lama akhir, masa itu sering disebut sebagai masa keemasan surat kabar mahasiswa. Terdapat beberapa isu yang tidak berani diangkat di media massa, tetapi diangkat di media mahasiswa. Wacana yang diangkat gerakan mahasiswa pada umumnya adalah mengenai demokrasi dan pembangunan.³ Wacana yang terlarang untuk diangkat pada era sebelumnya.

Gerakan mahasiswa UGM pun pada akhirnya harus bersentuhan dengan stabilisasi Orde Baru tersebut. Aktivisme Dema UGM mengalami perubahan yang cukup signifikan. Begitu juga dengan gerakan mahasiswa dan ideologi yang bermain di dalamnya. Menurut Prof. Dr. Sutaryo, pada era stabilisasi politik tersebut terdapat dua bulan madu politik yang terjadi. *Pertama*, terdapat banyak aktivis mahasiswa yang menjadi anggota DPR dan berbulan

¹ *Ibid.*

² Wawancara dengan Prof. Ichlasul Amal, *Op.cit.*

³ *Ibid.*

madu dengan Pemerintah.⁴ Aktivistik mahasiswa yang erat dengan pemerintah itu mayoritas berasal dari gerbong KAMI. **Kedua**, bulan madunya militer dengan kekuatan kapitalis asing.⁵ Pemerintahan militer yang dipimpin Presiden Soeharto sangat *welcome* dengan kapitalis asing, khususnya kepada Jepang. Pada 1967, UU Penanaman Modal Asing ditandatangani Pemerintah, yang kemudian diikuti dengan didirikannya perusahaan penambangan emas milik AS yang bernama *Freeport* di Papua.⁶ Gelombang kapitalisme kian menguat di Indonesia terutama menjelang tahun 1970 akhir.

3.1.1 Menguatnya Pengaruh KAMI Care Taker Dema UGM

Proses stabilisasi politik yang dilakukan Orde Baru berdampak secara langsung kepada politik gerakan mahasiswa dalam Dema UGM. Gerakan KAMI yang notabene hadir sebagai pihak yang sangat diuntungkan dengan hadirnya stabilisasi tersebut, kemudian membentuk Care Taker Dema atau biasa disebut KAMI CT Dema.⁷ Sejak digulingkannya Bung Karno di tahun 1966, KAMI CT Dema inilah yang mengambil alih seluruh kepemimpinan Dema, Kodema, dan MM dengan menghabisi pengaruh dari aktivis-aktivis GMNI. Kekuatan “hijau” mulai menguat di UGM terutama di fakultas-fakultas.⁸ Sekalipun demikian, sejatinya Dema UGM secara kultural tetap dikuasai oleh kekuatan “merah”.⁹

Secara ideologis, pemikiran yang dibawa oleh aktivis KAMI CT Dema berasal dari latar belakang gerakan HMI, PMKRI, dan Gemos. Sebagaimana yang dikategorisasikan oleh Prof. Ichlas, gerakan-gerakan tersebut termasuk ke dalam kutub yang anti-Bung Karno dengan ideologi Marhaenismenya (Nasionalis-Sekuler) dan juga metode gerakan Nasakom. Terlebih, gerakan CGMI yang menganut ajaran Komunisme merapat kepada Bung Karno pada

⁴ Wawancara dengan Prof. Dr. Sutaryo, *Op.cit.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Wawancara dengan Drs. Bambang Praswanto, *Op.cit.*

⁸ Wawancara dengan Prof. Haryana, *Op.cit.*

⁹ *Ibid.*

waktu itu. HMI yang berisikan aktivis muslim reformis-modernis (terlebih ketika itu HMI memilih untuk mendukung Islam politik) yang masuk ke dalam wacana Demokrasi dan juga Gemos yang berisikan aktivis Sosialis-Demokrat yang masuk ke dalam kelompok Liberal menurut Uhlin, berada dalam posisi diametral dengan pemahaman aktivis GMNI sehingga apa-apa yang dibawa dan menjadi harapan bagi Orde Baru seperti wacana demokrasi dan pembangunan, menjadi kepentingan yang sama dengan aktivis KAMI CT Dema pada waktu itu.

3.1.2 Perandan Metode Gerakan Dema UGM di Bawah KAMI CT Dema

Aktivis KAMI CT Dema lebih mengarahkan kehidupan mahasiswa pada basis penalaran *an sich*, tidak pada politik sebagaimana yang terjadi dalam periode 1962-1966. Oleh karena itu, Dema UGM tidak terlalu memosisikan diri sebagai *pressure group* bagi siapapun, baik terhadap Universitas apalagi terhadap Pemerintah.¹⁰ Karena itu, elemen yang lebih dominan vokal untuk mengangkat isu-isu politik berasal dari kalangan pers mahasiswa, di UGM ketika itu dikenal dengan nama “Gelanggang Mahasiswa”. Di ITB terdapat pula pers mahasiswa yang sudah lebih lama bernama “Mahasiswa Indonesia”. Pers mahasiswa tersebut mengangkat isu-isu politik tetapi tetap bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Contoh isu yang diangkat adalah mengenai kesejahteraan masyarakat melalui gerakan koperasi dan kegiatan ekonomi rakyat.¹¹ Aktivis pers mahasiswa “Gelanggang Mahasiswa” pada waktu itu adalah Saur Hutabarat. Koran mahasiswa tersebut hanya dijual untuk mahasiswa saja, berbeda dengan “Mahasiswa Indonesia” di Bandung yang dijual di pasar-pasar umum.¹²

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Wawancara dengan Baharuddin Aritonang, di kediamannya di Pejompongan Jakarta Selatan, pada tanggal 30 Oktober 2012. Beliau adalah Ketua I Dema UGM tahun 1976-1978, pernah menjabat sebagai Pimpinan BPK.

3.2 Dema Melawan! (1970-1978)

Memasuki tahun 1970, terdapat masa transisi di dalam Dema UGM dengan berkurangnya pengaruh KAMI CT Dema dan mulai diselenggarakannya kembali Pemilihan Raya (Pemira) Mahasiswa. Tepat setahun sebelumnya, diterbitkan Surat Keputusan Rektor Nomor 12 Tahun 1969 tentang penghentian masa jabatan KAMI Care Taker Dema/Kodema UGM yang bertugas sejak tahun 1966. SK tersebut juga berisikan tentang pembentukan Panitia Persiapan Pembentukan Dewan Mahasiswa UGM kembali yang diketuai oleh Rektor UGM ketika itu, Drs. Soeroso H. Prawirohardjo.¹³

Pada waktu yang bersamaan, kekuatan aktivis Nasionalis yang masuk ke dalam wacana Radikal dan Konservatif menguat kembali.¹⁴ Aktivis-aktivis GMNI ketika itu sangat anti-Soeharto. Mereka tahu bahwa yang berada di balik Soeharto adalah CIA dari AS. Keterlibatan intelejen asing tidak bisa dielakkan, begitupun yang terjadi sejak kepemimpinan Bung Karno dulu, sebagai contoh CANEFO yang sempat disabot sehingga gagal tercapai.¹⁵ Sedangkan CGMI, ketika itu telah benar-benar dihabiskan oleh KAMI CT Dema, bahkan Universitas memiliki daftar nama-nama mahasiswa yang mengikuti CGMI dan terlibat dalam G30S untuk diserahkan kepada Korem atau Kodim.¹⁶

Setelah Pemira tahun 1970, GMNI memperoleh kemenangan kembali di kalangan mahasiswa.¹⁷ Bahkan menurut Drs. Bambang Praswanto, sejak kemenangan tersebut, GMNI selalu memegang Dema UGM sampai tahun 1978.¹⁸ Namun tambahnya, sekalipun demikian aktivis GMNI membuka dan membagi kursi pimpinan mahasiswa kepada HMI, PMKRI, dan gerakan mahasiswa lainnya. Aktivis Nasionalis ketika itu tidak membalas dan menghabiskan aktivis KAMI di Dema UGM. Mereka tahu bahwa aktivis KAMI hanya dimanfaatkan oleh kekuatan anti-Bung Karno dahulu.¹⁹

¹³ Lihat SK Rektor UGM Nomor 12 Tahun 1969.

¹⁴ Wawancara dengan Drs. Bambang Praswanto, *Op.cit.*

¹⁵ Wawancara dengan Prof. Dr. Sutaryo, *Op.cit.*

¹⁶ Wawancara dengan Prof. Haryana, *Op.cit.*

¹⁷ Wawancara dengan Drs. Bambang Praswanto, *Op.cit.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Setelah kubu Nasionalis kembali memegang Dema UGM, Orientasi Studi Mahasiswa (OSMA)²⁰ diadakan kembali meski prosesi masih dilaksanakan di Fakultas masing-masing, dan seluruh mahasiswa diwajibkan ikut. Sebelumnya, OSMA sempat ditiadakan oleh kepengurusan KAMI CT Dema. Pada 1972, lokasi studi di UGM masih terpencar-pencar, di Karang Malang, Bulaksumur, dan Ngasem.²¹ Barulah pada 1974, tempat studi UGM terintegrasi menjadi satu kompleks di Bulaksumur.

Pada 1974-1976, yang menjabat sebagai Ketua Umum Dema UGM adalah Marsanto dari GMNI dengan Sampurno sebagai wakil ketua. Kemudian pada 1976-1978, Ketua Dema diganti dengan Lukman F. Mokoginta dari Fakultas Geografi yang juga sama-sama GMNI, dengan Baharuddin Aritonang dari Fakultas Farmasi yang berasal dari HMI sebagai Ketua I yang membidangi Olahraga, Seni, dan Kerohanian.²² Gerakan Dema UGM ketika itu mulai berani mengkritisi Universitas dan terlebih Presiden Soeharto. Beberapa di antara mereka melakukan aksi turun ke jalan dan bergabung dengan berbagai elemen kampus di Yogyakarta. Biasanya, mereka melakukan aksi demonstrasi di Bunderan UGM.²³

Dalam periode ini, suhu politik gerakan mahasiswa UGM kembali memanas dengan Pemerintah. Terdapat beberapa peran penting dan metode gerakan yang dilakukan Dema UGM yang penting untuk dikaji, yaitu gerakan kekecewaan mahasiswa terhadap Pemerintah, konflik Malari 1974, dan memuncaknya gerakan pada 1978.

3.2.1 Kekecewaan Mahasiswa

Memasuki dekade 1970-an, rezim Orde Baru semakin menunjukkan sikap aslinya. Hubungan mahasiswa dengan Pemerintah mulai retak, terlebih pada 1971 bertepatan dengan momentum Pemilihan Umum (Pemilu). Beberapa aktivis mahasiswa seperti Arief Budiman dkk, menginisiasi gerakan “Golongan Putih” atau

²⁰ Sekarang diistilahkan sebagai Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru (PPSMB).

²¹ Wawancara dengan Baharuddin Aritonang, *Op.cit.*

²² *Ibid.*

²³ Wawancara dengan Prof. Haryana, *Op.cit.*

biasa disingkat Golput.²⁴ Kekecewaan gerakan mahasiswa kepada Pemerintah lebih dikarenakan tidak sesuainya harapan-harapan perbaikan yang dijanjikan pemerintahan Orde Baru. Kondisi politik yang terjadi justru paradoks dengan semakin bercokolnya modal asing di Indonesia yang dimotori oleh sistem pemerintahan militerisme Presiden Soeharto. Ketika itu, kekuatan mahasiswa anti-Bung Karno di dalam Dema UGM sudah meredup, dan digantikan dengan menguatnya kekuatan mahasiswa Nasionalis anti-Orde Baru.²⁵

Pada 1972, mulai terdapat beberapa gerakan protes Dema UGM kepada Pemerintah. Di antaranya adalah penolakan Dema terhadap pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang diusulkan Bu Tien, istri dari Presiden Soeharto. Aktivis Dema sering menyebut proyek pembangunan TMII dengan istilah “*tien percent*” untuk menyindir Bu Tien. Hal tersebut dikarenakan biaya untuk pembuatan TMII ini diperoleh dari 10% dana asing yang masuk. Dema melakukan pernyataan sikap pemboikotan untuk menolak proyek TMII dan turun aksi simpatik ke jalan.²⁶

Dema UGM pun aktif mewacanakan isu anti-modal asing. Ketika itu ekonom Indonesia didominasi ekonom-ekonom Barkeley yang sering disebut oleh aktivis Dema sebagai “*The Magnificent Seven*”, yaitu di antaranya adalah Soemitro Djojohadikoesoemo, Sadli, Emil Salim, dan Soebroto. Ekonom-ekonom yang masuk ke dalam jajaran pemerintahan Presiden Soeharto itu pernah menyengaja datang ke UGM dan menjelaskan tentang perekonomian bangsa.²⁷ Dema UGM menolak secara langsung konsepsi penanaman modal asing ala mereka dalam forum terbuka. Menurut Drs. Bambang Praswanto selaku aktivis Dema pada waktu itu, ekonom-ekonom tersebut rata-rata berasal dari kampus UI.²⁸ Gerakan kekecewaan tersebut membuat Presiden Soeharto mulai bersikap keras terhadap mahasiswa, terutama pasca-tahun 1972.

²⁴ Wawancara dengan Prof. Ichlasul Amal. *Op.cit.*

²⁵ Wawancara dengan Drs. Bambang Praswanto, *Op.cit.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Pada tahun-tahun tersebut, yang menjabat sebagai Rektor UGM adalah Drs. Soeroso H. Prawirohardjo dari Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM. Menurut Drs. Bambang, Drs. Soeroso sebenarnya adalah anggota PSI yang sengaja dimasukkan oleh Presiden Soeharto ke UGM untuk menjegal kekuatan Nasionalis Soekarno. ²⁹ Ia menjadi rektor pada usia yang masih sangat muda, yaitu 35 tahun. Pada awalnya terjadi penolakan terhadapnya dari mahasiswa termasuk Dema UGM. Namun, setelah terpilih menjadi rektor, ia malah sangat disenangi oleh mahasiswa. Sekalipun ia dimasukkan oleh Presiden Soeharto, tetapi setelah menjadi Rektor, ia tidak menunjukkan keberpihakannya pada Orde Baru. Pemikiran Drs. Soeroso malah sangat Nasionalis ala “Yogyakarta”. ³⁰ Pada 1974 ia seharusnya terpilih lagi menjadi Rektor UGM, tetapi tidak diperbolehkan oleh Pemerintah Pusat. Akhirnya, rektor yang terpilih setelahnya adalah Prof. Sukadji Ranuwihardjo dari Fakultas Ekonomi UGM yang sama-sama punya latar belakang PSI. Tetapi lagi-lagi, setelah terpilih ia malah berbalik dan sangat anti-Berkeley dan militerisme. ³¹

Pada 1974, Presiden Soeharto datang ke UGM untuk menghadiri peringatan “25 Tahun UGM”. Presiden Soeharto diagendakan memberikan pidato di Gedung Pusat UGM. Ketika itu Prof. Sukadji mengatakan, “Pak Harto boleh masuk ke UGM tetapi tidak boleh membawa satu pun tentara ke kampus. Yang tanggungjawab kalau ada apa-apa adalah Rektor UGM, Sukadji!” ³² Oleh karena itu, tentara hanya mengantar iring-iringan Presiden dan bertahan hingga di Bunderan UGM saja. Aktivistis Dema UGM dan mahasiswa oleh Prof. Sukadji dijadikan agen intelejen kecil-kecilan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian ketika Presiden Soeharto datang ke UGM. ³³ Walau ketika itu hubungan UGM dengan Pemerintah secara birokratis baik, tetapi sangat berbeda secara pemikiran. Wakil Rektor Kemahasiswaan pada waktu itu adalah Prof. Kunto Wibisono yang menunjukkan sikap sangat pro-mahasiswa.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Yang menarik adalah kendati Presiden Soeharto datang pasca-peristiwa Malari, UGM tetap aman dan tidak terjadi apa-apa pada kunjungan beliau. Menurut Drs. Bambang Praswanto, dari sini aktivisme mahasiswa UGM menunjukkan *style*-nya dengan ciri khas berbeda dibandingkan kampus-kampus lainnya. “*UGM Style*” tersebut memiliki karakter: walau berbeda secara pemikiran dengan orang lain, tetap memiliki hubungan yang baik.³⁴ Meski Dema UGM ketika itu memiliki sikap sangat diametral terhadap Presiden Soeharto, tetapi tetap tergabung dalam pengamanan kampus ketika kedatangannya untuk menjaga nama baik almamater. Meskipun sikap “*UGM style*” tersebut kerap disebut konservatif dan tidak populis oleh aktivis gerakan mahasiswa, terutama oleh gerakan mahasiswa Islamis dan Sosialis.³⁵

3.2.2 Konflik Tahun 1974

Salah satu peristiwa politik yang penting untuk dikaji pada periode perlawanan ini adalah konflik tahun 1974. Tepat pada 15 Januari 1974, terdapat gerakan kekecewaan terhadap Pemerintah di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia. Pada waktu itu terdapat banyak aksi demonstrasi mahasiswa dan rakyat, bahkan di Jakarta sempat ada aksi pembakaran dan penjarahan toko dan *showroom* perusahaan Jepang dan Tiongkok. Banyak yang menganggap gerakan tersebut sebagai bentuk kekecewaan gerakan sosialis terhadap Orde Baru. Motor gerakan peristiwa Malari itu selalu berasal dari kalangan mahasiswa sosialis, seperti Hariman Siregar yang menjabat sebagai Ketua Dema UI.³⁶

Menurut Prof. Ichlasul Amal, konflik yang memuncak pada tahun 1974 merupakan refleksi dari beberapa kejadian dan konflik politik yang terjadi sebelumnya.³⁷ *Pertama*, salah satu penyebab terjadinya eskalasi gerakan mahasiswa pada tahun tersebut adalah adanya refleksi dari revolusi mahasiswa di Thailand pada 1973.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Wawancara dengan Baharuddin Aritonang, *Op.cit.*

³⁶ Wawancara dengan Prof. Ichlasul Amal, *Op.cit.*

³⁷ *Ibid.*

Ketika itu, terjadi konflik secara massif antara gerakan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan kiri melawan kekuatan rezim militer.³⁸ Peristiwa revolusi mahasiswa di Thailand itu sebagai dampak dari terjadinya Perang Dingin. Gerakan mahasiswa tersebut mengampanyekan isu anti-kapitalisme asing yang masuk ke Thailand. Puluhan korban berjatuh dalam peristiwa tersebut.

Kedua, refleksi konflik kubu Islamis dengan kubu Kebatinan. Menurut Prof. Ichlasul Amal, terdapat polemik UU Perkawinan pada 1973 di DPR. Pada rezim Orde Baru, memang terdapat banyak tokoh-tokoh birokrat dan militer yang mengikuti ajaran kebatinan, seperti Soedjono Humardani dan Ali Moertopo, bahkan termasuk Presiden Soeharto (Artawijaya, 2010: 266). Pada masa Orde Baru, aliran kebatinan berubah menjadi Aliran Kepercayaan yang dipopulerkan Golongan Karya (Golkar). Banyak dari aktivis-aktivis kebatinan tersebut yang mengusahakan agar pemikiran-pemikiran Aliran Kepercayaan ini dimasukkan ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan amandemen UUD 1945.

Sebagai *testing the water*, pada 1973 Aliran Kepercayaan mengajukan RUU Perkawinan yang sangat sekuler dan mengadopsi sistem pernikahan Barat, misalkan bahwa seseorang bisa menikah tanpa menggunakan cara Islam.³⁹ Juga setelahnya, Ali Moertopo cs. mengajukan *draft* GBHN yang berisi tentang penghapusan pendidikan agama dalam Sistem Pendidikan Nasional (Artawijaya, 2010: 269). Aliran Kepercayaan tersebut banyak disokong oleh lembaga *think tank* Presiden Soeharto yang bernama Center for Strategic and International Studies (CSIS). Lembaga tersebut memang banyak didukung oleh orang-orang Aliran Kepercayaan dan non-muslim.⁴⁰

Sontak saja, pengajuan itu mendapat penentangan yang sangat keras dari kubu Islamis seperti tokoh Muhammadiyah, Buya HAMKA, dan juga organisasi mahasiswa Islam seperti HMI dll. Inilah yang menjadi pemicu renggangnya kekuatan Islam dengan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Wawancara dengan Prof. Ichlasul Amal, *Op.cit.*

⁴⁰ *Ibid.*

Pemerintah yang dahulu mendukung lahirnya Orde Baru. Aktivis HMI mulai merasa dikecewakan Orde Baru, dan mulai menarik dukungan serta mengkritisi Pemerintah.

Menurut Baharuddin Aritonang, aktivis Dema UGM dan HMI pada waktu itu, di UGM sudah mulai muncul cikal bakal kekuatan Islamis. Ketika itu mulai diinisiasi salat Jumat di Gelanggang Mahasiswa, terutama pasca-tahun 1974. Inisiator dari gerakan salat Jumat itu berasal dari aktivis mahasiswa dengan latar belakang Pelajar Islam Indonesia (PII) yang sebagiannya masuk di HMI ketika di kampus. GMNI ketika itu tidak menerima aktivis-aktivis “PII” tersebut karena dianggap terlalu “keras” Islamnya, maka dipilihlah aktivis HMI yang dianggap lebih moderat. Terdapat tokoh Islamis yang berpengaruh di mahasiswa pada waktu itu yang bernama Muslih Zaenal Asikin⁴¹. Mereka aktif mengadakan dakwah Islam di UGM seperti *Ramadhan in Campus* yang mengundang banyak pakar dan seniman sehingga di dalam Dema secara formal ada Burhanuddin Aritonang, sedangkan Muslih dkk. dengan konkret bergerak secara kultural di lapangan. Hal tersebut menunjukkan kekuatan Islamis menguat di UGM.⁴²

Ketiga, refleksi berikutnya yang menyebabkan meningkatnya suhu politik pada tahun ini adalah adanya rivalitas militer antara Jenderal Soemitro sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) dengan Ali Moertopo sebagai Asisten Pribadi. Dalam hal politik ekonomi, Ali Moertopo memiliki kedekatan dengan kapitalis Jepang, sementara Soemitro memiliki orientasi ekonomi pada Barat. Jenderal Soemitro kerap memiliki kedekatan dengan aktivis Sosialis-Demokrat (eks. PSI). Oleh karena itu, peristiwa Malari yang diinisiasi Dema UI ditunggangi oleh aktivis sosialis yang pro-Soemitro.⁴³ Hal ini menunjukkan bentuk kekecewaan gerakan sosialis yang semula mendukung Presiden Soeharto.

⁴¹ Muslih Zaenal Asikin tercatat sebagai pendiri Jamaah Shalahuddin dan sempat menjadi Ketua Keluarga Alumni Jamaah Shalahuddin (Kajasa).

⁴² Wawancara dengan Baharuddin Aritonang, *Op.cit.*

⁴³ Wawancara dengan Drs. Bambang Praswanto, *Op.cit.*

Kondisi itu diperburuk dengan adanya konflik kubu Islamis dan kubu kebatinan sebagaimana dibahas sebelumnya. Ali Moertopo sangat didukung penuh oleh kekuatan CSIS yang jelas-jelas dibentuk AS. Memang sebenarnya CSIS tidak mengatasnamakan Aliran Kepercayaan, karena ada beberapa anggotanya yang eks. KAMI yang direkrut AS seperti Harijan Silalahi (aktivis PMKRI). Namun memang banyak di dalamnya yang menganut Aliran Kepercayaan. Secara politik, CSIS berkonfrontasi langsung dengan gerakan-gerakan Islamis.⁴⁴ Sedangkan Jenderal Soemitro dalam kondisi mau tidak mau mendukung gerakan Islamis dan juga Sosialis, karena berkonfrontir dengan rival militernya, Ali Moertopo.

Menurut Drs. Bambang Praswanto, sebenarnya Jenderal Soemitro maupun Ali Moertopo adalah sama-sama diatur dari balik layar oleh Presiden Soeharto. Tetapi pada 1974, Soemitro yang dikalahkan terlebih dahulu oleh Presiden Soeharto. Lalu di tahun 1982, giliran Ali Moertopo yang digulingkan oleh Benny Moerdani cs. Bahkan kematian Ali Moertopo pun hingga kini masih menjadi misteri. Bambang menambahkan, Presiden Soeharto tidak ingin orang yang menyainginya dari segi kepopuleran maupun dari segi kepemimpinan.

Sebagai contoh, dalam kasus Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang dikeluarkan Bung Karno pada tahun 1966. Ada empat orang jenderal yang menjadi pemegang mandat surat tersebut, yaitu Soeharto, Basuki Rahmat, M. Yusuf, dan Amir Mahmud. Tercatat, Basuki Rahmat yang keturunan Jawa terbunuh. Sementara itu, M. Yusuf berasal dari Sulawesi dan Amir berasal dari Sunda. Setelah itu, yang diangkat menjadi Panglima ABRI adalah Pangabean yang berasal dari suku Batak dan beragama Kristen. Barulah kemudian Jenderal Soemitro dialienasi terlebih dahulu, dan kemudian Ali Moertopo menjadi target alienasi setelahnya. Posisi kosong itu kemudian digantikan oleh Benny Moerdani, yang sekalipun orang Jawa, ia beragama Katolik. Kemudian posisi tersebut digantikan lagi oleh Soedomo yang orang Jawa, dan juga

⁴⁴ *Ibid.*

beragama Kristen. Satu-satunya orang Jawa dan Islam adalah Tri Sutrisno, tetapi dia terhalang posisi jabatan karena dia adalah bekas ajudan. Soeharto paham betul bahwa yang bisa menyaingi kekuatannya adalah yang memiliki konfigurasi: Jawa, Islam, dan Jenderal.⁴⁵

Dalam situasi konflik politik di sekitaran tahun 1974 tersebut, sebagaimana yang dijelaskan Prof. Ichlasul Amal, Drs. Bambang Praswanto selaku aktivis Dema UGM ketika itu berpendapat bahwa yang paling penting dan menjadi prinsip bagi Dema UGM adalah sikap anti-kapitalis asing dan anti-militer.⁴⁶ Dema UGM tidak berpihak kepada pihak mana pun, tetapi sangat kontra dengan CSIS karena mereka adalah antek-antek AS. Di tahun ini, aktivis GMNI dan HMI di UGM mulai merasakan “*common enemy*” yang harus dihadapi bersama. Aktivis GMNI kontra Orde Baru dengan CSIS-nya karena mereka adalah antek asing, sedangkan aktivis HMI kontra Orde Baru karena kedekatannya dengan CSIS yang mempercayai aliran kebatinan. Karena itu, Dema UGM sangat kontra dengan ekonom Soemitro Djojohadikoesoemo yang masuk dalam Kelompok Berkeley, Jenderal Soemitro karena pro-Barat, apalagi dengan Ali Moertopo.⁴⁷

Ketika itu Dema UGM mengampunyekan penolakan atas penanaman modal asing atau pinjaman asing. Dema UGM memiliki pemikiran gerakan sendiri yang berbeda dengan gerakan yang dibangun aktivis Dema di UI, ITB, dan kampus-kampus lainnya. Apalagi gerakan mahasiswa Malari pada tahun tersebut ditunggangi oleh orang-orang Sosialis-Demokrat yang pro-Soemitro. Oleh karena itu, Dema UGM tidak sepenuhnya mendukung gerakan Malari itu. Dema UGM tetap mendukung secara moral, tetapi tidak secara gerakan.

Di UGM sendiri menurut Baharuddin Aritonang, penggerak Malari itu bukan berasal dari Dema dan juga gerakan ekstra-universitas, melainkan lebih pada gerakan personal seperti yang

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Wawancara dengan Drs. Bambang Praswanto, *Op.cit.*

⁴⁷ *Ibid.*

diinisiasi oleh Aini Khalid, mahasiswa Fisipol UGM yang menjadi anggota Gerakan Sosialis. Ketika itu aktivis pers mahasiswa seperti Ashadi Siregar⁴⁸ dan Parakitri T. Simbolon yang mendirikan koran turut mengkritisi pembangunan TMII.⁴⁹ Namun gerakan tersebut tetap tidak signifikan, dikarenakan kekuatan Gemsos tidak begitu kuat di UGM. Serupa dengan itu, aktivis HMI ketika itu bersikap sangat keras terhadap Pemerintah. Ketua II Dema UGM yang berasal dari HMI sempat datang ke ITB untuk mengikuti deklarasi politik mahasiswa di tahun 1974.⁵⁰ Hal tersebut berbeda dengan aktivis-aktivis GMNI yang bersikap tidak terlalu mendukung Malari secara gerakan dan tidak bersikap keras. Maka pada waktu itu, gerakan aktivis Marhaenis sering disebut oleh gerakan lainnya sebagai gerakan yang konservatif, *jumud* (stagnan), dan menjadi menara gading dari permasalahan yang sebenarnya.

Pendapat tersebut dibantah oleh Drs. Bambang Praswanto yang dahulu menjadi aktivis GMNI pada waktu tersebut, gerakan yang dibangun oleh aktivis-aktivis Dema UGM dinilainya selalu cerdas, ilmiah, dan langsung menawarkan solusi konkret, tidak hanya mengutarakan gagasan melalui demo-demo semata. Menurutnya, di sinilah letak ciri khas dari gerakan mahasiswa UGM, yang disebut sebagai “*UGM style*”. Ketika peristiwa Malari 1974 terjadi, aktivisme mahasiswa di Yogyakarta tidak terlalu panas seperti sebagaimana yang terjadi di Jakarta. Walau sempat sedikit ramai di kampus, pihak yang menginisiasi gerakan tersebut bukan dari Dema UGM, melainkan dari kelompok mahasiswa.⁵¹

Secara ideologis, kekuatan gerakan mahasiswa dalam Dema UGM pada waktu itu hanya terbelah menjadi dua kutub di antara GMNI dan HMI saja, sekalipun ada pihak ketiga yang berusaha tidak masuk keduanya yang mengatasnamakan diri sebagai kelompok independen. Kondisi tersebut sangat berbeda dengan era tahun 1966 ketika masing-masing gerakan merdeka dan berdiri sendiri.

⁴⁸ Sekarang menjadi Dosen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM.

⁴⁹ Wawancara dengan Baharuddin Aritonang, *Op.cit.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Wawancara dengan Prof. Ichlasul Amal, *Op.cit.*

Kekuatan PII masuk ke HMI, sedangkan IMM dan PMII tidak memiliki kekautan sama sekali. GMKI dan PMKRI masuk ke dalam kelompok independen. Aktivis PII yang berada di HMI dan tidak berminat aktif di Dema akhirnya masuk ke gerakan kerohanian. Sementara itu pengaruh KAMI sudah benar-benar hilang di UGM. Namun di balik semua itu, tetap ada yang menyatukan keseluruhan aktivisme mahasiswa, yaitu kenyataan bahwa mereka semua anti-Soeharto dan Orde Baru.⁵²

3.2.3 Gerakan 1978

Menjelang eskalasi kedua di tahun 1978 dalam periode perlawanan ini, beberapa tahun sebelumnya muncul pemusatan kekuatan oposisi terhadap Orde Baru. Beberapa gerakan mahasiswa ekstra-universitas nasional bergabung dan mendirikan gerakan “Kelompok Cipayang”. Anggota gerakan tersebut terdiri dari GMNI, HMI, PMII, PMKRI, dan GMKI.⁵³ Gerakan mahasiswa yang dahulu tergabung di KAMI, akhirnya menyadari urgensi bergabung dalam satu gelombang gerakan bersama setelah peristiwa Malari 1974 karena Pemerintah dianggap tidak sesuai dengan perjuangan mereka. Sekalipun banyak yang sudah telanjur masuk ke Golkar.

Lantaran pemerintah Orde Baru tidak bisa mengontrol Kelompok Cipayang, maka mereka mendirikan Gerakan Mahasiswa KOSGORO⁵⁴ dan Angkatan Muda Pemuda Indonesia (AMPI). Dengan cepat, mahasiswa yang menjadi antek-antek Golkar menjadi musuh bersama di UGM. Gerakan Mahasiswa KOSGORO dan AMPI adalah musuh bagi aktivis-aktivis Dema UGM pada waktu itu.

Di tahun 1976, Dema UGM mengadakan seminar “Ketahanan Nasional” di kampus yang saat itu notabene tengah berupaya keras mengkritik sistem militerisme Pemerintah Orde Baru.⁵⁵ Terdapat perbedaan konsep antara UGM dengan rezim Orde Baru tentang

⁵² Wawancara dengan Baharuddin Aritonang, *Op.cit.*

⁵³ Wawancara dengan Drs. Bambang Praswanto, *Op.cit.*

⁵⁴ Singkatan dari Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong. Organisasi ini didirikan pada tahun 1957 yang menjadi cikal bakal Sekretariat Bersama Golkar pada tahun 1964.

⁵⁵ Wawancara dengan Drs. Bambang Praswanto, *Op.cit.*

ketahanan nasional. UGM berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ketahanan nasional adalah seluruh rakyat itu sendiri, sedangkan Pemerintah Orde Baru berpendapat bahwa ketahanan nasional merupakan militerisme. Di tahun-tahun ini, orang-orang nasionalis sangat anti dengan Golkar dan juga sangat sedikit yang masuk ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Aktivistis Nasionalis UGM menolak sistem tiga partai yang dicanangkan. Pemerintah Orde Baru karena mereka menilai bahwa sistem tersebut hanyalah strategi politik akomodatif dari Presiden Soeharto.⁵⁶

Memasuki tahun 1978, konflik antara kubu Islamis dan kubu kebatinan semakin memuncak. Kubu Islamis bahkan sempat *walkout* dalam sidang MPR tahun 1978. Yang menarik pada tahun ini adalah, bahwa bahkan gerakan kekecewaan mahasiswa yang tadinya hanya membidik Ali Moertopo dan Jenderal Soemitro cs. saja, kali ini beralih langsung menuju Presiden Soeharto.⁵⁷ Gerakan kekecewaan tersebut terutama muncul dari kampus ITB di Bandung. Gerakan tersebut diinisiasi dan dimotori oleh HMI (kubu Islamis).

Menurut Drs. Bambang Praswanto, terdapat empat penyebab yang mengakibatkan terakumulasinya gerakan kekecewaan mahasiswa di tahun 1978. **Pertama**, Pemerintah Orde Baru semakin pro-Aliran Kepercayaan yang dibawa oleh kubu kebatinan. Hal ini akhirnya membuat gerakan mahasiswa Islamis (HMI, PMII, dan IMM) mengambil sikap oposisi terhadap Pemerintah. **Kedua**, Pemerintah Orde Baru semakin pro-kapitalis asing yang membuat gerakan nasionalis (GMNI) terus konsisten beroposisi terhadap Presiden Soeharto. **Ketiga**, terdapat momentum Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 1977 dengan kembali terpilihnya Soeharto sebagai presiden untuk ketiga kalinya. Dan **keempat**, maraknya perilaku koruptif keluarga Cendana dan kroni-kroninya.⁵⁸

Ketika bertemu dengan momentum suhu politik nasional yang memanas di tahun 1978, Dema UGM mengangkat isu anti-Presiden

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Wawancara dengan Prof. Ichlasul Amal, *Op.cit.*

⁵⁸ Wawancara dengan Drs. Bambang Praswanto, *Op.cit.*

Soeharto dan korupsi yang dilakukannya.⁵⁹ Rektor UGM ketika itu, Prof. Sukadji, mendukung sikap berani Dema UGM secara tidak langsung. Di dalam Dema sendiri, kutub merah dan kutub hijau mulai bersatu dalam Dema UGM dalam menolak terpilihnya Soeharto menjadi Presiden kembali.

Presiden Soeharto yang semula menggunakan pendekatan dialog dan negosiasi dengan gerakan mahasiswa, akhirnya menganggap gerakan mahasiswa telah melakukan pembangkangan terhadap pemerintah. Akhirnya ia memakai pendekatan represif dengan menerjunkan militer masuk kampus. Karena hal itu, bahkan sempat terjadi bentrok antara aktivis Dema UGM dengan militer seperti terjadinya penembakan di Fakultas Ilmu Budaya, yang juga terjadi di Gelanggang Mahasiswa UGM.⁶⁰ Untuk itu, para aktivis Dema banyak melakukan aksi penolakan militerisme. Isu penyerbuan militer ke kampus UGM pada 25-27 Februari 1978 tersebut telah menjadi isu nasional, yang kemudian disanggah oleh Militer bahwa kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dari pihak mahasiswa.⁶¹

Tidak hanya tentara masuk kampus, rezim Orde Baru pun mengeluarkan SK dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef, yang berisi pembubaran Dema di universitas se-Indonesia dan menerapkan sistem Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK). Sistem tersebut dimaksudkan mengontrol aktivisme mahasiswa di kampus agar kembali ke dunia akademis saja, dan tidak menerjunkan diri dalam hal-hal yang bersifat politis (Budiyarso, 2000: 147, 216, 226, 231). Ketika itu, kondisi politik nasional diwarnai oleh kuatnya dwifungsi ABRI yang menguasai semua posisi strategis birokrasi dan politik.

3.3 Pembekuan Gerakan (1979-1987)

Setelah terbitnya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai NKK/BKK, Pemerintah Orde Baru berlaku lebih represif

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Wawancara dengan Prof. Ichlasul Amal, *Op.cit.*

⁶¹ Lihat Surat Kabar Berita Nasional Yogyakarta edisi 10 Maret 1978 hal 2-3.

terhadap gerakan mahasiswa. Rektor dan jajarannya dijadikan tangan-tangan pemerintah untuk mengontrol dan membatasi aktivisme mahasiswa di kampus-kampus.⁶² Sementara itu, Dema UGM telah dibubarkan begitu juga dengan Dema-Dema di kampus lain. Menurut Prof. Dr. Sutaryo, NKK/BKK mematikan gerakan ideologi mahasiswa di UGM saat itu. GMNI dan gerakan ekstra lainnya mengalami penurunan aktivisme dan peran. Pada waktu itu organisasi minat bakat intra-universitas lebih eksis dan berkembang daripada organisasi ekstra-universitas.⁶³

Prof. Dr. Sutaryo menambahkan bahwa, terdapat pelencengan konsep antara “penalaran” dan “bersatunya” universitas dengan mahasiswa dalam NKK/BKK jika dikomparasikan dengan filosofi “kekeluargaan” dalam UGM dari era 1946-1960. Hal tersebut dikarenakan:⁶⁴

1. Praktik demokrasi Barat dimasukkan bulat-bulat ke dalam kebijakan tersebut. Hal itu membuat Rektor, Universitas, dan mahasiswa merupakan organ-organ tersendiri yang secara ideologis maupun kepentingan pragmatis terkadang menjadi diametral. Tidak seperti dalam filosofi “kekeluargaan” yang semestinya menjadikan Dosen dan mahasiswa satu kesatuan organisme dan gerak.
2. NKK/BKK mengharuskan mahasiswa mengembalikan fungsinya kepada penalaran *an sich* tanpa harus mengurus permasalahan bangsa dan negara. Padahal sejak zaman dahulu, universitas dan mahasiswa selalu turut serta mengurus permasalahan Indonesia.
3. Akhirnya NKK/BKK hanya menjadikan mahasiswa sebagai pangsa pasar dan kuli pasar. Ketika itu terkenal konsep “*link and match*” yang menghubungkan kompetensi mahasiswa dengan kebutuhan pasar (*market oriented*). Dari sana kemudian dikenal istilah Sumber Daya Manusia dalam dunia pekerjaan. Universitas hanya menghasilkan pion-pion pembangunan kapitalis asing.

⁶² Wawancara dengan Prof. Ichlasul Amal, *Op.cit.*

⁶³ Wawancara dengan Prof. Dr. Sutaryo, *Op.cit.*

⁶⁴ *Ibid.*

Karena itu, budaya aktivisme mahasiswa UGM pun terpaksa berubah mengikuti betapa represifnya kebijakan NKK/BKK tersebut. Beberapa mulai mengalihkan aktivitas ke organisasi intra-universitas seperti Unit Kegiatan Mahasiswa Seni dan Olahraga, juga organisasi-organisasi bawah tanah yang dibentuk. Kecenderungan gerakan ekstra-universitas mulai berkurang seiring munculnya mahasiswa baru di kampus.

3.3.1 Gerakan Underground

Secara kelembagaan, Dema dan Kodema di UGM telah dibubarkan. Namun di tingkat fakultas, masih terdapat Senat Mahasiswa yang memiliki fungsi legislatif. Akibat tekanan dari militer dan Pemerintah Orde Baru sekitar tahun 1979 hingga 1981, gerakan mahasiswa mengalami guncangan dan trauma politik sehingga gerakan mahasiswa tidak lagi berorientasi politik seperti pada periode sebelumnya, dan mulai beralih ke arah studi *an sich*. Senat Mahasiswa yang ada di Fakultas hanya berperan sebagai legislator yang menjembatani mahasiswa pada Fakultas dengan cara menjadi perpanjangan tangan atau “aparatus” dari Fakultas. Mahasiswa tidak mungkin melakukan kritik dan beroposisi dengan Universitas maupun Pemerintah.⁶⁵

Di tingkatan fakultas, Senat Mahasiswa pun tidak begitu dominan, bahkan posisinya setara dengan Keluarga Mahasiswa (KM) di Jurusan-jurusan. Senat Mahasiswa tiap fakultas memiliki agenda sendiri yang tidak terkoordinasi dengan fakultas lainnya. Meskipun tetap terbentuk koordinasi di tingkatan universitas tetapi melalui jalur informal, yaitu melalui gerakan ekstra-universitas seperti GMNI, HMI, dan gerakan lainnya. Secara legitimasi, mahasiswa di Fakultas lebih antusias ke KM daripada pada Senat Mahasiswa, sedangkan mahasiswa di tingkatan universitas lebih antusias ke UKM yang ada di Gelanggang.⁶⁶ Ketua KM dipilih secara

⁶⁵ Wawancara dengan Tri Kuntoro, Ph.D, di Fakultas MIPA Selatan, pada 19 November 2012. Beliau pernah menjadi aktivis Menwa UGM dan Keluarga Mahasiswa Fisika pada 1979, Ketua Theater Gama tahun 1980, Ketua Swagayugama tahun 1982, dan Softball UGM. Sekarang menjadi dosen Jurusan Fisika Fakultas MIPA UGM dan pembina beberapa UKM di Gelanggang Mahasiswa.

⁶⁶ *Ibid.*

umum di setiap jurusan, dan kemudian Senat Mahasiswa Fakultas dipilih secara tidak langsung oleh perwakilan KM-KM. Calon pimpinan Senat Mahasiswa Fakultas tersebut dinominasikan oleh KM-KM. Karena itu posisi Senat tidak begitu kuat secara politik di Fakultas. Terlebih, posisi KM terkadang memiliki kekuatan eksternal dan jaringan yang melebihi Senat, sehingga pelan-pelan peran Senat meredup.⁶⁷

Meski aktivisme mahasiswa UGM pada waktu itu lebih dominan ke arah *study oriented* dan hal itu terjadi lagi hingga tahun 1986, namun perlahan aktivisme non-akademik para mahasiswa semakin meningkat. Gerakan mahasiswa akhirnya lebih dominan bergerak di lembaga-lembaga intra-universitas seperti Unit Kegiatan Mahasiswa dan membentuk kelompok studi. Di UGM sendiri, terdapat kurang lebih 40 kelompok studi.⁶⁸ Kelompok-kelompok studi itu diorganisir secara rahasia dan *underground*, serta terkadang dibiayai secara patungan dari anggotanya. Pernah suatu ketika, salah satu dari kelompok studi itu mengangkat isu “Makam Bu Tien Soeharto” yang menelan biaya sangat tinggi.

Di antara aktivisme yang berkembang dan sangat diuntungkan pada waktu itu adalah Resimen Mahasiswa (Menwa) UGM. Menurut Tri Kuntoro, Ph. D, Menwa pada waktu itu sangat didukung dan menjadi bagian dari Militer.⁶⁹ Menwa didirikan dari SK yang dikeluarkan oleh tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri sehingga pendanaannya pun disokong oleh tiga kementerian tersebut. Tujuan dari didirikannya Menwa adalah untuk membentuk manusia-manusia yang mempunyai jiwa dan semangat kepemimpinan, menjadi rakyat terlatih, dan memahami bela negara. Dengan begitu, Menwa mendapat kesempatan untuk dididik kemiliteran.⁷⁰

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Wawancara dengan Prof. Ichlasul Amal, *Op.cit.*

⁶⁹ Wawancara dengan Tri Kuntoro Ph.D, *Op.cit.*

⁷⁰ *Ibid.*

Ketika itu memang ada anggapan bahwa Menwa adalah bagian dari intel Militer untuk mengawasi gerakan mahasiswa. Hal tersebut dibenarkan oleh Tri Kuntoro Ph.D yang mendapatkan informasi bahwa terdapat banyak intel mahasiswa di UGM, di setiap fakultas dipastikan terdapat satu orang intel, dan dalam prediksi lanjutan diduga setidaknya ada satu orang lagi di tiap jurusan, dan bahkan di tiap angkatan jurusan pun demikian.⁷¹ Fungsi intel mahasiswa tersebut adalah untuk mengawasi aktivisme gerakan mahasiswa di kampus.

3.3.2 Matinya Gerakan Ekstra-Universitas

Perlahan tapi pasti, gerakan ekstra-universitas semakin kehilangan konstituennya. Kebijakan NKK/BKK dan aksi represif Orde Baru memang sangat menekan aktivitas politik ekstra-universitas. Menurut Tri Kuntoro Ph.D, terdapat beberapa penyebab matinya gerakan ekstra-universitas pada periode ini.⁷²

1. Kematian gerakan ekstra itu terjadi secara alamiah, dikarenakan mahasiswa dikondisikan untuk tidak mempunyai waktu luang sehingga menuntut mereka lebih berfokus pada beban akademiknya. Bisa dikatakan ini disebut sebagai rekayasa sosial rezim Orde Baru.
2. Posisi gerakan ekstra yang semakin tidak berfungsi. Bagi aktivis mahasiswa yang hendak terjun berpolitik pada waktu itu, hanya terdapat tiga pilihan partai politik yang terdiri dari PPP, Golkar, dan PDI. Sedangkan bagi mereka yang tidak berminat ke politik akan memilih fokus pada studinya di kampus.
3. Sebenarnya hingga pertengahan dekade 1980-an masih ada gerakan ekstra yang berusaha mengkritisi pemerintah dan kebijakan NKK/BKK. Namun Senat Mahasiswa Fakultas sebagai perpanjangan tangan Fakultas berusaha memurnikan kampus dari gerakan ekstra sehingga perlahan gerakan ekstra pun semakin tereduksi dan hilang.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

4. Adanya faksionalisasi dalam tubuh organisasi ekstra pada waktu itu, yang berujung melemahkan secara internal pihak mereka sendiri. Sebagai contoh adanya kasus perpecahan dalam HMI yang terbagi menjadi HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) dan HMI Dipo.

Kekuatan ideologi GMNI dengan ideologi nasionalismenya sebenarnya masih ada di UGM yang notabene menjadi “sarang” Marhaenisme pada waktu itu kendati secara pengaruh politik gerakan tampak mulai meredup. Menurut Tri Kuntoro Ph.D, hal tersebut dikarenakan konsep Marhaenisme dengan Pancasila Soeharto sebenarnya serupa.⁷³ Persoalannya adalah rezim Orde Baru membuat Pancasila sebagai komoditas untuk melanggengkan kekuasaan. Karena itu, wajar apabila aktivis GMNI bersikap sangat kontra terhadap Orde Baru, terlebih dengan tidak diakuinya Soekarno sebagai perumus Pancasila. Orde Baru melakukan distorsi sejarah lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni menjadi Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober.

Sementara itu, hubungan rezim Orde Baru dengan gerakan Islam sangat tegang. Ketika itu marak rekayasa rezim terhadap gerakan Islam dengan adanya istilah Komando Jihad dan sejenisnya. Bahkan secara ideologis, rezim Orde Baru menekan gerakan Islam dengan adanya penerapan asas tunggal Pancasila.

Sebenarnya pasca-NKK/BKK, gerakan HMI masih bertahan dan melakukan aktivisme di kampus-kampus. Namun, karena dinamika dan rekayasa dari rezim Orde Baru, sebagian aktivis mengkristal dan mengarah pada radikalisasi ideologi. Faksi dari HMI yang radikal itu menolak diberlakukannya asas tunggal Pancasila. Pada 1986, HMI pecah menjadi dua menjadi HMI MPO yang menolak asas tunggal dan HMI Dipo yang menerima asas tunggal.

Sementara itu ada juga eksponen-eksponen PMII dan IMM yang sama-sama ditekan oleh Orde Baru. Perlahan tapi pasti, gerakan ekstra-universitas dihapuskan di UGM. Tidak hanya gerakan Marhaenis tetapi juga gerakan Islam, karena setiap ada

⁷³ *Ibid.*

gerakan ideologis di mahasiswa mereka dipastikan akan dicitrak dan diberangus oleh militer.

3.3.3 Munculnya Gerakan Dakwah Kampus sebagai Alternatif Aktivisme Mahasiswa

Setelah menghilangnya pengaruh gerakan ekstra di UGM, beberapa eksponen gerakan Islam mulai menginisiasi gerakan dakwah baru yang sebenarnya sudah mulai dirintis sejak tahun 1975-1979 oleh Muslih Zaenal Asikin, dkk.⁷⁴ Gerakan ini memiliki ciri khas yaitu tidak menunjukkan sisi-sisi ideologis, tidak mengedepankan organisasi induk gerakannya (Muhammadiyah, NU, Masyumi, dll), dan lebih mengedepankan kegiatan keagamaan konkret di kampus. Hal tersebut muncul sebagai rasa kesadaran dan bentuk kritik terhadap menurunnya kegiatan keagamaan di kampus. Akhirnya gerakan tersebut dimulai dengan dibentuknya Jamaah Shalahuddin UGM pada 1979.

Jamaah Shalahuddin (JS) pada waktu itu seakan menjadi *melting pot* bagi mahasiswa Islam di UGM. Gerakan-gerakan Islam di dalamnya sangat beririsan satu dengan yang lain. Pendirinya terdiri dari tokoh mahasiswa Islam bernama Muslich Zainal Asikin yang berlatar belakang Ahmadiyah dari FT-Sipil, Muhammad Fanani yang berlatar belakang Muhammadiyah dari FT-Arsitektur, dan juga Syamhari Baswedan yang berlatar belakang keturunan Arab dari FE.⁷⁵ Gerakan yang dibangun JS pada 1980-an awal lebih cenderung ke arah intelektualisme dan *high politics*. Hal tersebut dikarenakan adanya tindakan represif rezim Orde Baru terhadap mahasiswa yang melakukan gerakan politik di kampus. JS sering mengadakan kajian yang mengundang tokoh-tokoh Islam kampus pada waktu itu seperti Amien Rais, Bang Imaduddin Abdulrahim dari ITB, Sairul Alim, dan Hidayat Nataatmaja.⁷⁶

⁷⁴ Wawancara dengan Dr. Sukamta, di kantornya pada tanggal 24 Januari 2013. Beliau adalah aktivis mahasiswa UGM tahun 1985-1990, pernah menjabat sebagai Ketua Jamaah Shalahuddin UGM tahun 1988.

⁷⁵ Syamhari Baswedan adalah paman dari Anies Baswedan yang menjadi aktivis Senat Mahasiswa UGM di tahun 1990.

⁷⁶ Wawancara dengan Dr. Sukamta, *Op.cit.*

Tidak hanya topic mengenai intelektualisme yang diangkat, gerakan populisme pun mulai digalakkan. Ketika itu JS bersikap sangat “cair” terhadap UKM-UKM lain di Gelanggang dengan mengadakan pentas seni, teater, pembacaan puisi, dan lainnya. JS sering mengundang penyair-penyair nasional seperti Ebiet G. Ade, Emha Ainun Nadjib, dan Dewi Yul. Bersamaan dengan itu, Amien Rais menggagas pendirian Pondok Pesantren Mahasiswa Boedi Moelya sebagai hasil dari interaksinya dengan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII). Amien sangat dekat dengan JS dan mulai dikenal disana.⁷⁷ Ada juga tokoh keagamaan bernama Ustadz Suprpto Ibnu Juraimi sebagai Pemimpin Pondok Pesantren yang banyak mengajarkan pemahaman tata cara ibadah di UGM. Beliau adalah seorang Muhammadiyah yang cenderung bergerak di ranah aliran sufisme.

Karena itu hingga tahun 1986, JS menjadi *melting pot* aktivisme gerakan Islam di UGM. JS telah bermetamorfosis dengan adanya kematangan keagamaan di internalnya. Hal tersebut dikarenakan dulu pada periode 1979-1980-an, aktivis JS adalah mereka yang sudah matang di organisasi masyarakatnya masing-masing, sedangkan generasi kedua ini menemukan kematangannya sendiri. Di kampus, mereka memiliki semboyan, “kita tidak mencetak ustadz, tetapi menjadi pelayan-pelayan untuk kegiatan keagamaan.”⁷⁸

Selama kurun 1980-1986, hubungan antara aktivis Islam dengan negara terbilang sangat tegang. Puncaknya adalah adanya pembantaian umat Islam di Tanjung Priok dan Tamansari Lampung pada 1986 dan 1987.⁷⁹ Dalam waktu yang bersamaan, gerakan keagamaan non-politik yang dibangun oleh JS sudah menguat di UGM, dengan munculnya Studi Kerohanian Islam (SKI) di fakultas-fakultas, musala-musala, dan juga Keluarga Muslim Jurusan. Di tingkatan fakultas, aktivisme tersebut bersifat non-struktural dan lebih menyerupai paguyuban.⁸⁰ Gerakan dakwah kampus itu tidak bisa lepas dari peran eksponen-eksponen organisasi ekstra, seperti

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

HMI, IMM, PMII, termasuk sebagian anggota GMNI yang terlibat, dan terlebih mahasiswa-mahasiswa muslim yang tidak berafiliasi apapun.

Ketika itu, JS masih memfokuskan aktivismenya di Gelanggang Mahasiswa, karena ketika itu belum ada Masjid Kampus UGM. Sasaran dakwahnya adalah mahasiswa dan dosen secara umum, yang tidak ada latar belakang keagamaannya sama sekali. Kegiatan yang digagas berupa Salat Jumat di kampus, dialog, menghadirkan tokoh-tokoh besar, dll. Aktivismenya sangat kental dengan kegiatan bernuansa ritual dan juga peningkatan ilmu.⁸¹ Ketika itu aktivisme di Gelanggang sangat melebur untuk membesarkan JS, seperti UKM Teater, Band, paduan suara, dll. Ketika malam pertama tarawih, mereka selalu mengundang rektor yang menjabat untuk diminta memberikan ceramah. Jadi, JS menemukan momentum gerakannya karena adanya kebutuhan dan kerinduan akan adanya kegiatan keagamaan di UGM, yang ketemu dengan situasi pemerintah yang represif.

Pada kurun 1984-1985, aktivis-aktivis HMI yang punya memiliki kedekatan religiositas lebih kental ketimbang yang lebih senang di politik kampus muncul dengan model pembentukan kader baru sesuai konsep yang dihimpun dari Jakarta yang disebut Pengkajian Nilai-nilai Dasar Islam (PNDI). Sebagian dari mereka yang kemudian menjadi alumni PNDI memperdalam Islam dengan nyantri *kalong*⁸² (kebanyakan di Ponpes Pabelan Magelang), sebagian yang lain menginisiasi dan membentuk Asistensi Agama Islam (AAI) di UGM.⁸³

Pada periode 1986-1987, AAI disnergikan dengan JS sebagai koordinatornya. Pada 1987 pernah dilakukan survei untuk melihat urgensi dari adanya AAI di UGM. Hal tersebut dilakukan sebagai respons atas bermacam-macam pendapat tentang keberadaan AAI. Kesimpulan dari survei tersebut adalah mata kuliah

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Nyanti *kalong* adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat santri untuk mereka yang memperdalam keilmuan Islam di pesantren namun tidak tinggal (*mondok*) di sana.

⁸³ *Ibid.*

Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari hanya beberapa Sistem Kredit Semester (SKS) itu dirasa tidak memadai. Survei tersebut menyimpulkan bahwa AAI masih diperlukan karena pada realitanya, mata kuliah PAI diampu oleh jumlah pengajar yang minim dan dengan pengajaran yang tidak efektif.

AAI akhirnya diusulkan ke Prof. Koesnadi Hardjosoemantri yang menjabat sebagai Rektor UGM pada waktu itu. Prof. Koesnadi mengizinkan dan bahkan menyetujui program tersebut untuk dikelola di tingkat universitas dan diterapkan di seluruh fakultas. Koesnadi pun menyetujui pula bahwa AAI itu bisa memasukkan komponen nilai dalam akademik. Di tahun 1989, akhirnya AAI itu dikoordinasi oleh pihak universitas dengan JS menjadi jangkarnya, serta didukung oleh asisten-asisten di fakultas. Asisten tersebut berasal dari berbagai macam latar belakang gerakan, seperti HMI, PMII, IMM, dll.⁸⁴

3.3.4 Munculnya Gerakan Tarbiyah

Menurut Prof. Ichlasul Amal, sekitar tahun 1987 hingga 1988 mulai menguat pengajian mahasiswa di UGM, terutama di Fakultas Teknik.⁸⁵ Hampir semua pengajian mahasiswa tersebut hampir semua diinisiasi oleh aktivis-aktivis Tarbiyah yang terkena pengaruh mahasiswa yang baru kembali dari studi di Madinah dan Timur Tengah. Pemikiran mereka terilhami tokoh pembaharu Islam di Mesir bernama Hasan Al-Banna yang terpengaruh pemikiran reformisme-modernisme Islam. Mereka memulai gerakan dengan metode pendidikan melalui *harakah* (pergerakan).⁸⁶ Metode pengorganisasian mereka menggunakan sistem sel berlapis yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengikuti jenjangnya.⁸⁷ Pada tahun-tahun tersebut, gerakan Tarbiyah di UGM mulai memasuki masa rintisan.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Wawancara dengan Prof. Ichlasul Amal, *Op.cit.*

⁸⁶ Wawancara dengan Prof. Dr. Sutaryo, *Op.cit.*

⁸⁷ *Ibid.*

Pada waktu itu generasi JS awal yang cenderung berwacana tentang intelektualisme dan populisme dakwah Islam (generasi tahun 1979-1986) sudah mulai lulus dan menghilang di kampus, digantikan dengan generasi angkatan 1985-an yang lebih berhaluan metodologis dalam gerakan Islam. Dalam momentum itulah aktivis Tarbiyah masuk ke UGM dengan generasi pertamanya di angkatan 1985.⁸⁸ Ketika itu gerakan Tarbiyah hanya memiliki beberapa orang kader saja. Sebagai sebuah kesadaran baru, Tarbiyah mulai membentuk kader dan menata gerakan.

Sebelum tahun 1989, konten kajian Tarbiyah masih lepas dan bisa berasal dari gerakan Islam mana saja. Namun, begitu memasuki tahun 1989, kurikulum pergerakan mereka mulai diatur. Gerakan Tarbiyah berkembang hampir di semua fakultas di UGM ketika itu, terutama di Fakultas Teknik. Gerakan ini banyak didukung oleh dosen-dosen pro-gerakan dakwah kampus di fakultas, misalnya di ada Koento Widjojo dan Adaby Darban di Fakultas Sastra.⁸⁹

Gerakan Tarbiyah mulai menguat di UGM pada periode 1992-1993. Menguatnya gerakan Tarbiyah dibarengi dengan menguatnya pengaruh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Pemerintah, terutama setelah Pemilu 1992. Bahkan ada yang menyebut kabinet Soeharto pada waktu itu sebagai Kabinet ICMI.⁹⁰ Istilah “gerakan Tarbiyah” tidak dikenal di kalangan aktivis mahasiswa pada saat itu. Hal tersebut dikarenakan gerakan Tarbiyah tidak memiliki identitas politik yang formal dan jelas pada waktu itu, bahkan lebih disebut sebagai OTB (Organisasi Tanpa Bentuk) oleh Orde Baru. Barulah pasca-1998, istilah “gerakan Tarbiyah” mulai dikenal.

3.4 Kebangkitan Gerakan (1987-1998)

Dalam periode ini, aktivisme mahasiswa UGM mulai menemukan format baru gerakannya. Cengkeraman NKK/BKK berhasil mengakibatkan matinya gerakan ekstra-universitas yang

⁸⁸ Wawancara dengan Dr. Sukamta, *Op.cit.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

menjadi jantung pergerakan di lembaga mahasiswa di Universitas. Namun, ada temuan yang menarik seiring matinya gerakan ekstra-universitas tersebut, di mana ditemukan semangat Islamisme secara simultan justru mengalami eskalasinya. Kekuatan gerakan mahasiswa Islam ini seakan menjadi aktivisme sekaligus menjadi gerakan oposisi alternatif yang mengisi kekosongan gerakan mahasiswa. Terlebih ketika itu bermunculan gerakan pemikiran pembaharu Islam di kampus-kampus.

Kebangkitan gerakan mahasiswa Islam tersebut akhirnya membangkitkan kesadaran politik mahasiswa yang sudah hampir 14 tahun “mati”. Usaha-usaha pembentukan aktivisme di Universitas pun mulai digagas, di tengah-tengah perpecahan dan konflik yang terjadi di internal rezim Orde Baru. Kebangkitan tersebut pada akhirnya terakumulasi dengan adanya Gerakan Reformasi 1998 yang berhasil memaksa Presiden Soeharto mundur dari jabatan.

3.4.1 Menguatnya Gerakan Mahasiswa Islamis di UGM

Pada periode 1987 hingga 1989, terdapat beberapa peristiwa yang memicu bangkitnya gerakan dakwah kampus menjadi lebih politis dan ideologis. Ketika itu ada seorang ustadz yang sangat populer baik di kampus maupun di masjid-masjid sekitar kampus, bernama Ustadz Fathul Hilal. Beliau mempelajari Islam secara otodidak dan tidak berafiliasi dengan Ormas Islam apapun. Namun di tahun 1988, secara tiba-tiba beliau masuk ke dalam gerakan Syi'ah dan melakukan kajian-kajian di kampus dengan menjelek-jelekkan Islam Sunni.⁹¹ Kejadian tersebut langsung direspons oleh aktivis Islam intra-universitas. Hal tersebut dikarenakan aktivis Islam intra-universitas pada waktu itu lebih mengedepankan harmoni antar gerakan, karena di dalamnya terdapat bermacam-macam gerakan mahasiswa Islam seperti HMI, IMM, PMII, dll. Maka, ketika ada wacana yang berbau ideologis seperti yang dibawa Ustadz Fathul Hilal tersebut, wacana tersebut dapat menjadi sangat sensitif dan bisa merusak harmoni gerakan Islam yang sudah terbentuk.

⁹¹ Wawancara dengan Dr. Sukamta, *Op.cit.*

Pada akhirnya JS berkoordinasi dengan DDII untuk melakukan kajian intensif tentang Syi'ah di kampus dalam rangka membendung gerakan Ustadz Fathul Hilal tersebut. Karena itu, kajian-kajian ke-Islam-an menjadi menguat dan aktivis-aktivis JS mulai berkenalan dengan kitab-kitab rujukan Islam yang sangat ideologis.⁹² Religiositas yang tadinya hanya merupakan praktik ritual ibadah saja dan aktivitas JS yang tadinya hanya berupa pelayanan kegiatan keagamaan saja, akhirnya bergeser menjadi gerakan kajian-kajian yang lebih mendalam dengan rujukan kitab-kitab Islam yang kontemporer. Apalagi ketika itu buku-buku pemikiran Islam dari Timur Tengah mulai menguat masuk dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Beberapa buku tersebut ada yang berasal dari pemikiran Islam seperti al-Ikhwan al-Muslimun di Mesir, Jami'at Islami di Pakistan, dan Ali Syari'ati di Iran.⁹³ Lantaran pasokan bacaan tersebut, aktivis-aktivis JS mulai mengadopsi beberapa metode berpikir dan pergerakannya dilandasi dari gerakan pembaharu Islam di luar negeri tersebut.

Kondisi tersebut semakin diperkuat dengan adanya jaringan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) se-nasional yang telah dilakukan sebelumnya. Pada 1986, diselenggarakan silaturahmi LDK pertama di Indonesia. Silaturahmi tersebut dihadiri oleh 6 perwakilan kampus, yaitu JS dari UGM, al-Ghifarry dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Salman dari ITB, Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Diponegoro (Undip), dan Universitas Airlangga (Unair).⁹⁴ Memang belum semua eskponen aktivis LDK itu terorganisasi secara formal menjadi lembaga yang diakui di universitasnya masing-masing, dan beberapa di antaranya justru belum terlembaga, dan hanya mengatasmakan gerakan dakwah kampus saja. Pada 1987, diselenggarakan silaturahmi LDK II di UGM di University Club. Ketika itu, disinyalir mulai muncul kekuatan Hizbut Tahrir di LDK Al-Ghifarry IPB yang menguat hingga tahun 1988.

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

Pada 1988, dilakukan silaturahmi LDK kembali di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Dalam silaturahmi tersebut, diputuskanlah nama Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK).⁹⁵ Karena pengaruh Orde Baru di UNS sangat kental, agenda silaturahmi FSLDK tersebut dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Hadirnya Menpora itulah yang kemudian memicu kembali ketegangan yang luar biasa antara FSLDK dengan negara. Hal tersebut dikarenakan hampir semua LDK di kampus-kampus bersikap sangat anti-Orde Baru. Untuk menghindari intervensi dari pemerintah, akhirnya dalam forum tersebut muncul ide untuk membentuk *khithah* (garis besar haluan organisasi) dalam rangka membentuk rencana strategis gerakan dakwah kampus yang tidak terkooptasi oleh rezim.

Yang kemudian ditunjuk menjadi tim perumus *khithah* adalah aktivis-aktivis dari al-Ghifarry IPB. Namun ternyata setelah tersusun, isi dari *khithah* FSLDK tersebut sangat kental dengan ideologi Hizbut Tahrir.⁹⁶ Karena itu, sempat terjadi ketegangan di internal FSLDK sehingga pada saat berlangsungnya silaturahmi FSLDK pada 1989 di Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, dalam pembahasan untuk meresmikan *khithah*, situasi terbilang sangat tegang dan penuh dengan dialektika. FSLDK telah menjadi arena kontestasi antara kekuatan al-Ghifarry IPB yang berusaha memasukkan ideologi HTI, di mana JS UGM dan Salman ITB sangat menolak hal tersebut.⁹⁷

Karena itu, pergulatan-pergulatan tersebut mematangkan kesadaran politik aktivis-aktivis JS. Mereka jadi mengenal HTI, Syi'ah, al-Ikhwan al-Muslimun, termasuk juga gerakan lokal seperti Masyumi, Muhammadiyah, dan NU. Ketika itu, FSLDK sudah memiliki anggota hingga tingkatan nasional. Saking menguatnya pengaruh FSLDK di kampus-kampus di Indonesia, silaturahmi di Unibraw tersebut sampai dijaga oleh panser dan tank Militer.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

Karena itu menurut Dr. Sukamta, dapat disimpulkan bahwa kebangkitan gerakan mahasiswa Islam di UGM pada tahun 1987-1989 lebih terpicu karena:⁹⁸

1. Sebagai respons dari adanya gerakan Syi'ah dari Ust. Fathul Hilal di UGM dan gerakan HTI di IPB, muncul kajian-kajian ideologis gerakan Islam di JS yang diperkuat dengan narasumber dari DDII. Kajian tentang Syiah itu mengkaji materi ideologis, sedangkan kajian mengenai HTI itu lebih mengkaji tentang materi metodologisnya. Hal itu menyebabkan aktivis JS mulai mengenal gerakan Islam kontemporer yang ada di dunia.
2. Religiositas yang meningkat dengan adanya buku-buku pemikiran dan metodologi gerakan Islam yang diterjemahkan dari Timur Tengah.
3. Bangkitnya gerakan Islam di kampus itu sebagai simbol perlawanan dan respons atas aksi represif Orde Baru.

Juga pada rentang 1987-1989, cukup menegang soal simbolisasi agama, salah satunya adalah mengenai jilbab/ kerudung.⁹⁹ Dapat ditelusuri dalam sejarah bahwa di tahun 1983 sangat sedikit mahasiswi UGM yang mengenakan jilbab. Hingga tahun 1987, orang-orang yang mengenakan jilbab bisa terancam dikeluarkan dari sekolah ataupun universitas. Karena itu, JS pernah mengadakan kajian tentang jilbab, kampanye penggunaan jilbab untuk mahasiswi muslim, dan menyelenggarakan peragaan busana muslimah. Menurut Sukamta, eksponen GMNI pada tahun-tahun itu menjadi sedikit cair dengan gerakan keagamaan. Bahkan banyak di antara para aktivis Marhaenis yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan praktik keagamaan di kampus.¹⁰⁰

Pada rentang tahun 1990-1998, secara ideologi gerakan di UGM lebih menguat pada kekuatan “hijau”. Sementara itu, pengaruh dan dominasi “merah” yang sejak dahulu memegang Dema, mulai berkurang dan meredup.¹⁰¹ Menurut Prof. Dr. Sutaryo, salah satu

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Wawancara dengan Gatot Murdjito, *Op.cit.*

penyebab menguatnya gerakan Islam pada periode ini adalah lantaran didirikannya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada 1990. Dikarenakan hubungan pemerintah Orde Baru dengan mahasiswa sudah renggang, dibentuklah suatu ide baru sebagai politik akomodatif bagi umat Islam sehingga pemerintah memiliki satu kaki di tentara dan satu kaki di umat Islam. ICMI didirikan untuk merevitalisasi umat Islam demi mendukung Orde Baru. Pasca 1988, Pemerintah Orde Baru perlahan mulai merubah sikap menjadi lebih akomodatif terhadap umat Islam dikarenakan dihadapkan pada situasi bahwa Orde Baru membutuhkan dukungan umat Islam.¹⁰²

Namun, Prof. Dr. Sutaryo menambahkan, gerakan yang dibawa ICMI akhirnya menjadi bias ketika mereka melakukan Islamisasi di semua lini. Sebagai contoh, mulai maraknya pembangunan masjid-masjid di lingkungan pendidikan sedari tingkatan SD, SMP, SMA, hingga universitas, juga mulai dipakainya istilah “iman dan taqwa” atau biasa disingkat “imtaq” yang disandingkan dengan istilah “ilmu pengetahuan dan teknologi” yang disingkat “iptek”.¹⁰³ Pengaruh ICMI di UGM mulai menguat di kalangan mahasiswa dan terutama di kalangan dosen. Hal ini adalah konsekuensi dari kebutuhan dukungan politik Orde Baru atas kekuatan gerakan Islam pada waktu itu.

Sepanjang sejarahnya kemudian, ICMI telah berhasil memunculkan beberapa tokoh-tokoh politik yang berpengaruh, di antaranya adalah Bacharuddin Jusuf Habibie yang menjadi anak emas Presiden Soeharto. Habibie yang dinilai Presiden Soeharto memiliki otak yang “encer” dan loyal, diberikan dukungan oleh Soeharto untuk mendirikan PT. IPTN, perusahaan yang memproduksi pesawat terbang Nasional di Bandung. Namun, di sisi lain, ICMI pun memiliki tokoh yang malah mengkritisi pemerintah di antaranya adalah Amien Rais yang mulai kritis terhadap Orde Baru pada 1994 hingga 1996.

¹⁰² Wawancara dengan Prof. Dr. Sutaryo, *Op.cit.*

¹⁰³ *Ibid.*

Namun menurut Dr. Sukamta, selaku aktivis JS UGM pada waktu itu, pengaruh ICMI terhadap bangkitnya gerakan mahasiswa Islam terutama pada dekade 1990-an memang tak bisa dinafikan. Namun, kebangkitan gerakan mahasiswa Islam juga tidak bisa dipisahkan dari episode sepuluh tahun sebelum dibentuknya ICMI. Dalam kurun dekade 1980-an muncul ketegangan yang luar biasa antara umat Islam dengan Orba dikarenakan adanya asas tunggal Pancasila.¹⁰⁴ Konflik tersebut akhirnya berujung pada adanya peredaan politik dengan melunaknya gerakan Islam terhadap asas tunggal. Karena itu, di kampus-kampus termasuk juga di UGM, aktivis Islam sangat menghindari perbincangan mengenai asas tunggal sehingga gerakannya syarat akan intelektualisme dan populisme Islam saja, sebagaimana yang telah dijabarkan pada sub-bab sebelumnya. Jadi, menguatnya Islamisme di kampus itu sebagai respons atas tindakan represif negara.¹⁰⁵

Tambahnya, penyebab dibentuknya ICMI pun harus diperhatikan penyebabnya. Ketika itu kelompok Benny Moerdani menguat di militer dan mulai mengimbangi pengaruh Presiden Soeharto. Terutama pasca-Pemilu 1987, kelompok Benny Moerdani semakin menguat dengan menjadikan Tri Sutrisno sebagai wakil presiden. Berdasar persepsi mahasiswa ketika itu, Tri Sutrisno adalah kaki tangan dari Benny.¹⁰⁶ Akhirnya Presiden Soeharto ingin membuat penyeimbang dengan mencari “klien” baru. Soeharto mulai melirik intelektual mahasiswa muslim, apalagi gerakan mereka semakin matang dan menguat dengan adanya komunikasi di tingkatan nasional. Dikarenakan Soeharto membutuhkan kekuatan penyeimbang bagi kelompok Benny Moerdani, akhirnya dibentuklah ICMI untuk mengakomodasi gerakan Islam. Ketika itu Soeharto menempatkan B. J. Habibie sebagai Ketua ICMI. Intelektual muslim pun melihat sosok Habibie sebagai orang yang soleh dan bisa menjadi jembatan umat Islam kepada rezim supaya tidak diberangus.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Wawancara dengan Dr. Sukamta, *Op.cit.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

Karena itu, setelah dibentuknya ICMI, maka munculah euforia dari kalangan umat Islam di Indonesia. Dari sana muncu Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai monumen dari berkembangnya ICMI. BMI menjadi simbol bahwa negara sudah melegalkan perbankan yang berbasis syariah. Walaupun BMI masih belum lepas dari cengkeraman bank yang menggunakan sistem *riba* (bunga), tetapi pada waktu itu hal tersebut sudah menjadi politik akomodasi yang luar biasa bagi rezim Orde Baru. Bahkan di tahun-tahun tersebut mulai dicetuskan terbutnya koran yang menyuarakan aspirasi umat Islam yang di kemudian waktu dikenal sebagai Republika.¹⁰⁸

3.4.2 Menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa: Bangkitnya Politik Mahasiswa!

Kebangkitan gerakan mahasiswa Islam tersebut telah mengisi kosongnya aktivisme gerakan mahasiswa selama masa pemberangusan gerakan dengan diterapkannya kebijakan NKK/BKK di UGM. Memasuki akhir dekade 1980-an, kebangkitan gerakan mahasiswa Islam tersebut akhirnya berdampak pada adanya kesadaran untuk kembali menghidupkan Senat Mahasiswa UGM dan politik mahasiswa.¹⁰⁹ Menurut Prof. Ichlasul Amal, kemunculan kembali gerakan mahasiswa tersebut berhasil memunculkan tokoh-tokoh mahasiswa generasi baru di UGM, salah satu di antaranya adalah Anies Rasyid Baswedan.¹¹⁰ Hadirnya Anies sebagai tokoh mahasiswa ketika itu diusung dan merepresentasikan kesemua gerakan mahasiswa Islam yang ada di UGM pada waktu itu.¹¹¹

Ketika itu, Dema di tingkat universitas sudah dibubarkan dan hanya bertahan di Senat Mahasiswa Fakultas. Anies bersama beberapa aktivis mahasiswa lainnya seperti Muhammad Khoiri, Elan Satriawan, juga bersama Prof. Haryana selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan pada waktu itu merasa bahwa aktivisme mahasiswa

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Wawancara dengan Prof. Ichlasul Amal, *Op.cit.*

¹¹¹ Wawancara dengan Dr. Sukamta, *Op.cit.*

itu masih semu, jika tidak ada kegiatan di tingkat universitas.¹¹² Hal tersebut dikarenakan aktivisme mahasiswa hanya terkotak-kotak di fakultasnya masing-masing.

Oleh karena itu dibentuklah Forum Komunikasi (Forkom) Mahasiswa Universitas yang berisikan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas-fakultas. Forum tersebut dimaksudkan untuk menampung aspirasi dan menjadi alat koordinasi di tingkatan universitas. Anggota forum berkumpul setiap bulan dengan moderator yang digilir dari tiap perwakilan fakultas setiap pertemuannya. Hal tersebut dilakukan agar semua pihak dapat merasakan bagaimana memimpin di tingkatan universitas. Sebelum dilakukan pertemuan, moderator Forkom untuk pertemuan selanjutnya harus memberikan draf pembahasan kepada Wakil Rektor Kemahasiswaan untuk sekadar diberi masukan.¹¹³ Forkom Mahasiswa UGM ini berhasil mengadakan Gajah Mada Fair pada setiap Dies Natalis UGM dari tahun 1987-1988 bekerjasama dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).¹¹⁴

Pada 1988, akhirnya aktivisme Forkom tersebut berujung menjadi pembentukan cikal bakal Senat Mahasiswa Universitas Gajah Mada. Prof. Koesnadi Hardjosoemantri yang menjabat sebagai Rektor UGM pada waktu itu yang juga mantan aktivis Dema dahulu, merasa tidak keberatan dan bahkan mendukung pembentukan itu. Walaupun, menurut Prof. Haryana, pembentukan Senat Mahasiswa tingkat Universitas menyimpang dari kebijakan nasional.¹¹⁵ Pada 1990, akhirnya pembentukan Senat Mahasiswa Perguruan tinggi (SMPT) UGM disahkan oleh universitas dengan Prof. Dr. Mochammad Adnan sebagai Rektor.¹¹⁶

Pada 27-30 Januari 1992, Senat Mahasiswa UGM yang diketuai Muhammad Khoiri Umar dan Janoe Arjanti sebagai Ketua Badan

¹¹² Wawancara dengan Prof Haryana, *Op.cit.*

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Lihat Surat Kabar Yogya Post tentang "Kongres SM UGM Perlu Kearifan" edisi Minggu, 26 Januari 1992 hal 9.

Pekerja Senat Mahasiswa¹¹⁷ mengadakan Kongres Senat Mahasiswa UGM II di Kaliurang untuk kembali membahas restrukturisasi KM UGM.¹¹⁸ Maka dirumuskanlah penyebutan kembali nama organisasi kemahasiswaan dengan istilah “Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada” yang terdiri dari Senat Mahasiswa (Sema) Universitas Gadjah Mada yang memiliki fungsi legislatif dan normatif, dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang menjalankan fungsi eksekutif.¹¹⁹ Istilah Badan Eksekutif Mahasiswa atau biasa disingkat “BEM” tersebut kini banyak diadopsi dan dipakai hampir di semua kampus di Indonesia. Ketika itu, aktivis-aktivis UKM ingin “merdeka” dan tidak diatur dalam Senat Mahasiswa, tetapi tetap bersatu sebagai mahasiswa Gadjah Mada.¹²⁰

Memasuki dekade 1990-an, Sema mulai berani melakukan kritik terhadap universitas maupun Pemerintah Orde baru. Mereka sering mengadakan pentas ketoprak di Gelanggang Mahasiswa UGM.¹²¹ Pementasan tersebut dijadikan wadah aspirasi dan tempat mengkritik pemerintah secara tidak langsung. Ketika Anies Baswedan menjadi ketua Sema UGM di tahun 1992, dia sempat melakukan audiensi terhadap universitas dalam kasus dugaan penyelewengan dana KKN UGM. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UGM dianggap menyalahgunakan bunga dari iuran yang dibayar oleh mahasiswa.¹²² Kasus tersebut berakhir dengan adanya pembuktian tidak adanya penyelewengan itu dari pihak universitas kepada mahasiswa.

¹¹⁷ Lihat <http://ausmanmusa.wordpress.com/2012/09/24/organisasi-mahasiswa-ugm-dari-masa-ke-masa/> diunduh pada tanggal 6 Februari 2013.

¹¹⁸ Lihat Surat Kabar Bernas tentang “kongres SM UGM II Bahas Soal Akademik” edisi Senin, 20 Januari 1992 hal 2; Surat Kabar Kedaulatan Rakyat tentang “Mekanisme Organisasi SM-UGM Belum Tertata Secara Baku” edisi Kamis, 23 Januari 1992 hal 2; dan Surat Kabar Yogya Post tentang “SM UGM akan Benahi Problem Struktur pada Kongres II” edisi Kamis, 23 Januari 1992 hal 2.

¹¹⁹ Wawancara dengan Prof. Haryana, *Op.cit.*

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Wawancara dengan Gatot Murdjito, di kampus Fakultas Peternakan, pada tanggal 11 Oktober 2012. Beliau adalah mantan Ketua Kodema Fakultas Peternakan tahun 1974, Ketua Forum Komunikasi Putra-Putri ABRI (FKPPI) DIY tahun 1974, dan sempat tergabung dalam Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI).

¹²² *Ibid.*

Itu adalah hal menarik dari kepemimpinan Anies Baswedan, di mana Sema UGM memang mulai berani mengkritisi Universitas dan Pemerintah, dengan pilihan metode lebih kepada kajian dan gerakan intelektual. Di zaman kepemimpinannya, Sema UGM pernah melakukan peninjauan kembali terhadap rencana kenaikan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar 50 persen yang akan dilakukan oleh universitas. Kenaikan tersebut diambil karena jumlah subsidi dari pemerintah yang terbatas dengan terus meningkatnya jumlah satuan mahasiswa di UGM. Sema lebih memilih membentuk tim khusus untuk memberikan masukan dan berdialog kepada rektor mengenai masalah tersebut. Menurut Anies, masalah intern universitas tidak bagus jika diselesaikan dengan cara demonstrasi.¹²³

Sema UGM pun pernah melakukan penelitian mengenai monopoli cengkeh oleh Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang masih memiliki hubungan dengan Keluarga Cendana. Sema menjadikan para dosen UGM sebagai pendamping dari penelitiannya tersebut, di antaranya adalah Prof. Dr. Mubyarto, Dr. Yahya Muhaimin, Dr. Ir. Tumari Djati Leksono dari Fakultas Pertanian, dan Nur Hasan Ismail, S.H. dari Fakultas Hukum.¹²⁴

Ketua Sema UGM selanjutnya adalah Elan Satriawan yang menjabat pada 1994. Di zaman kepemimpinannya, terdapat pilihan metode gerak yang sedikit lebih keras daripada sebelumnya. Kembali di tahun ajaran tersebut, muncul rencana kenaikan SPP oleh universitas untuk menutupi subsidi pemerintah yang relative sedikit. Sema UGM menolak rencana kenaikan tersebut dengan alasan universitas seharusnya menekan pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana pendidikan bagi kampus, bukan semakin membebani rakyat, dalam hal ini mahasiswa dengan menaikkan pembayaran SPP. Sema UGM melakukan protes dengan mengadakan pembacaan puisi, diskusi, dan juga mimbar bebas di Bulevar UGM.¹²⁵

¹²³ Lihat Surat Kabar Suara Merdeka tentang "Ketua Sema UGM: Kenaikan SPP Perlu Ditinjau" edisi Rabu, 25 Maret 1992 hal 5.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Lihat Surat Pernyataan Sikap Sema UGM tanggal 21 Juni 1994 tentang rencana kenaikan SPP oleh Universitas Nomor 1st/SM-UGM/VI/94.

3.4.3 Gerakan Reformasi 1998

Menjelang tahun 1997, sekalipun terjadi euforia politik pada umat Islam, gerakan mahasiswa di UGM masih tetap dalam kondisi terkekang dan stagnan. Menurut Huda Tri Widiانا, aktivis BEM pada waktu itu, setelah era Anies Baswedan hingga menjelang tahun 1997, tidak ada gerakan mahasiswa yang cukup signifikan. Demo pertama kali dilakukan di tahun 1997 yang hanya diikuti tujuh orang mahasiswa saja. Sedangkan di tingkat nasional, mulai bermunculan tokoh-tokoh oposisi Presiden Soeharto. Gerakan mahasiswa UGM pada waktu itu lebih cenderung melakukan aksi-aksi intelektual dengan mengadakan diskusi publik untuk menyerukan Reformasi. Diskusi tersebut mengundang tokoh-tokoh penggerak Reformasi pada waktu itu, di antaranya adalah Amien Rais.¹²⁶

Tahun 1997, mulai dilakukan Pemilihan Raya (Pemira) Mahasiswa untuk memilih Ketua BEM KM UGM. Dari Pemira tersebut, terpilihlah Haryo Setyoko sebagai Ketua BEM KM UGM pertama yang berasal dari gerakan Tarbiyah. Sebenarnya, ketika itu Haryo mencapai perolehan suara ke dua terbesar, sedangkan yang memperoleh posisi pertama adalah calon dari HMI MPO dan posisi ketiga adalah calon dari HMI Dipo. Menurut Huda, dikarenakan persetujuan antara HMI MPO dan HMI Dipo, dipilihlah Haryo dari Tarbiyah sebagai jalan tengah.¹²⁷ Di zaman kepemimpinan Haryo, sempat diadakan referendum bagi seluruh mahasiswa UGM untuk menjatuhkan Presiden Soeharto. Hasil dari referendum tersebut menunjukkan lebih dari 90% mahasiswa UGM menginginkan Presiden Soeharto turun dari jabatan.

Memasuki tahun 1997 akhir, bangsa ini sedang berada dalam puncak-puncaknya krisis moneter. Ketika itu gerakan mahasiswa semakin bermunculan dan kembali melakukan eskalasi gerakan. BEM KM UGM dengan Haryo sebagai ketuanya bersama Senat Mahasiswa KM UGM dengan Ridaya La Ode Ngkowe sebagai ketuanya aktif menggalang gerakan menjelang Reformasi 1998.

¹²⁶ Wawancara dengan Huda Tri Widiانا, di Kaliurang pada tanggal 19 Januari 2013. Beliau adalah aktivis Reformasi di UGM, deklarator dan pendiri Partai Bunderan (partai mahasiswa), dan pernah menjabat sebagai Presiden BEM KM UGM tahun 2000-2001.

¹²⁷ *Ibid.*

Wacana yang sangat masif diangkat oleh gerakan tersebut adalah tentang demokratisasi dan anti-Soeharto.

Gerakan yang dibangun itu memosisikan secara jelas bahwa mahasiswa UGM berada dalam kondisi *vis a vis* dengan Pemerintah, termasuk juga terhadap Mendiknas. Hingga sempat Mendiknas berpendapat bahwa gerakan mahasiswa tersebut telah ditunggangi partai politik tertentu.¹²⁸ BEM KM UGM melakukan aksi demonstrasi secara simultan dengan isu yang konsisten, yaitu menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari posisinya. Gerakan tersebut akhirnya sempat menimbulkan represi negara dengan terjadinya penembakkan seorang aktivis mahasiswa di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) oleh aparat.¹²⁹

Semua gerakan mahasiswa ketika itu bersatu padu dengan mengungus Soeharto sebagai musuh bersama. Sebagai kekuatan Islamis, pada Maret 1998, gerakan Tarbiyah yang telah banyak berpengaruh di FSLDK melakukan silaturahmi di Malang dan mendeklarasikan identitas baru politiknya dengan nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).¹³⁰ Haryo Setyoko menjadi Sekretaris Jenderal pertamanya, dengan Fahri Hamzah sebagai Ketua pertamanya. Dari sanalah akhirnya identitas “gerakan Tarbiyah” dikenal oleh publik. Sementara itu, kekuatan gerakan kiri, memang sempat hilang pasca-NKK/BKK kendati masih tetap ada eksponen-eksponennya. Bahkan di awal tahun 1990-an hingga peristiwa Reformasi, gerakan kiri mulai menguat kembali di UGM, salah satu tokohnya adalah Budiman Sudjatmiko yang mendirikan Partai Rakyat Demokratik (PRD).¹³¹ Karena itu menurut Dr. Sukamta, di mana ada mahasiswa, dipastikan di sana ada aktivisme untuk melawan setiap penindasan dan aksi represif. Ada yang menemukan Islam sebagai titik tolak perlawanannya, dan ada juga yang menemukan ideologi sosialisme sebagai dasarnya.¹³²

¹²⁸ Wawancara dengan Prof. Ichlasul Amal, *Op.cit.*

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Wawancara dengan Dr. Sukamta, *Op.cit.*

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

Menurut Prof. Ichlasul Amal yang menjadi Rektor UGM pada saat momentum tersebut, Gerakan Reformasi sejatinya dimulai dari Yogyakarta. Ketika itu, hanya Rektor UGM yang menjadi satu-satunya pimpinan universitas yang berani bersikap kontra terhadap Presiden Soeharto.¹³³ BEM KM UGM kembali bersatu dengan masyarakat, dosen, rektor, alumni, termasuk Keraton Yogyakarta untuk menuntut mundur Presiden Soeharto.¹³⁴ Gerakan tersebut yang juga dilakukan bersama elemen mahasiswa lainnya di Indonesia, dan pada akhirnya dapat menciptakan momentum gerakan Reformasi 1998, yang berhasil menjatuhkan rezim Soeharto. Bertepatan dengan digelarnya Sidang Umum Istimewa MPR dengan agenda penerimaan laporan pertanggungjawaban Presiden Soeharto pada 1 Maret 1998, tepat beberapa hari setelahnya pada hari Kamis 5 Maret 1998 sekitar 15 ribu mahasiswa UGM turun ke jalan untuk menolak Soeharto.¹³⁵ Aksi tersebut dibalas secara represif oleh pihak militer sehingga menimbulkan beberapa korban dari kalangan mahasiswa.

Setelah selesai digelarnya SU Istimewa MPR, pada Kamis 12 Maret 1998 kembali gerakan mahasiswa UGM yang dimotori Senat Mahasiswa dan BEM KM UGM mengadakan aksi menolak Soeharto menjadi presiden. Sekitar 50 ribu mahasiswa UGM memadati jalan-jalan di kampus sambil berteriak, "Hidup Reformasi! Ganti Soeharto!" mereka memajang ratusan poster bertuliskan tuntutan reformasi politik dan ekonomi.¹³⁶ Dalam aksi akbar tersebut, Ketua Senat Mahasiswa UGM, Ridaya La Ode Ngkowe mendeklarasikan enam butir tuntutan reformasi, salah satunya berisikan tentang: turunkan harga sembako dan kembalikan sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Dalam aksi tersebut turut hadir sejumlah dosen senior UGM, di antaranya Amien Rais, Mochtar Mas'ood, Prof. Kunto Wibisono (Ketua Keluarga Alumni Gajah Mada

¹³³ Wawancara dengan Prof. Ichlasul Amal, *Op.cit.*

¹³⁴ Wawancara dengan Prof. Dr. Sutaryo, *Op.cit.*

¹³⁵ Lihat http://www.oocities.org/capitolhill/3925/sd8/mundurinya_8.html. File diunduh tanggal 8 September 2012.

¹³⁶ Lihat kronologisnya dalam *ibid.*

(KAGAMA)), dan Prof. Teuku Jakob (mantan Rektor UGM).¹³⁷ Amien Rais bahkan memimpin gerakan reformasi bersama elemen mahasiswa dan rakyat di Jakarta yang akhirnya berhasil menduduki gedung MPR/DPR di Senayan. Gerakan tersebut pada akhirnya berhasil memaksa Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie.

3.5 Kesimpulan

Dalam rentang waktu kurang lebih 32 tahun rezim Orde Baru, aktivisme KM UGM kembali menorehkan peranannya dalam dunia pergerakan mahasiswa. Adalah hal menarik, ketika periode awal fase stabilisasi Orde Baru di tahun 1966-1970, Dema UGM sempat dipaksa “tiarap” dengan hampir tidak melakukan tekanan apapun baik terhadap universitas dan terlebih terhadap Pemerintah. Pasca fase tersebut, hingga tahun 1978, Dema UGM kembali melakukan tekanan dengan memosisikan diri beroposisi terhadap pemerintahan Soeharto. Kendati pada peristiwa Malari 1974, Dema UGM tidak terlibat dalam gerakan yang diinisiasi Gerakan Sosialis tersebut, Dema tetap memosisikan diri anti-Orde Baru yang mereka nilai sebagai pihak yang pro-kapitalis asing dan militerisme. Hingga akhirnya terjadi pengepungan kampus oleh Militer pada tahun 1978 di UGM, yang disusul oleh pembekuan Dema dan diterapkannya NKK/BKK.

Peran menarik aktivisme gerakan mahasiswa UGM kemudian adalah munculnya gerakan dakwah kampus sebagai alternatif ketika mulai ditekannya gerakan ekstra-universitas di UGM. Jamaah Shalahuddin (JS) yang tadinya hanya sekadar paguyuban aktivis Islam yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan di kampus, kemudian bertransformasi menjadi gerakan yang muncul untuk melakukan perlawanan terhadap tindakan represif negara. Aktivisme tersebut akhirnya beralih fokus menuju pemerintahan mahasiswa (*student government*) kembali, dengan mulai diinisiasinya pembentukan Forkom Senat Fakultas UGM yang berujung dengan

¹³⁷ *Ibid.*

pembentukan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT). Dari situ, dibentuklah kembali Keluarga Mahasiswa UGM yang terdiri dari Senat Mahasiswa dan BEM. Aktivisme KM UGM tersebut akhirnya terus mengalami eskalasi hingga terjadi momentum Reformasi 1998 yang berhasil menggulingkan Presiden Soeharto.

Peran aktif KM UGM tersebut tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan universitas yang mendukungnya. Terdapat tokoh-tokoh universitas yang membantu menghidupkan kembali gerakan mahasiswa di UGM, di antaranya Prof. Koesnadi Hardjasoemantri, Prof. Haryana, Prof. Mochammad Adnan, dan Prof. Ichlasul Amal. Hal tersebut menunjukkan bahwa kampus UGM sebagai kampus Pancasila dan kampus perjuangan memperlihatkan konsistensinya dalam mengawal Republik ini.

Secara metode gerakan, di masa Orde Baru awal hingga menjelang dekade 1990-an gerakan mahasiswa UGM yang didominasi oleh aktivis “merah” dan lebih memilih gerakan intelektual persuasif ketimbang gerakan massa konfrontir. Pilihan pernyataan sikap, cara-cara dialogis, dan demonstrasi simpatik lebih banyak dilakukan. Bahkan dalam konteks peristiwa Malari 1974 dan gerakan kekecewaan 1978 pun, aktivis Dema tidak mengikuti cara-cara yang dilakukan aktivis Dema UI di Jakarta dengan melakukan pembakaran toko-toko dan membuat kerusuhan. Ketika Soeharto datang ke UGM, aktivis Dema malah turut serta mengamankan kampus.

Metode inilah yang kerap disebut sebagai “*UGM Style*” yang lebih mengedepankan intelektualitas ketimbang gerakan-gerakan *pressure politics* semata. Meskipun, metode ini banyak dianggap konservatif dan tidak sesuai dengan realita oleh aktivis kampus lain. Hal ini juga berbeda dibandingkan aktivis “hijau” UGM yang lebih sepakat dengan pergerakan yang diinisiasi Dema ITB di Bandung.

Memasuki dominasi kekuatan “hijau” di UGM, pilihan metode gerak “*UGM Style*” tersebut sebenarnya masih dilanjutkan oleh Anies dkk. Meski demikian, hingga menjelang Reformasi 1998, metode yang dipilih oleh gerakan mahasiswa UGM terbilang lebih

keras untuk menekan pemerintah, seperti melalui mobilisasi massa untuk aksi, dll.

Hal menarik lainnya dalam era Orde Baru ini, secara ideologis, adalah terjadinya pergeseran dominasi gerakan mahasiswa yang bermain dalam KM UGM. Aktivis GMNI yang bermazhab Nasionalis Soekarno memang sempat menguat secara kultural ketika masa “pendudukan” KAMI Care Taker Dema, dan kemudian menguat secara struktural di Dema UGM hingga tahun 1978. Namun, pasca-NKK/BKK diterapkan, aktivis GMNI mengalami penurunan baik dari segi pengaruh maupun kaderisasinya. Hal tersebut dikarenakan begitu kerasnya tindakan represif negara pada waktu itu. Di sisi lain, aktivis Islamis justru menemukan bentuk dan momentum kebangkitannya di tengah-tengah kondisi ketertekanan tersebut. Memasuki akhir dekade 1980-an, hingga awal 1990-an, aktivisme Islam di UGM mengalami kebangkitannya dan mulai berpengaruh terhadap KM UGM yang mulai diinisiasi kembali. Hingga pada 1998, gerakan mahasiswa Islam mengalami puncak pengaruhnya di KM UGM.

Sebagaimana pemetaan ideologi Sanit, ideologi Islam tergolong dalam ideologi yang lahir secara alamiah dan tidak secara sistematis. Situasi politik pada waktu itu memang mempertemukan antara adanya kerinduan dari keringnya aktivitas akademik di kampus-kampus akan kegiatan dan kajian keagamaan, disebabkan adanya tindakan represif dari negara. Hal tersebut menyebabkan ideologi Marhaenis yang notabene dilakukan secara ideologis dan sistematis akan mengalami kesulitan dalam kondisi politik tersebut. Sedangkan jika dilihat dalam pemetaan Uhlin, ideologi Islam yang berkembang tersebut tergolong dan merepresentasikan wacana demokrasi yang memang menjadi kebutuhan masyarakat di tengah-tengah cengkeraman Orde Baru.

bab **IV**

KM UGM di
Era Pasca-Reformasi

KM UGM di Era Pasca-Reformasi

Euforia gerakan mahasiswa semakin menguat setelah gerakan Reformasi 1998 berhasil memaksa Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Kondisi politik represif dan menekan di era Orde Baru, kini telah berubah menjadi sangat kondusif dan demokratis. Dalam kondisi politik yang seperti itu, negara dihadapkan dengan masa transisi kekuasaan pasca-Soeharto yang pemetaan politiknya justru lebih rumit. Tercatat terdapat beberapa presiden yang berganti pasca-Soeharto, yaitu B. J. Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati, dan Susilo Bambang Yudoyono. Gerakan mahasiswa termasuk di UGM masih beranggapan bahwa agenda Reformasi 1998 belumlah selesai dikawal. Terlebih di awal era Pasca-Reformasi itu, arus neo-liberalisasi hampir merangsek masuk di semua sektor kebangsaan, termasuk di sektor pendidikan.

Tulisan ini akan terbagi ke dalam dua periode penting dalam era ini. **Pertama** periode demokratisasi politik dari tahun 1999-2004. KM UGM mengalami puncak aktivismenya dengan melakukan tekanan terhadap universitas maupun pemerintah. **Kedua**, pembahasan akan fokus pada periode 2004-sekarang di mana gerakan mahasiswa UGM tengah mencari jati diri dan bentuk barunya dalam iklim demokrasi politik yang semakin mapan untuk bisa kembali berperan dalam isu-isu nasional dan kebangsaan.

4.1 Demokratisasi Politik (1999-2004)

Memasuki tahun 1998 pasca-Reformasi, maka merebaklah wacana demokratisasi hampir di semua lini politik di Indonesia. Pilar-pilar demokrasi seperti kebebasan pers, gerakan mahasiswa,

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan partai politik, seakan menjadi *trend* politik pada waktu itu. Di UGM, terdapat suatu langkah progresif yang mengkritik politik nasional. Pada 1998, didirikan sebuah partai mahasiswa pertama di kampus sebagai bentuk kritikan terhadap kondisi Nasional yang hanya memiliki tiga partai saja. Partai tersebut bernama Partai Bunderan yang diinisiasi oleh aktivis-aktivis Tarbiyah di UGM, dengan Huda Tri Widiana sebagai deklaratornya.¹ Partai Bunderan dibentuk beberapa waktu sebelum dideklarasikannya pembentukan KAMMI di Malang. Dari situlah kemudian bermunculan partai mahasiswa dari gerakan mahasiswa lain di UGM. Bahkan saking kuatnya euforia demokrasi, pada 1999 di kampus UGM, BEM sempat mengadakan Debat Calon Presiden Republik Indonesia.²

Dari sisi peranannya, BEM KM UGM pasca-Reformasi lebih didominasi oleh aktor-aktor yang terlibat langsung dalam peristiwa Reformasi 1998. Hal tersebut membuat agenda yang dikawal oleh BEM KM UGM pada 1999 lebih pada pengawalan agenda Reformasi.³ Karena itu, gerakan yang dibangun BEM pada rentang 1999 hingga 2004 bisa dikatakan adalah kelanjutan dari euforia gerakan Reformasi. Isu yang diangkat oleh BEM secara umum adalah sikap oposisi terhadap pemerintah, terutama era Gus Dur dan Megawati. Model gerakan yang dipilih lebih kepada gerakan massa dengan isu ekstrem “jatuhkan rezim!”. Metode gerakan dan pilihan isu ini yang dilakukan untuk menekan pemerintahan Gus Dur di sepanjang tahun 1998 akhir hingga 2001, dan juga pemerintahan Megawati-Hamzah Haz dari tahun 2001 hingga 2004.

Ketika Habibie menjadi Presiden, BEM KM UGM dan KAMMI sebenarnya lebih bersikap mendukung pemerintah.⁴ Hal tersebut dikarenakan Habibie telah banyak melakukan perubahan yang positif di Indonesia, salah satunya adalah budaya politik demokratis.

¹ Wawancara dengan Huda Tri Widiana, *Op.cit.*

² *Ibid.*

³ Wawancara dengan Oce Madril, di Fakultas Hukum UGM, pada tanggal 6 Februari 2013. Beliau adalah Dosen Fakultas Hukum, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, dan mantan aktivis BEM KM UGM periode 2003-2005.

⁴ Wawancara dengan Huda Tri Widiana, *Op.cit.*

Namun, Habibie terlibat masalah soal lepasnya Timor-Timur dari NKRI. Terjadi pro-kontra dalam gerakan mahasiswa pada waktu itu, yang mengatakan bahwa Habibie merupakan kepanjangan tangan dari rezim Orde Baru. Menurut Oce Madril, pada waktu itu BEM KM UGM dianggap lebih mendukung Habibie, karena ketika itu sebagian besar gerakan kanan (Islamis) yang menguasai BEM mendukung Habibie. Hal tersebut dikarenakan menurut gerakan kanan (KAMMI, IMM, PMII, dan HMI), Habibie dapat menjadi simbol kekuatan kanan di pemerintah pada waktu itu.⁵ Berbeda dengan gerakan kiri seperti Liga Mahasiswa Nasionalis Demokrat (LMND) dan Front Mahasiswa Nasional (FMN) yang menolak Habibie dan mengusulkan dibentuknya Pemerintahan Persatuan Nasional.⁶ Gerakan kiri tersebut sebenarnya bukan hanya sekadar anti-Habibie, tetapi mereka memilih berpikir ekstrem dengan menolak semua sistem politik yang berlaku karena dianggap merupakan artefak dari Orde Baru.⁷

Memasuki era Gus Dur, menurut Huda Tri Widiana selaku Presiden BEM KM UGM periode 1999-2000, kebijakannya sangat merusak dan mengerikan. Beberapa contoh kebijakan yang bermasalah pada era Gus Dur adalah kasus Bulog Gate, Brunei Gate, dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, isu yang sangat sensitif bagi umat Islam.⁸ Walau ketika itu partai politik Tarbiyah di tingkat nasional, Partai Keadilan (PK), terpaksa mendukung dan berkoalisi dengan Gus Dur karena dihadapkan dengan Megawati Soekarnoputri sebagai pesaing politiknya. Menurutnya, satu-satunya jasa Gus Dur ketika menjadi Presiden adalah untuk memperkecil euforia mengenai kebesaran PDI-P terutama pasca-Reformasi.⁹

Dalam konteks isu yang diangkat, menurut Oce Madril, gerakan kanan dan kiri pada waktu itu mulai bersatu sebatas untuk menggulingkan Gus Dur.¹⁰ Namun secara metode, gerakan kanan

⁵ Wawancara dengan Oce Madril, *Op.cit.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Wawancara dengan Huda Tri Widiana, *Op.cit.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Wawancara dengan Oce Madril, *Op.cit.*

cenderung lebih menerima prosedur demokrasi formal dengan diberlakukannya pemilihan umum atau Sidang Umum MPR, hal ini berbeda dari gerakan kiri yang benar-benar menginginkan revolusi politik di Indonesia.

Memasuki era Megawati di tahun 2001 hingga 2004, aktivis BEM KM UGM dan KAMMI juga tetap terbilang sangat anti-Pemerintah.¹¹ Menurut Huda, sikap tersebut diambil bukan karena ideologi mahasiswa yang bertentangan dengan pemerintah, melainkan lebih dikarenakan kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan negara. Ketika itu banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan aset negara dijual ke asing, seperti Indosat, PT. Dirgantara Indonesia, dll. Meskipun begitu, eksponen-eksponen GMNI di UGM tetap mendukung pemerintah Megawati pada saat itu.¹²

Menurut Oce Madril, isu yang diangkat di era Megawati adalah wacana anti-neoliberalisme. Terdapat banyak kasus-kasus penjualan BUMN yang diangkat oleh BEM KM UGM. Menurutnya, motor gerakan anti-neoliberalisme di UGM berasal dari dua kekuatan gerakan mahasiswa ketika itu. **Pertama** gerakan kiri, yaitu FMN dan LMND. **Kedua** gerakan kanan yang dipelopori oleh aktivis-aktivis KAMMI. BEM KM UGM kerap mengadakan kajian advokasi bersama Serikat Pekerja PLN dan beberapa BUMN lain. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah isu lain yang diangkat oleh BEM yang berujung pada penuntutan pemakzulan Megawati-Hamzah Haz dari jabatannya.¹³

Dalam situasi Pasca-Reformasi sebagaimana yang diulas dalam paparan di atas, BEM KM UGM benar-benar memanfaatkan iklim demokratisasi politik yang terjadi di kampus maupun nasional. Dalam kurun waktu pergantian kepemimpinan Nasional pasca-Soeharto dari tahun 1998-2004, gerakan BEM KM UGM selalu aktif mengawal agenda Reformasi 1998 dengan enam tuntutanannya itu. Meski di era Habibie, gerakan BEM yang didominasi aktivis

¹¹ Wawancara dengan Prof. Ichlasul Amal, *Op.cit.*

¹² Wawancara dengan Huda Tri Widiana, *Op.cit.*

¹³ Wawancara dengan Oce Madril, *Op.cit.*

KAMMI itu kemudian lebih mendukung pemerintah. Namun, setelah itu gerakan BEM menjadi sangat anti dan beroposisi dengan Gus Dur dan Megawati. Eskalasi gerakan masih memanas sejak peristiwa Reformasi 1998 dengan isu yang diangkat BEM ketika itu bertajuk “Kembalikan Reformasi!”, meski lantas perlahan gerakan mulai menurun..¹⁴

Selain itu, yang menarik untuk dibahas dalam periode ini adalah, munculnya kebijakan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN). Para mahasiswa menganggap kebijakan tersebut sebagai bentuk dari liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Isu liberalisasi pendidikan ini paling sering dibahas di dalam gerakan mahasiswa pada periode ini, selain juga isu pengawalan terhadap agenda Reformasi 1998. Memanasnya isu liberalisasi pendidikan tersebut, menurut Oce Madril, tidak bisa dilepaskan dari adanya aktor-aktor penggerak di kampus UGM yang konsisten melakukan pengawalan yang sering disebut sebagai “Angkatan 2002”.

4.1.1 Perihal PT BHMN

Isu kedua setelah pengawalan agenda Reformasi yang paling sering diangkat aktivis BEM pada waktu itu adalah penolakan terhadap adanya kebijakan pemerintah terkait status universitas sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN). Kebijakan tersebut didasari Peraturan Pemerintah no 153 tahun 2000 tentang “Penetapan UGM sebagai PT BHMN”. Kebijakan tersebut pun berlaku pada enam perguruan tinggi lainnya di Indonesia seperti UI dan IPB yang diatur dalam PP yang lain. Substansi dasar dari pengalihan status tersebut adalah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada kampus untuk mengelola pendidikan. Dalam arti bukan hanya pengaturan kurikulumnya melainkan juga perihal keuangannya. Berubahnya status UGM yang semula berstatus Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi PT BHMN pada tahun 2000 dinilai banyak mencederai asas Pancasila dan ke-UGM-an itu sendiri. Para mahasiswa yang terlibat dalam

¹⁴ Wawancara dengan Huda Tri Widiana, *Op.cit.*

gerakan menganggap “Otonomi kampus” yang dimaksud hanya modus untuk melegalkan komersialisasi dan liberalisasi pendidikan di Indonesia, serta melepaskan tanggungjawab negara.¹⁵

Pada awal perubahan status tersebut, terdapat banyak penolakan terutama dari kalangan aktivis BEM era 2000-an. Menurut Rudy Hantoro (dalam Heri Santoso, 2002: 12-13), PT BHMN memiliki tiga kecacatan:

“Pertama, cacat yuridis, karena tidak ada Undang-undang yang menaunginya. Kedua, cacat sosiologis, karena ada komponen “objek kebijakan” yang tidak menyetujuinya, terutama mahasiswa. Ketiga, cacat historis yang dimulai dari penetapan PP 61/1999 tentang Otonomi Kampus yang muncul dalam kondisi negara terdesak ekonomi (desakan International Monetary Fund (IMF) untuk pemotongan subsidi pendidikan), lahir karena dipaksa kondisi negara tak mandiri alias terbelit.”

Kebijakan PT BHMN tersebut jelas-jelas menjadi kepentingan asing dengan IMF sebagai dalangnya. Dari kebijakan tersebut akhirnya mulai muncul kanal-kanal “dana masyarakat” di UGM dengan adanya Sumbangan Pendidikan Mutu Akademik (SPMA) bagi setiap mahasiswa baru, Biaya Operasional Pendidikan (BOP), dan juga kenaikan SPP.¹⁶

Pada tahun 2000, terdapat sembilan orang aktivis BEM KM UGM berangkat ke Jakarta dari Yogyakarta untuk melancarkan protes langsung kepada Mendiknas. Di sana mereka membuat “Tenda Keprihatinan” di halaman Kantor Kemendiknas yang kemudian disusul oleh aktivis-aktivis BEM UI dan kampus-kampus lain.¹⁷ Di kampus juga pernah dilakukan demo ke fakultas-fakultas walau hanya diikuti beberapa aktivis mahasiswa saja. Hal tersebut diperkuat setelahnya dengan adanya survei yang dilakukan BEM KM UGM pada tanggal 14 Februari 2005, yang menyatakan bahwa sebanyak 60,30% mahasiswa UGM tidak setuju dengan penerapan BHMN (Heri Santoso, 2010: 15). Semakin jelas bahwa perubahan status tersebut sangat bertentangan dengan asas UGM yaitu Pancasila dan filosofi kampus kerakyatan.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Sebagaimana yang dijelaskan Huda, dengan adanya kebijakan PT BHMN itu akhirnya pendidikan di UGM menjadi mahal dan sistem pendidikan kita hanya berpihak pada mereka yang memiliki uang saja. Tolok ukur pengambilan calon mahasiswa tidak berdasarkan kemampuan penalaran akademiknya, tetapi juga berdasarkan kemampuan sumbangan dananya.¹⁸ Aktivistis BEM KM UGM pada waktu itu berpendapat bahwa seharusnya pendidikan itu adalah tanggungjawab negara, sebagaimana mandat dari preambule Undang-undang Dasar 1945. Penerapan status PT BHMN dianggap melepaskan tanggungjawab negara dalam pendidikan dengan adanya kapitalisasi dan komersialisasi kampus.¹⁹

Hal tersebut kemudian dijawab oleh Prof. Mahfud selaku Pembantu Rektor II UGM di University Club. Menurutnya, komersialisasi kampus terjadi ketika kampus menarik dana masyarakat setinggi-tingginya, meski dalam hal ini, UGM tidak melakukan hal tersebut dengan adanya pembatasan penarikan dana masyarakat.²⁰ Ketika itu menurut Huda, pengurus universitas sangat menyambut adanya BHMN, karena dengan demikian universitas mendapatkan otonomi yang besar. Namun, mahasiswa tetap menolak dan menganalisis bahwa secara jangka panjang BHMN akan berdampak buruk bagi mahasiswa. Lantaran hal tersebut, akhirnya BEM KM UGM melakukan demo besar-besaran menolak BHMN ke rektorat dan Mendiknas.

Pimpinan universitas dengan Prof. Sofyan Effendi sebagai rektor kala itu sebenarnya sangat menolak kebijakan PT BHMN yang dihasilkan dari adanya perjanjian *General Agreement of Trade and Services* (GATS). Namun menurut mahasiswa, kebijakan yang diambil oleh Universitas dianggap kontra-produktif dengan sikap tersebut. Kebijakan yang diambil Universitas dinilai memperparah komersialisasi pendidikan tersebut dengan adanya mekanisme pembebanan dana masyarakat kepada mahasiswa. Aktivistis BEM lebih menuntut agar negara yang melakukan pembiayaan pendidikan di universitas.²¹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Wawancara dengan Oce Madril, *Op.cit.*

Oleh karena itu BEM KM UGM melakukan mobilisasi gerakan massa yang lebih banyak ditujukan tekanannya kepada universitas daripada pemerintah pusat. BEM KM UGM memilih melakukan demonstrasi di kampus alih-alih pergi ke Jakarta terkait pilihan strategi gerakan, sedangkan gerakan mahasiswa di Jakarta dan sekitarnya justru sama sekali tidak melakukan gerakan apapun untuk menekan pemerintah pusat.²²

BEM KM UGM dengan Presidennya Romi Ardiansyah dari Fakultas Teknik, melakukan demo besar-besaran kepada Universitas dalam momentum Dies Natalis UGM ke-55 pada 20 Desember 2004. Isu yang diangkat masih mengenai komersialisasi kampus dengan diberlakukannya PT BHMN dan alur-alur dana masyarakat yang dinilai membebani rakyat.²³ Karena hal itu, terjadi bentrokan yang cukup serius antara aktivis BEM KM UGM dengan pihak keamanan kampus.

Menurut Huda, pada akhirnya BHMN sangat merusak dan menghancurkan gerakan mahasiswa. Hal tersebut dikarenakan kembalinya aktivisme mahasiswa kepada kehidupan yang semata-mata berorientasi pada studi dan menghilangkan kepedulian mahasiswa. Hal itu menjadi wajar karena mereka yang menikmati bangku kuliah adalah mayoritas berasal dari kalangan mapan dan menengah ke atas yang semakin individualis dan apatis terhadap gerakan mahasiswa.²⁴ Gerakan mahasiswa terpaksa teralihkan fokusnya dari pengawalan agenda Reformasi dan isu-isu Nasional menjadi harus *vis a vis* dengan rektor dan pengurus universitas masing-masing dan mengawal isu-isu internal kampus yang sepele.²⁵ Banyak yang beranggapan bahwa BHMN ini adalah usaha melemahkan gerakan mahasiswa dengan “cara lain” berkedok situasi euforia demokratisasi pasca-Reformasi.

²² *Ibid.*

²³ Lihat “Laporan Khusus Demo Mahasiswa UGM yang Tergabung dalam BEM KM UGM Pada Saat Acara Dies Natalis ke-55 UGM di GSP Tanggal 20 Desember 2004” oleh Satuan Keamanan Kampus UGM.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Setelah hampir lima tahun terakhir diberlakukannya BHMN, menurut Huda Tri Widiana, terbukti sensitivitas gerakan mahasiswa kian surut. Isu yang diangkat oleh gerakan mahasiswa pasca-BHMN beralih dari tataran nasional ke internal kampus. Gerakan yang dibangun pun tidak mengenai akar permasalahannya, cenderung bersifat reaksioner, temporer, dan tidak terkoordinasi secara baik.²⁶

4.1.2 Angkatan 2002

Menurut Oce Madril selaku aktivis BEM pada periode 2002-2005, eskalasi gerakan menolak komersialisasi kampus pada era Prof. Sofyan Effendi lebih dikarenakan adanya aktor mahasiswa yang konsisten menggawangi isu tersebut di kampus. Menurutnya, gerakan massa yang diorganisir angkatan 2002 termasuk ke dalam gerakan politik mahasiswa yang berhasil. Bagaimana tidak, angkatan 2002 adalah angkatan pertama yang merasakan dampak langsung dari implementasi kebijakan PT BHMN di UGM.²⁷ Sebenarnya wacana komersialisasi pendidikan sudah ada sejak tahun 1999, yang kemudian dibentuk Peraturan Pemerintah tentang itu di tahun 2000, dan baru diimplementasikan di kampus-kampus pada 2002.

Angkatan 2002 masuk ke UGM bertepatan dengan diberlakukannya Biaya Operasional Pendidikan atau biasa disingkat “BOP” yang diikuti dengan adanya kenaikan SPP. Tidak hanya itu, pada tahun 2003, komersialisasi pendidikan semakin menjadi-jadi dengan diterapkannya Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik atau biasa disingkat “SPMA” yang berkisar dari lima juta hingga ratusan juta rupiah. Oleh karena itu, sedari masuknya angkatan 2002 ke UGM, suasana yang terbentuk adalah nuansa perlawanan terhadap universitas yang menjadi simbol dari komersialisasi pendidikan.²⁸

Pada saat orientasi mahasiswa yang disebut sebagai Inisiasi Kampus (IK), komersialisasi pendidikan, kapitalisasi pendidikan, dan neo-liberalisasi pendidikan menjadi isu terkini yang diangkat dalam forum diskusi. Pada IK tahun 2002, terdapat gerakan besar-

²⁶ Wawancara dengan Huda Tri Widiana, *Op.cit.*

²⁷ Wawancara dengan Oce Madril, *Op.cit.*

²⁸ *Ibid.*

besaran yang dimobilisasi oleh aktivis senior di BEM dan pers mahasiswa yang notabene mantan aktivis Reformasi 1998 untuk melakukan demonstrasi dan okupasi ke universitas (dalam hal ini rektorat).²⁹ Inisiasi gerakan demonstrasi tersebut lebih banyak datang dari senior, yang kemudian disambut mahasiswa baru yang terkena dampak langsung dari implementasi PT BHMN. IK ketika itu berdurasi satu minggu, dan didominasi pembicaraan isu tersebut. Mobilisasi massa untuk melakukan demonstrasi ke universitas dilakukan di penghujung inagurasi Ospek. Sejak tahun 2002 hingga 2005, Ospek menjadi momentum untuk mendemo rektorat.³⁰

Angkatan 2002 terbilang menarik dilihat dari segi aktornya. Terdapat tokoh dari Angkatan 2002 bernama Syukron Makmun dan Jajang Sukmahari yang mendominasi kampus Barat. Tokoh-tokoh tersebut didukung oleh aktivis BEM KM UGM yang diketuai oleh Arif Fibri, sedangkan di kampus Timur lebih didominasi dan didukung oleh gerakan mahasiswa ekstra non-BEM seperti FMN, LMND, HMI, dll. Tidak jarang juga terjadi *clash* antar aktivis Angkatan 2002 kampus Barat dengan kampus Timur.³¹ Aktor-aktor aktivis Angkatan 2002 inilah yang terus berpengaruh hingga tahun 2005. Terlebih ketika itu aktivisme gerakan mahasiswa sedang mengalami euforia dengan seiring demonstrasi yang kerap diadakan baik oleh lembaga mahasiswa intra-universitas maupun ekstra-universitas.

Menurut Oce Madril, gerakan yang dimulai oleh Angkatan 2002 itu menginspirasi dua hal dalam gerakan mahasiswa di UGM. **Pertama** pilihan gerakan massa konfrontir mulai dipakai dan dianut oleh gerakan mahasiswa di UGM dalam era Pasca-Reformasi termasuk oleh BEM KM UGM. **Kedua** gerakan tersebut meninggalkan tren isu “komersialisasi pendidikan” yang masih menguat hingga sekarang. Meski kini, varian-varian momentumnya berubah, isu anti komersialisasi pendidikan tetap konsisten dikawal

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

oleh BEM KM UGM, berbeda dengan BEM di kampus lain yang sudah mulai bertindak permisif, seperti BEM IPB, ITB, dan UI.³²

4.1.3 Ideologi Gerakan Mahasiswa

Secara ideologis, memasuki era 2000-an, di dunia gerakan mahasiswa tingkat universitas di UGM, kekuatan mahasiswa Marhaenis sudah tidak memiliki pengaruh lagi. Walaupun mereka tetap eksis dan memiliki basis di Fakultas Ilmu Budaya dan Fisipol, sedangkan kekuatan HMI, terutama HMI MPO, memang cukup menguat sebelum Reformasi. Namun ketika Pasca-Reformasi hingga sekitar tahun 2000-an awal, pengaruh KAMMI terus naik dan melampaui kekuatan HMI MPO.³³ Hingga tahun 2004, BEM KM UGM pada akhirnya didominasi oleh aktivis-aktivis KAMMI sekalipun tetap mengakomodasi gerakan lain seperti HMI MPO, GMNI, dll.³⁴

Menurut Oce Madril, dalam rentang tahun 2002-2005, tidak ada satu pun gerakan mahasiswa yang memasukkan ideologi Pancasila dalam pertimbangan gerakannya. Gerakan kiri tidak banyak mengambil konsepsi Pancasila untuk berjuang, terlebih gerakan kanan. Menurut Oce, hal tersebut dikarenakan adanya stigma traumatik asas tunggal sebagaimana halnya yang terjadi di era Orde Baru.³⁵ Ketika itu pijakan epistemologis tidak begitu menjadi pembahasan yang serius untuk dikaji oleh gerakan mahasiswa di UGM, tetapi lebih ke isu-isu praksis seperti anti-neoliberalisme. Sebagaimana teorisasi yang dilakukan oleh Uhlin, di sini terlihat kecenderungan gerakan Islam mulai mengadopsi dan mengangkat wacana populisme kiri. Gerakan Islam reformis-modernis pada akhirnya menjadi cenderung bergerak pada Islam transformis.

Hal tersebut diperkuat dengan argumen Huda Tri Widiana, bahwa apa yang diperjuangkan aktivis BEM yang didominasi oleh kekuatan KAMMI, sebenarnya sejalan dengan ideologi Pancasila

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

dan konteks melawan intervensi kapitalisme global. Para aktivis BEM mengetahui kebijakan BHMN disokong kepentingan asing (IMF) yang mendorong pemerintah pasca-krisis moneter tahun 1998. Menurutnya, ideologi KAMMI sebenarnya tidak mempersoalkan atau bahkan bertentangan dengan ideologi Pancasila, di mana sejatinya Pancasila sudah final dan kokoh sebagai ideologi *common ground* pemersatu bangsa.

Menurut Dr. Sukamta, gerakan Tarbiyah yang termanifestasikan di dunia mahasiswa melalui gerakan KAMMI selalu berusaha konsisten pada nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan.³⁶ Jika memang dahulu di era Orde Baru ada yang mengatakan bahwa gerakan Tarbiyah sebagai anti-kebudayaan dan juga terhadap Pancasila sehingga dianggap bisa menghancurkan sendi-sendi nasionalisme dan akar kebudayaan, kemudian ada yang melanjutkan wacana tersebut dengan menyatakan bahwa gerakan Tarbiyah adalah bagian dari gerakan Islam fundamentalis yang tidak sejalan dengan ke-Indonesia-an. Menurut Dr. Sukamta, anggapan itu memang sangat tergantung pada konteks waktu dan situasi politiknya. Di zaman Orde Baru, kondisi politik pada terbilang sangat terkooptasi pemaknaan tunggal Pancasila oleh rezim yang sangat represif sehingga aktivis mahasiswa Islam pada waktu itu, termasuk gerakan Tarbiyah, tidak tertarik mengambil ideologi Pancasila sebagai dasar gerakan. Bagaimanapun hal ini hanya berlangsung temporer saja, terlebih gerakan mahasiswa Islam pada waktu itu membutuhkan simbol perlawanan. Hal tersebut terjadi demi menumbuhkan militansi dan meperkokoh konsolidasi internal. Menurutnya, proses menumbuhkan identitas baru itu dimaknai semata-mata sebagai alat. Gerakan Islam bukan anti-Pancasila, tetapi anti-penafsiran peyoratif monolitik represif ala Orde Baru. Kini pasca-Reformasi, semua sudah mulai kembali ke dan beradaptasi ke akar ke-Indonesia-an.

Menurut Oce Madril, terdapat beberapa penyebab gerakan ekstra-universitas perlahan kembali melemah di akhir periode

³⁶ Wawancara dengan Dr. Sukamta, *Op.cit.*

ini. **Pertama** terputusnya aktor pergerakan mahasiswa di UGM, sehingga menimbulkan regenerasi gerakan yang buruk. **Kedua**, sistem perkuliahan yang perlahan menghabiskan fokus dan konsentrasi mahasiswa. **Ketiga**, situasi kampus-kampus BHMN memang dibuat dan direkayasa untuk dinetralisir dari dominasi gerakan ekstra-universitas. Oleh karena itu, pasca-periode ini banyak usaha-usaha terpadu dari universitas untuk melemahkan pengaruh BEM baik di UGM maupun di kampus-kampus BHMN lain.³⁷

4.2 Usaha Kembali ke Isu Nasional (2004-sekarang)

Memasuki Pemilihan Umum 2004, yang merupakan pemilihan umum secara demokratis pertama di Indonesia, gerakan mahasiswa di UGM mulai terpecah lantaran sebagian mahasiswa mulai memasuki wilayah politik praktis. Pemilu 2004 dianggap telah membuka keran demokrasi politik di Indonesia dan karenanya terjadi pergeseran makna “oposisi” dalam gerakan mahasiswa di UGM, yang dahulu bersikap oposisi total terhadap pemerintah, menjadi bersikap “oposisi konstruktif”. Jika pemerintah dianggap salah maka akan diserang, tetapi jika pemerintah bertindak benar maka akan didukung.³⁸ Meski demikian, di tahun-tahun awal periode ini (2005-2007), BEM KM UGM tetap berpendirian bersikap oposisi total terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla (SBY-JK).

Pada 2005, BEM KM UGM sempat mengadvokasi keringanan biaya SPMA Nol bagi mahasiswa baru tidak mampu. Perjanjian dilakukan dengan Rektor UGM untuk menandatangani Surat Edaran Rektor bahwa bagi mahasiswa baru yang membawa surat keterangan tidak mampu langsung mendapatkan SPMA nol rupiah tanpa harus dipersulit dengan wawancara ulang. Usaha advokasi tersebut dianggap berhasil membantu kurang lebih seribu mahasiswa baru UGM yang tergolong tidak mampu.³⁹

³⁷ Wawancara dengan Oce Madril, *Op.cit.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Namun, setelah itu gerakan BEM tidak memiliki fokus yang jelas untuk mengawal pemerintahan SBY-JK di level nasional. Sementara itu, isu-isu komersialisasi pendidikan internal kampus pun perlahan-lahan tidak menjadi sepanas periode sebelumnya. Pada 10-11 Desember 2005, sempat diadakan lokakarya internal BEM se-UGM untuk mengevaluasi pasca lima tahun diterapkannya PT BHMN di UGM. BEM KM UGM menuntut dikembalikannya UGM sebagai kampus kerakyatan dengan meninjau ulang kebijakan PT BHMN dan menyalurkan kritik terhadap RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP), ditegakkannya prinsip transparansi dan akuntabilitas bagi universitas atas dana masyarakat yang diterimanya, dan langkah terakhir meminta Universitas untuk mengakomodasi mahasiswa yang berstatus kurang mampu secara finansial.⁴⁰

Pada 2006, sempat terjadi demonstrasi yang dilakukan BEM KM UGM dengan Agung Nugroho sebagai presidennya bersama Aliansi BEM Fakultas se-UGM. Demonstrasi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan atas diberlakukannya keputusan Rektor UGM Nomor 109/P/SK/HT/2006 tanggal 7 Maret 2006 tentang BOP bagi mahasiswa UGM. BEM KM UGM beserta sejumlah aliansi gerakan ekstra melakukan demonstrasi kepada universitas yang berujung pada negosiasi antara pihak BEM dengan pihak rektorat. Meski tidak sebesar gerakan massa pada periode 1999-2004, demonstrasi tersebut terhitung cukup keras karena sejak semula di-*setting* konfrontir oleh massa aksi.⁴¹

Menurut Oce, terdapat dua alasan mengapa gerakan mahasiswa di UGM mulai meredup pasca 2005.⁴² **Pertama**, selesainya masa studi aktor-aktor pergerakan dari angkatan 1999 hingga 2002 di mana kemudian mereka tidak memiliki pengaruh lagi di BEM. **Kedua**, nuansa pergerakan Reformasi sudah terputus dan tidak

⁴⁰ Lihat "Hasil Lokakarya Internal BEM se-UGM, Dari Evaluasi Menuju Perbaikan Kampus" yang diselenggarakan oleh BEM KM UGM di Ruang Sidang FTP pada tanggal 10-11 Desember 2005.

⁴¹ Lihat "Laporan Demo yang Dilakukan oleh Aliansi BEM KM UGM dengan BEM/LEM/DEMA Fakultas se-UGM tanggal 26 April 2006" oleh Satuan Keamanan dan Keselamatan Kampus UGM.

⁴² Wawancara dengan Oce Madril, *Op.cit.*

terwariskan lagi kepada generasi angkatan 2005 ke bawah. Kedua hal tersebut menimbulkan lahirnya generasi aktivis yang ahistoris dan terputus dari generasi sebelumnya.

4.2.1 Dibentuknya Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI)

Gerakan yang dibangun BEM hampir di semua kampus terutama pasca 2004, hanya terkotak-kotak dalam wilayah kampus dan regional masing-masing. Gerakan aliansi BEM Seluruh Indonesia yang didirikan sejak era Reformasi hanya bersifat sementara dan taktis. Menurut Sigit Nursyam selaku Presiden BEM Republik Mahasiswa (Rema) UNY, gerakan mahasiswa yang terkotak-kotak tersebut mengabaikan peran-peran besar BEM dalam mengawal kinerja pemerintah.⁴³ Isu-isu yang bersifat regional kerap membuat gerakan mahasiswa tidak bisa meningkatkan *leverage* gerakannya untuk mengawal isu nasional.

Pada 2007, mulailah kembali digagas mengenai pembentukan Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) untuk kembali memfokuskan pengawalan BEM terhadap isu-isu nasional. Beberapa BEM dari Perguruan Tinggi Negeri mengadakan kongres di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada 2-3 November 2007, disusul dengan pertemuan kedua pada 21-24 Desember 2007 di IPB. Gema Buana Putra selaku Presiden BEM KM IPB menyatakan bahwa pertemuan tersebut telah mengundang lebih dari 50 BEM universitas di Indonesia, meski hanya 37 perwakilan saja yang akhirnya hadir. Dari pertemuan tersebut, dilakukanlah revitalisasi terhadap Aliansi BEM SI dengan merumuskan visi misi, rencana strategis, serta struktur keanggotaan aliansi.⁴⁴ Dalam pertemuan tersebut, dipilihlah BEM KM UGM sebagai koordinator pusat pertamanya. Pemilihan BEM KM UGM didasarkan pada kuatnya pengaruh dan kesejarahan yang bagus dalam pergerakan mahasiswa di tingkat nasional.⁴⁵

⁴³ Lihat Laporan Utama Pers Mahasiswa "Balairung Koran" Edisi 107 tanggal 18 Februari 2008.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

Sebagai peran pertamanya, BEM SI melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pemerintahan SBY-JK dengan melakukan aksi nasional bersama seluruh anggota BEM SI ke Istana Negara pada Mei 2008. Isu yang diangkat adalah “Tujuh Gugatan Rakyat” atau biasa disingkat “Tugu Rakyat” yang menuntut: 1) Nasionalisasi asset strategis bangsa, 2) Mewujudkan pendidikan yang bermutu, terjangkau, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, 3) Tuntaskan kasus BLBI dan korupsi Soeharto beserta krooni-kroninya sebagai perwujudan kepastian hukum di Indonesia, 4) Kembalikan kedauletan bangsa pada sektor pangan, ekonomi, dan energi, 5) Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi rakyat, 6) Tuntaskan reformasi birokrasi dan berantas mafia peradilan, dan 7) Selamatkan lingkungan Indonesia dan tuntutan Lapindo Brantas untuk mengganti rugi seluruh dampak dari Lumpur Lapindo.⁴⁶

Isu “Tugu Rakyat” tersebut dianggap sebagai representasi dari kegelisahan masyarakat yang ditawarkan kepada calon presiden Republik Indonesia yang akan bertarung pada Pemilu 2009, setahun setelahnya. Menurut Budiyanto, selaku Koordinator Pusat BEM SI tahun 2008, eskalasi gerakan “Tugu Rakyat” ini pun dijadikan ajang evaluasi bagi BEM SI terhadap kepemimpinan SBY-JK yang dianggap gagal menjalankan fungsinya untuk menyejahterakan rakyat.⁴⁷

4.3 Kesimpulan

Peran sebagai kelompok penekan yang dilakukan KM UGM pada era Pasca-Reformasi, terutama pasca-Habibie, lebih memosisikan diri sebagai oposisi permanen bagi pemerintah. Tekanan yang dilakukan BEM KM UGM pada periode demokratisasi 1999-2004 tergolong sangat ekstrem dengan langsung menuntut mundur Gus Dur dan Megawati, meski BEM sempat mendukung pemerintahan Habibie sebelumnya walaupun masa jabatannya hanya sebentar.

⁴⁶ Lihat <http://news.unpad.ac.id/?p=10551> diunduh pada tanggal 23 Februari 2013.

⁴⁷ Lihat Laporan Utama Pers Mahasiswa “Balairung Koran” Edisi 107 tanggal 18 Februari 2008.

Hadirnya tekanan yang dilakukan BEM lebih diekspresikan pada euforia demokrasi yang terjadi pasca-Orde Baru yang sangat represif. Namun, isu-isu yang diangkat lebih cenderung pada wacana populisme kiri seperti kedaulatan negara, keadilan sosial, dan anti-liberalisasi.

Yang membedakan pada era ini adalah, pemosisian BEM KM UGM selalu berada dalam posisi diametral dengan universitas. Terutama dalam rentang waktu 1999-2004. KM UGM berada dalam posisi *vis a vis* dengan universitas. Hal tersebut lebih dikarenakan adanya kebijakan PT BHMN yang memaksa gerakan mahasiswa berfokus kepada isu-isu internal kampus.

Dari segi ideologi gerakannya, KM UGM Pasca-Reformasi ini mengalami perubahan yang sangat drastis. Gerakan mahasiswa yang mengisi dan mendominasi BEM sejak 1999 hingga sekarang selalu berasal dari “rahim” KAMMI dengan Partai Bunderan sebagai *onderbouw*-nya. Wacana-wacana yang diangkat oleh aktivis-aktivis KAMMI tersebut serupa dengan konsepsi Pancasila yang menekankan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang menekankan negara yang memiliki keberpihakan pada rakyat kecil (*marhaen*), sebagai contoh: anti-komersialisasi pendidikan, nasionalisasi asset strategis, kedaulatan negara dalam hal pangan, ekonomi, dan energi, dll. Meskipun demikian, aktivis-aktivis KAMM tersebut menggunakan Islam sebagai asas gerakannya. Dapat dikatakan, pasca tahun 2004 tidak ada lagi gerakan mahasiswa yang cukup signifikan berkontestasi dalam KM UGM selain dari rahim KAMMI.

Hal yang menarik pada pasca-Reformasi ini, BEM KM UGM lebih memilih gerakan massa yang bersifat konfrontir sebagai pilihan metode gerakannya. Terlihat terutama sepanjang tahun 1999 hingga 2004, BEM KM UGM kerap melakukan aksi demonstrasi dan mobilisasi massa untuk mewacanakan sebuah isu atau menekan universitas maupun pemerintah. Begitupun dalam isu nasional pasca tahun 2004, BEM KM UGM yang tergabung dalam Aliansi BEM SI melakukan gerakan massa untuk menekan pemerintah pusat

di Jakarta. Pilihan metode gerak ini yang sangat berbeda dengan “*UGM Style*” yang dahulu pernah dilakukan oleh aktivis-aktivis GMNI di Dema UGM terutama pada periode 1950-1962 dan 1970-1978 yang cenderung bersifat “konservatif” dan mengedepankan gerakan intelektual secara persuasif.

bab **V**

Penutup

Penutup

5.1 Peran KM UGM sebagai Kelompok Penekan

Gerakan mahasiswa sebagai kekuatan moral dan kekuatan intelektual tidak bisa dilepaskan dari kesejarahan Republik ini. Gerakan mahasiswa yang menurut Altbach hadir sebagai pembawa perubahan bagi masyarakat, melakukan fungsinya sebagai penumbuh perubahan secara sosial dan juga pendorong perubahan secara politik. Gerakan mahasiswa tidak hanya berusaha menerjemahkan kegelisahan yang dihadapi oleh masyarakat dengan modal penalarannya, di waktu yang bersamaan gerakan mahasiswa pun akhirnya turut terpanggil melakukan perubahan politik dengan melakukan tekanan-tekanan kepada pembuat kebijakan. Sebagaimana filosofi yang diajarkan Prof. Koesnadi Hadrjasoemantri, dunia kampus adalah dunia penalaran. Namun, tidak hanya itu, kampus UGM sebagai kampus perjuangan dan kampus kerakyatan mengharuskan mahasiswanya berkontribusi secara konkret dalam setiap permasalahan bangsa.

Melihat peranan yang dilakukan KM UGM sejak dibentuknya pada 1950 di Orde Lama, kemudian dalam Orde Baru, hingga Pasca-Reformasi, dapat disimpulkan bahwa peranan gerakan mahasiswa sangat signifikan menjadi kelompok penekan bagi pemerintah. Namun yang menarik adalah, masing-masing periode dalam sejarah panjang KM UGM memiliki peran dan sikap yang berbeda-beda. Peran dan sikap tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Peran KM UGM sebagai Kelompok Penekan

Periode		Peran dan Sikap
Orde Lama	1950-1962	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat mendukung pemerintahan Bung Karno 2. Mengirim Penempatan Tenaga Mahasiswa (PTM) untuk mengembangkan pendidikan di daerah 3. Mendesak Bung Karno untuk mengambil keputusan kembali kepada UUD 1945 dan Follow-up-nya di tengah-tengah kebuntuan Dewan Konstituante 4. Mendukung perebutan Irian Barat
	1962-1966	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung Panglima Besar Revolusi Indonesia Bung Karno dalam hal penganyangan Malaysia 2. Mendukung CANEFO 3. Menekan pengaruh HMI di Dema 4. Tidak tergabung dalam KAMI
Orde Baru	1966-1970	Tidak menekan universitas maupun pemerintah
	1970-1978	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melawan dan bersikap oposisi terhadap Pemerintah Orde Baru 2. Memboikot TMII 3. Bersikap anti terhadap kapitalisme asing dan militerisme 4. Mendukung Gerakan Malari 1974 secara moril, tetapi tidak secara gerakan 5. Ikut memanaskan gerakan kekecewaan di tahun 1978
	1979-1987	Dibekukan pemerintah
	1987-1998	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mulai dibentuk kembali cikal bakal KM UGM 2. Mengkritisi universitas tentang rencana kenaikan SPP 3. Mengkritisi Pemerintah tentang monopoli cengkeh oleh Keluarga Cendana 4. Mobilisasi massa bersama universitas dalam gerakan Reformasi 1998
Pasca-Reformasi	1999-2004	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pemerintahan Habibie 2. Bersikap oposisi terhadap pemerintahan Gus Dur dan Megawati 3. Bersikap anti-neoliberalisasi 4. Bersikap menolak diberlakukannya PT BHMN 5. Bersikap oposisi dengan universitas sebagai simbol komersialisasi kampus
	2004-sekarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersikap oposisi konstruktif terhadap pemerintahan SBY-JK 2. Mendirikan kembali Aliansi BEM Seluruh Indonesia 3. Mengangkat isu "Tugu Rakyat" sebagai bentuk pengawalan kembali gerakan mahasiswa terhadap isu nasional

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sedari awal didirikan, KM UGM sangat pro dengan pemerintahan Bung Karno. Bahkan, Dema UGM bersedia menekan lawan-lawan politik Bung Karno. Memasuki periode akhir dalam Orde Lama, Dema UGM termasuk gerakan yang anti dengan kekuatan KAMI bentukan militer dan Amerika Serikat yang disinyalir bertujuan untuk menggulingkan Bung Karno. Karena itu, aktivis Dema UGM kerap menjegal aktivis HMI yang memainkan pengaruh di dalam internal Dema. Memasuki era Orde Baru, sempat Dema UGM tidak melakukan fungsi kelompok penekannya selama 4 tahun pertama dikarenakan adanya KAMI Care Taker Dema. Namun, pasca 1970 hingga 1978, Dema UGM malah bersikap oposisi dan melawan pemerintahan Orde Baru dengan Presiden Soeharto sebagai presiden saat itu. Meski sempat dibekukan oleh pemerintah sejak 1978, aktivisme KM UGM bangkit kembali di akhir dekade 1980-an dan mulai melakukan kritik baik terhadap universitas maupun pemerintah. Hingga kebangkitan itu berujung pada adanya mobilisasi massa dalam gerakan Reformasi 1998.

Setelah Reformasi, KM UGM sempat mendukung pemerintah yang dikepalai Presiden Habibie meski hanya sebentar. Setelah itu di era kepemimpinan Gus Dur dan Megawati, kembali KM UGM bersikap oposisi terhadap pemerintah. Sikap oposisi tersebut kemudian bertambah dengan adanya tekanan kepada pihak universitas (Rektorat) dikarenakan adanya kebijakan PT BHMN. Setelah tahun 2004 hingga sekarang, KM UGM berusaha mengembalikan fokusnya untuk mengawal isu nasional dengan membentuk kembali Aliansi BEM Seluruh Indonesia di tahun 2007.

Dari paparan di atas, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sejak pra-kemerdekaan hingga kini, gerakan mahasiswa di Indonesia secara struktural selalu menjadi variabel yang diperhitungkan dalam melakukan tekanan pada sistem politik. Hampir semua ideologi maupun kepentingan akan memanfaatkan strategisnya peranan gerakan mahasiswa tersebut.

5.2 Pemetaan Ideologi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan dan sikap politik yang diambil oleh KM UGM setiap periodenya ternyata tidak bisa dilepaskan dari pengaruh ideologi gerakan mahasiswa yang berkontestasi di dalamnya. Melihat rekam jejak KM UGM sejak didirikannya hingga era Pasca-Reformasi, dapat dijabarkan pemetaan ideologi gerakan mahasiswa UGM sebagai berikut:

Tabel 3
Pemetaan Ideologi dalam KM UGM

Periode		Ideologi yang Mendominasi	Kategori Menurut Uhlir (1998)
Orde Lama	1950-1962	Marhaenisme/Nasionalis Radikal (GMNI)	Wacana Radikal dan Konservatif
	1962-1966	Marhaenisme/Nasionalis Radikal (GMNI)	Wacana Radikal dan Konservatif
Orde Baru	1966-1970	Islam reformis-modernis dan tradisional, Sosialisme Demokrasi (KAMI Care Taker Dema (HMI, Gemos, PMKRI))	Wacana Liberal dan Demokrasi
	1970-1978	Marhaenisme yang mulai diistilahkan dengan Nasionalisme (GMNI)	Wacana Radikal dan Konservatif
	1979-1987	Islam reformis-modernis dan tradisional (Gerakan Dakwah Kampus Jamaah Shalahuddin (PII, HMI, IMM, PMII, Tarbiyah))	Wacana Demokrasi
	1987-1998	Islam reformis-modernis dan neo-modernis (HMI MPO, HMI Dipo, Tarbiyah)	Wacana Demokrasi
Pasca-Reformasi	1999-2004	Islam reformis-modernis dan transformis (KAMMI, HMI)	Wacana Demokrasi
	2004-sekarang	Islam reformis-modernis dan transformis (KAMMI, HMI)	Wacana Demokrasi

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa, terjadi pergeseran dominasi ideologi gerakan mahasiswa sejak dibentuknya KM UGM di tahun 1950 hingga sekarang. Kampus UGM yang notabene banyak didirikan oleh aktivis-aktivis beraliran Marhaenis-Soekarno yang juga memiliki asas Pancasila, cukup memberikan pengaruh yang signifikan terhadap gerakan mahasiswa. Pada periode awal, KM

UGM lebih didominasi oleh aktivis GMNI hingga berakhirnya masa Orde Lama. Karena itu adalah sangat wajar jika Dema UGM pada periode tersebut memosisikan diri sebagai pendukung Bung Karno.

Namun, setelah memasuki era Orde Baru, Dema UGM sempat dikuasai kekuatan KAMI *Care Taker* Dema yang didesain untuk menghilangkan pengaruh Soekarnoisme dalam gerakan mahasiswa. Dikarenakan aktivis “merah” itu memiliki pengaruh yang sangat kuat di UGM, secara kultural Dema tetap dikuasai kekuatan “merah”, meski secara formal dikuasai oleh aktivis KAMI. Terlebih ketika Dema UGM mulai dibentuk kembali dengan diselenggarakannya Pemira di tahun 1970, kekuatan “merah” kembali menguat di Dema UGM hingga tahun 1978. Hal tersebut berdampak dengan Dema UGM yang bersikap oposisi terhadap Soeharto. Terlihat dari peran yang dilakukan Dema dalam rentang waktu 1970-1978, gerakan mereka selalu dipenuhi penolakan dan kritik bagi pemerintah. Meski demikian, hubungan Dema dengan universitas masih dikatakan baik.

Memasuki masa pembekuan Dema di tahun 1978 dan diterapkannya NKK/BKK, peran ideologi “merah” semakin meredup dan kehilangan pengaruhnya dalam dunia mahasiswa. Hal yang menarik dalam periode ini, gerakan mahasiswa Islam seperti HMI, IMM, dan PMII malah berkembang dan mengalami puncak aktivisme hingga tahun 1989. Di tahun-tahun tersebut pula muncul “pendatang” baru yang mengatasnamakan gerakan Tarbiyah di UGM, meski masih terbilang rintisan, dikarenakan adanya aktivisme baru yang disebut sebagai Gerakan Dakwah Kampus pada saat itu.

Dari awal dekade 1990-an, gerakan mahasiswa Islam semakin menguat di UGM dan mulai membentuk kembali KM UGM yang sempat dibekukan. Hingga menjelang Reformasi 1998, gerakan mahasiswa Islam sudah sangat mendominasi KM UGM. Gerakan mahasiswa Islam tersebut adalah HMI MPO, HMI Dipo, dan juga Gerakan Tarbiyah yang kemudian mendirikan KAMMI sebagai identitas gerakannya.

Sejak tahun 1997 hingga kini, KM UGM selalu didominasi oleh kekuatan “hijau” (terutama aktivis KAMMI), yang memiliki

epistemologi berbeda secara ideologis dengan gerakan yang dominan di KM UGM sebelumnya. Secara isu yang diangkat dan dalam tataran praksis, apa yang diusung aktivis KAMMI dalam BEM KM UGM terbilang menarik karena ia memiliki kesamaan konsepsi dengan ideologi Marhaenisme yang dibawa aktivis GMNI dahulu. Semangat anti-kapitalisme dan mengembalikan kedaulatan negara tetap menjadi isu yang secara konsisten terus dikawal hingga kini meski dengan pijakan epistemologis berbeda.

Dari titik ini, dapat disimpulkan bahwa peran dari ideologi sangat kuat atas gerakan mahasiswa. Perannya sebagai kelompok penekan yang dinilai strategis dan efektif untuk memengaruhi sistem politik di Indonesia, menjadikan ideologi-ideologi politik yang saling berkontestasi cukup penting untuk mengkaji dan memahami gerakan mahasiswa.

5.3 Metode Gerak

Terdapat pergeseran gaya pada gerakan mahasiswa UGM berdasarkan metode gerakan yang dipilihnya. Pilihan metode gerak dalam tiap-tiap periode tidak bisa dipungkiri dipengaruhi ideologi gerakan mahasiswa apa yang dominan dalam KM UGM pada suatu masa tertentu. Pengaruh ideologi gerakan terhadap pilihan metode gerak tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Perbandingan Garis Ideologi dan Metode Gerakan KM UGM

Periode	Garis Ideologi	Kategori Metode Gerakan yang Dipilih Menurut Arbi Sanit (1999)
Orde Lama	1950-1962	Marhaenisme/Nasionalis Radikal (GMNI)
	1962-1966	Marhaenisme/Nasionalis Radikal (GMNI)

Orde Baru	1966-1970	Islam reformis-modernis dan tradisional, Sosialisme Demokrasi (KAMI Care Taker Dema (HMI, Gemos, PMKRI))	Gerakan penalaran an sich
	1970-1978	Marhaenisme yang mulai diistilahkan dengan Nasionalisme (GMNI)	Gerakan persuasif berbasiskan penalaran
	1979-1987	Islam reformis-modernis dan tradisional (Gerakan Dakwah Kampus Jamaah Shalahuddin (PII, HMI, IMM, PMII, Tarbiyah))	Gerakan persuasif berbasiskan penalaran
	1987-1998	Islam reformis-modernis dan neo-modernis (HMI MPO, HMI Dipo, Tarbiyah)	Gerakan persuasif berbasiskan penalaran, kecuali pada peristiwa Reformasi 1998 dengan pilihan gerakan massa
Pasca-Reformasi	1999-2004	Islam reformis-modernis dan transformis (KAMMI, HMI)	Gerakan koersif dengan aksi massa konfrontir
	2004-sekarang	Islam reformis-modernis dan transformis (KAMMI, HMI)	Gerakan koersif dengan aksi massa konfrontir

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi pergeseran gaya gerakan dalam KM UGM. Sejak didirikannya, gerakan mahasiswa UGM yang didominasi aktivis Marhaenis lebih cenderung memakai metode gerakan penalaran dan menggunakan cara-cara yang lebih persuasif (membujuk) dalam melakukan tekanan kepada pembuat kebijakan. Meski sempat memanas pada periode 1962-1966, kejadian itu lebih dikarenakan dampak dari memanasnya politik di tingkat nasional dan internasional. Memasuki era Orde Baru, gerakan KM UGM masih mempertahankan gayanya dengan memakai metode persuasif berbasiskan kajian dan penalaran. Gaya ini yang kerap disebut sebagai “konservatif” oleh aktivis dari kampus lain.

Termasuk dalam gerakan Malari 1974, aktivis Dema UGM sama sekali tidak terlibat dalam peristiwa tersebut dikarenakan perbedaan ideologi dan metode yang dipilih oleh aktivis Dema UGM. Peristiwa Malari lebih dilihat sebagai manuver aktivis sosialis yang ditanggapi oleh Jenderal Soemitro untuk menekan pemerintah

yang cenderung lebih pro terhadap Jepang ketimbang Barat. Pilihan metode gerakan persuasif tersebut terus dipertahankan oleh KM UGM hingga menjelang gerakan Reformasi 1998, meski pada dekade 1990-an gerakan mahasiswa Islam mulai tampak menguat.

Sejak terjadinya gerakan Reformasi 1998 hingga kini, metode gerak yang dipilih KM UGM dalam hal ini BEM KM UGM lebih mengandalkan gerakan massa konfrontir. Tekanan politik yang dibangun dilakukan dengan cara gerakan paksa seperti melalui pelibatan mahasiswa dalam demonstrasi, okupasi, dan mobilisasi massa untuk menekan pembuat kebijakan baik dari pihak universitas maupun pemerintah. Pilihan gerakan massa tersebut bertepatan dengan mendominasinya gerakan KAMMI di dalam internal BEM KM UGM.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa gerakan Marhaenis yang berakar dari nasionalis radikal lebih memilih gerakan persuasif dalam metode gerakannya, sedangkan gerakan Islam modernis, terutama pasca-Reformasi lebih cenderung memilih gerakan massa konfrontir.

Pergeseran metode gerak dari persuasif menjadi gerakan massa konfrontir tersebut, dapat disimpulkan terjadi karena:

1. Secara momentum, aktivis KAMMI lahir dalam kondisi dan iklim politik yang diwarnai euforia demokratisasi pasca-Reformasi 1998. Jatuhnya rezim Soeharto menyimbolkan tumbangannya sistem militerisme yang represif di Indonesia. Dengan demikian, sebagaimana teori Key, peluang demokrasi itulah yang membuat kelompok penekan semakin menemukan momentumnya. Euforia demokratisasi tersebut berdampak pada dunia gerakan mahasiswa UGM dengan semakin tersebarnya kuasa pada kekuatan masyarakat sipil.
2. Secara ideologis, gerakan mahasiswa yang paling getol menggawangi peristiwa Reformasi 1998 di UGM lebih didominasi oleh gerakan Islamis dan gerakan kiri seperti KAMMI, HMI, LMND, PRD, dll. Kedua gerakan mahasiswa

tersebut berada dalam posisi yang sangat diametral dengan rezim Orde Baru yang memakai sistem militerisme represif. Karena itu, setiap ada bentuk usaha-usaha untuk mengembalikan ke arah sistem sebelumnya, maka gerakan mahasiswa tersebut paling getol melakukan penolakan. Muncul semacam, traumatisme gerakan mahasiswa terhadap tindakan represif pemerintah. Apalagi, menurut aktivis BEM KM UGM, kedudukan Presiden Gus Dur dan Megawati dianggap tidak bisa memenuhi agenda Reformasi pada saat itu. Terlebih, terkait wacana yang diangkat BEM selalu bernuansa populis kiri yang menunjukkan bahwa gerakan Islam modernis yang mendominasi di dalamnya sedikit berwarna Islam-transformis.

3. Secara aktor, sebagaimana yang dijelaskan Oce Madril, aktivis '98 banyak mewarnai BEM KM UGM hingga tahun 2002-an. Kemudian, tradisi metode gerakan massa konfrontir tersebut diwariskan secara konsisten kepada mahasiswa baru. Apalagi ketika itu, muncul isu komersialisasi kampus di UGM dengan mulai diimplementasikannya PT BHMN. Kerap mahasiswa angkatan 2002 disebut sebagai "korban" pertamanya. Aktor-aktor Angkatan 2002 inilah yang kemudian mewarnai aktivisme BEM KM UGM hingga tahun 2005. Meski kaderisasi aktor sudah terputus dan secara aktivisme sudah mulai tidak diwariskan setelah tahun 2004-2005, aktivis BEM KM UGM tetap mempertahankan metode tersebut untuk kembali membangun gerakan pengawalan kepada isu-isu nasional yang sebelumnya lebih disibukkan pada isu-isu internal kampus.
4. Secara hubungannya dengan elit, kondisi dominasi KAMMI cukup berbeda dengan kondisi dominasi GMNI di KM UGM sebelumnya. Pada konteks dominasi GMNI di KM UGM dahulu, terutama di era Orde Lama, terdapat kesamaan secara ideologis antara pemerintah dan universitas dengan aktivis Dema. Karena itu, dalam gerakannya, aktivis Dema cukup melakukan tekanan-tekanan politik secara persuasif saja. Hal tersebut berbeda dengan dominasi KAMMI di era Pasca-Reformasi sekarang

ini, secara elit, gerakan KAMMI yang menjadi “pendatang baru” belum memiliki “kekuatan” baik di tataran universitas maupun di tataran pemerintah. Karena itu, dalam memengaruhi kebijakan, aktivis BEM butuh melakukan tekanan yang tidak sekadar persuasif, karena diperlukan juga gerakan massa yang bersifat konfrontir.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa ideologi gerakan mahasiswa sangat berpengaruh dalam pengambilan sikap dan pemilihan metode gerakan mahasiswa. Lantaran terjadinya kontestasi ideologi dalam ruang publik “gerakan mahasiswa” yang dalam penelitian ini dilihat sebagai KM UGM, sikap dan metode yang dilakukan menjadi sangat dinamis. Terlebih, terkait kondisi politik maupun ideologi elit pemerintah yang juga mengalami perubahan seiring bergantinya kepemimpinan nasional.

5.4 Saran dan Masukan

Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada memiliki kesejarahan yang sangat bermanfaat untuk dikaji. Mahasiswa Gadjah Mada sebagaimana yang didengung-dengungkan oleh Bung Karno, harus bisa menjiwai nilai-nilai Pancasila dan ke-Gadjah Mada-an dalam sanubarinya. Keterpanggilan gerakan mahasiswa Gadjah Mada ke dalam setiap penyelesaian permasalahan bangsa, adalah sebagai bentuk konkret dari filosofi Kampus Perjuangan dan Kampus Kerakyatan. Namun seiring berjalannya waktu, KM UGM mulai mengalami perubahan zaman dan situasi politik baik dalam internal kampus maupun nasional. Karena itu, untuk menjaga konsistensi dari filosofi dasar pembentukannya, terdapat beberapa saran dan rekomendasi bagi gerakan mahasiswa UGM ke depannya:

1. Secara ideologis, perlu bagi aktivis KM UGM kapan pun dan di mana pun untuk melakukan kajian filosofi Pancasila dan ke-UGM-an sebagai pijakan epistemologis dalam berjuang. Meskipun asas gerakan mahasiswa yang mendominasi tidak mesti berdasarkan pada Pancasila, tetapi penting kiranya untuk

tetap dikaji agar KM UGM tetap konsisten dalam mengawal Republik.

2. Secara peranannya sebagai kelompok penekan, perlu bagi aktivis KM UGM untuk kembali merenungkan pemikiran Prof. Koesnadi Hardjasoemantri selaku pendiri Dema UGM pertama. Hendaknya pergerakan mahasiswa Gadjah Mada selalu didasarkan pada penalaran terhadap suatu kasus. Karena sejatinya, Dewan Mahasiswa dibentuk untuk menjadi wadah dalam menghimpun kekuatan penalaran mahasiswa. Tidak hanya itu, dengan basis penalaran tersebut, hendaknya gerakan mahasiswa UGM berkontribusi secara langsung kepada rakyat dan menjadi solusi dalam setiap permasalahan bangsa. Kontribusi tersebut dapat berupa pengawalan terhadap *public policy* baik di universitas maupun di pemerintah, dan juga mengadakan *community development* bagi rakyat.
3. Secara metode gerakan, perlu kiranya aktivis KM UGM sekarang memadukan pilihan metode terbaik dari cara-cara yang telah ada. Ada baiknya jika aktivis KM UGM dalam hal ini BEM KM UGM mendahulukan metode persuasif terlebih dahulu dalam melakukan tekanannya. Kemudian barulah memakai metode gerakan massa sebagai jalan terakhir dan jika kiranya dinilai efektif dan mendesak. Namun, bagus bagi aktivis BEM KM UGM kini untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang semakin maju. Dengan demikian, informasi yang sedang digarap ataupun diangkat oleh BEM semakin bisa dipahami oleh masyarakat maupun para *stakeholder*.
4. Secara isu, ada baiknya jika aktivis BEM KM UGM lebih mengangkat isu-isu mendasar yang menjadi akar permasalahan bangsa. BEM tidak hanya terfokus pada permasalahan-permasalahan ranting yang bersifat reaksioner dan temporer saja, tetapi juga berani memberikan solusi terhadap akar permasalahan tersebut. Ada bagusnya jika gerakan BEM terpadu dengan universitas sehingga, peran intelektual UGM semakin berdaya guna bagi bangsa dan negara.

5. Secara keilmuan, studi ini diharapkan dapat memperkaya khazanah mengenai kajian gerakan politik, politik ekstra-parlementer, dan demokrasi di Indonesia, terutama studi gerakan mahasiswa di kampus Universitas Gadjah Mada. Karenanya, perlu bagi para ilmuwan politik untuk menganalisa masa depan dan prospek gerakan mahasiswa di UGM dan Indonesia beserta hubungannya dengan dinamika politik pada sistem formal.

Bibliografi

Wawancara:

- Prof. Haryana (Aktivis mahasiswa tahun 1962, Wakil Rektor Kemahasiswaan tahun 1987)
- Dr. Gatot Murdjito (Aktivis Kodema Peternakan UGM 1974, Kabid. KKN LPPM UGM, Dosen Fak. Peternakan UGM)
- Prof. Ichlasul Amal (Aktivis mahasiswa pada masa transisi Soekarno-Soeharto, Rektor UGM tahun 1998, Dosen Fisipol UGM)
- Prof. Dr. dr. Sutaryo, S.pk (Aktivis Dema UGM 1967, Ketua Senat Akademik UGM, Dosen FK UGM)
- Drs. Bambang Praswanto HP, M.Sc. (Aktivis Dema UGM 1972-1978, Sekjend Pusat KAGAMA, Anggota Majelis Wali Amanat UGM 2012-2016)
- Baharuddin Aritonang (Aktivis Dema UGM 1974-1978, Anggota BPK RI 2004-2009)
- Tri Kuntoro, Ph.D (Aktivis gelanggang mahasiswa UGM 1979-1986, Dosen MIPA UGM)
- Dr. Sukamta (Aktivis mahasiswa tahun 1985, Ketua Jamaah Shalahuddin tahun 1988, Ketua DPW PKS DIY)
- Dra. Suwarni (Kepala Bidang Database Arsip UGM)
- Huda Tri Yudiana, S.T. (Presiden BEM KM UGM tahun 2000, Anggota DPRD Sleman)
- Oce Madril, S.H., L.MM. (Aktivis BEM KM UGM tahun 2002-2005, Aktivis Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Dosen FH UGM)

Buku:

- Alfian, M. Alfian. 2012. *Bagaimana Proses Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta: Kubah Ilmu.
- Aly, Rum. 2006. *Titik Silang Kekuasaan tahun 1966*. Jakarta: KATA HASTA PUSTAKA.
- Altbach, Philip G. 1988. *Politik dan Mahasiswa*. Jakarta: PT Gramedia, anggota IKAPI.
- Artawijaya. 2010. *Gerakan Theosofi di Indonesia, Menelusuri Jejak Aliran Kebatinan Yahudi Sejak Masa Hindia Belanda Hingga Era Reformasi*. Jakarta: Al-Kautsar.
- Budiyarso, Edy. 2000. *Menentang Tirani, Aksi Mahasiswa '77/'78*. Jakarta: PT Grasindo.
- Chilcote, Ronald H. 2007. *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Daulay, Amir Husin, dkk. 2011. *Hariman & Malari: Gelombang Aksi Mahasiswa Menentang Modal Asing*. Jakarta: Q Communication.
- Faith, Herbert, dan Lance Castles. 2007. *Indonesia Political Thinking 1945-1965*. Singapore: Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd.
- Hatta, Mohammad. 1963. *Perihal Ekonomi Sosialis Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Key, V. O. Jr. 1958. *Politics, Parties, and Pressure Groups*. New York: Thomas Y. Crowell Company.
- Latif, Yudi. 2005. *Intelegensia Muslim dan Kuasa*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Listiyono, dkk. 2009. *Epistemologi Kiri*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media Group.
- Poespoprodjo, Drs. 1984. *Jejak-jejak Sejarah 1908-1926, Terbentuknya Suatu Pola*. Bandung: Remadja Karya CV.
- Raillon, Francois. 1989. *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

- Sanit, Arbi. 1999. *Pergolakan Melawan Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, Heri. 2010. *Filosofi UGM*. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM.
- Slametmuljana, Prof. Dr.. 1969. *Nasionalisme sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia*.
- Seri Buku Tempo Bapak Bangsa. 2010. *Sukarno: Paradoks Revolusi Indonesia*. Jakarta: KPG.
- Seri Buku Tempo Bapak Bangsa. 2010. *Sjahrir, Peran Besar Bung Kecil*. Jakarta: KPG.
- Seri Buku Tempo Bapak Bangsa. 2010. *Tan Malaka, Bapak Republik yang Dilupakan*. Jakarta: KPG.
- Sjahrir, Sutan. 1947. *Pikiran dan Perdjoengan*. Jakarta: Penerbit Kebangsaan Poestaka Rakjat.
- Sjahrir, Sutan. 1967. *Sosialisme dan Marxisme, Suatu Kritik Terhadap Marxisme*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Statuta dan Peraturan Penyelenggaraan UGM 1949-2010, PSP-PRESS.
- Toto, Iman dkk. 2001. *Seri Pemikiran Bung Karno, Kenangan 100 Tahun Bung Karno. Bung Karno dan Partai Politik*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo, Anggota IKAPI.
- UGM & Ilmu Pancasila*. 2005. Yogyakarta: Aditya Media & Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM.
- Uhlen, Anders. 2008. *Oposisi Berserak; Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mizan Anggota IKAPI.
- Yin, Robert K. 2003. *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Penelitian:

- Akbar, Ferry Valdano. 2011. *Konfrontasi Bersenjata Merebut Irian Barat, Studi Tentang Arti Penting Pembangunan Kekuatan militer Bagi Negara*.

- Al-Banjari, Husin M. 2010. *Peran Ideologi dalam Proses Pembentukan Koalisi Partai Politik (Studi Kasus Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Jawa Barat Periode 2005-2008)*.
- Baskoro, Agung. 2011. *Dinamika Gerakan Mahasiswa Pasca-Reformasi*.
- Erawan, I Ketut Putra. 1989. *Perjalanan Gerakan Mahasiswa Indonesia (1966-1978), Suatu Studi Tentang Sebab-Sebab Gerakan Mahasiswa*.

Dokumen dan Arsip:

- Laporan Tahunan Universitas Negeri Gadjah Mada Bagi Tahun Pengadjaran 1951/1952 oleh Prof. Dr. M. Sardjito selaku Presiden Universitas, diucapkan pada tanggal 19 September 1952.
- Laporan Tahunan Universitas Negeri Gadjah Mada Bagi Tahun Pengadjaran 1953-1954 oleh Prof. Dr. M. Sardjito, diucapkan pada tanggal 19 September 1954.
- Laporan Tahunan Universitas Gadjah Mada Bagi Tahun Pengadjaran 1962/1963 oleh Prof. Ir. H. Johannes selaku Rektor, diucapkan pada tanggal 19 September 1963.
- Laporan Tahunan Universitas Gadjah Mada Tahun Pengadjaran 1963/1964 oleh Prof. Ir. H. Johannes selaku Rektor UGM. Diucapkan tanggal 19 September 1964.
- Laporan Tahunan Universitas Gadjah Mada Tahun Pengadjaran 1964/1965 oleh Prof. Ir. H. Johannes. Diucapkan pada tanggal 20 September 1965.
- Surat Pernyataan Sikap Sema UGM tanggal 21 Juni 1994 tentang rencana kenaikan SPP oleh Universitas Nomor 1st/SM-UGM/VI/94.
- Laporan Khusus Demo Mahasiswa UGM yang Tergabung dalam BEM KM UGM Pada Saat Acara Dies Natalis ke-55 UGM di GSP Tanggal 20 Desember 2004 oleh Satuan Keamanan dan Keselamatan Kampus UGM.

Hasil Lokakarya Internal BEM se-UGM, “Dari Evaluasi Menuju Perbaikan Kampus” yang diselenggarakan oleh BEM KM UGM di Ruang Sidang FTP pada tanggal 10-11 Desember 2005.

Laporan Demo yang Dilakukan oleh Aliansi BEM KM UGM dengan BEM/LEM/DEMA Fakultas se-UGM tanggal 26 April 2006 oleh Satuan Keamanan dan Keselamatan Kampus UGM.

Produk Hukum:

PP Nomor 153 tahun 2000 tentang Penetapan UGM sebagai PT BHMN

SK Rektor UGM nomor 14 tahun 1965 tentang Penonaktifan Aktivist Dema UGM yang terlibat CGMI dan PERHIMI.

SK Rektor UGM nomor 3 tahun 1966 tentang Pembekuan Dewan Mahasiswa, Majelis Mahasiswa, dan Kodema.

SK Rektor UGM Nomor 12 Tahun 1969 tentang Penyusunan Panitia Persiapan Pembentukan Dewan Mahasiswa UGM.

Surat Kabar:

Surat Kabar Berita Nasional Yogyakarta edisi 10 Maret 1978.

Surat Kabar Yogya Post tentang “Kongres SM UGM Perlu Kearifan” edisi Minggu, 26 Januari 1992.

Surat Kabar Bernas tentang “kongres SM UGM II Bahas Soal Akademik” edisi Senin, 20 Januari 1992.

Surat Kabar Kedaulatan Rakyat tentang “Mekanisme Organisasi SM-UGM Belum Tertata Secara Baku” edisi Kamis, 23 Januari 1992.

Surat Kabar Yogya Post tentang “SM UGM akan Benahi Problem Struktur pada Kongres II” edisi Kamis, 23 Januari 1992.

Surat Kabar Suara Merdeka tentang “Ketua Sema UGM: Kenaikan SPP Perlu Ditinjau” edisi Rabu, 25 Maret 1992.

Laporan Utama Pers Mahasiswa “Balairung Koran” Edisi 107 tanggal 18 Februari 2008.

Web:

http://www.oocities.org/capitolhill/3925/sd8/munduranya_8.html. File diunduh tanggal 8 September 2012.

<http://bemsi.blogspot.com/2009/10/deklarasi-bogor-bem-si.html> diunduh pada 25 September 2012.

<http://ausmanmusa.wordpress.com/2012/09/24/organisasi-mahasiswa-ugm-dari-masa-ke-masa/> diunduh pada tanggal 6 Februari 2013.

<http://news.unpad.ac.id/?p=10551> diunduh pada tanggal 23 Februari 2013.

Indeks

A

ABRI v, 7, 77, 82, 101
Adaby Darban 92
Agung Nugroho 123
Agus Salim 44, 46
aktivisme 4, 6, 11, 21, 33, 36, 39,
47, 57, 58, 63, 74, 79, 80,
82–90, 92, 93, 99, 100, 104,
106–119, 132, 134, 138
Ali Moertopo 75–78, 81
Ali Wardana 67
Almond, Gabriel xi, 14, 15
Altbach, Phillip G. 3, 10
Aly, Rum 7, 10, 11
Amien Rais 88, 89, 97,
103, 105, 106
Anies Rasyid Baswedan 99
anti 23–30
anti-Barat 23
anti-Berkeley 23
anti-Bung Karno 23
anti-Habibie 23
anti-kapitalis 78
anti-kapitalisme 75
anti-kapitalisme asing 75
anti-kebudayaan 121
anti-komersialisasi 126
anti-komunis 126
anti-liberalisasi 126
anti-militer 78

anti-modal asing 72
anti-neoliberalisasi 131
anti-neoliberalisme 113, 120
anti-Orde Baru 72, 95, 106
anti-Pancasila 121
anti-Pemerintah 113
anti-penafsiran peyoratif
monolitik represif 121
anti-penjajah 20
anti-PKI/CGMI 61
anti-Presiden Soeharto 81
anti-Soeharto 70, 80, 104
anti-Soekarno 7
Arbi Sanit 9–11, 16, 17, 28,
34, 48, 60, 135
Arief Rahman Hakim 61
Arif Fibri 119
Ashadi Siregar 79

B

Baharuddin Aritonang 69,
71, 74, 76, 78–80, 142
Bambang Praswanto 34, 43, 62,
68, 70, 72, 74, 76–81, 142
Benny Moerdani 77, 98
BHMN v, vii, x, 6, 114–119,
121–123, 126, 131,
132, 138, 146
Budiman Sudjatmiko 104

C

- Castles Lance 19, 143
 Center for Strategic and
 International Studies
 (CSIS) 75
 Chilcote 12, 13, 14, 15, 143

D

- Daed Joesoef 5, 82
 Demokrasi 74–108
 Demokratisasi Gelombang
 Ketiga 9, 144
 demonstrasi simpatik 107
 dwifungsi ABRI 82
 mobilisasi massa 59, 60,
 126, 132, 137
 okupasi 119, 137
 Tenda Keprihatinan 115
 Tujuh Gugatan Rakyat 125
 Dewan Mahasiswa UGM ix, xx,
 3, 5, 34, 35, 38, 70, 146

E

- Easton, David 12, 13
 Edy Budiwarso 8
 Elan Satriawan 99, 102
 Emil Salim 67, 72

F

- Fahri Hamzah 104
 Fathul Hilal, Ustadz 93, 94
 Feith, Herbert 19

G

- Gerakan 19–30
 aksi massa konfrontir 136
 Gerakan dakwah kampus 89
 Gerakan de-Soekarnoisasi 61
 gerakan ekstra 36, 57, 59,

- 78, 83, 84, 86–88, 92,
 93, 106, 122, 123
 gerakan intelektual 18,
 28, 102, 107, 127
 gerakan kekecewaan 2, 5,
 71, 74, 81, 107, 131
 Gerakan koersif 135, 136
 gerakan mahasiswa xiv, xv, xvi,
 xvii, xviii, xix, xx, 2–11,
 17–19, 27–30, 32, 34–36,
 43, 44, 46–49, 52–54,
 57–59, 63, 66–68, 70–72,
 74, 75, 78–84, 86, 93, 96,
 98, 99, 103–108, 110–114,
 117–124, 126, 130–141
 gerakan mahasiswa Islamis
 5, 47, 74, 81
 gerakan massa 29, 53, 60,
 61, 107, 111, 117–119,
 123, 126, 136–140
 gerakan moral 6, 18
 Gerakan penalaran an sich 136
 Gerakan persuasif berbasiskan
 penalaran 135, 136
 gerakan Reformasi 3, 105,
 110, 111, 131, 132, 137
 gerakan Tarbiyah 91, 92,
 103, 104, 121, 134
 Gerakan Underground x, 84
 gerakan pro-demokrasi
 tahun 1998 27–30
 wacana demokrasi 23,
 27, 69, 108
 wacana konservatif 27
 Wacana Liberal 133
 wacana radikal 27, 63
 Gramsci, Antonio 16

H

- Harijan Silalahi 77

Hariman Siregar 74
Haryana, Prof. 37, 47, 48,
51, 52, 57–62, 68, 70,
71, 99–101, 107, 142
Haryo Setyoko 103, 104
Hidayat Nataatmaja 88
Hizbut Tahrir 94, 95
Huda Tri Widiana 103,
111–114, 118, 120

I

ideologi common ground 121
ideologi mahasiswa 27, 83, 113
Imaduddin Abdulrahim 88
Indische Sociaal Democratische
Vereniging (ISDV) 45
intelegensia 6, 32, 44
intelektual 6–30
intelektual organik 16
International Monetary
Fund (IMF) 115
Islam 121–127
Islam neo-modernis 23
Islam reformis-modernis 22,
48, 49, 120, 133, 136
Islam tradisional 19, 22
Islam transformis 23, 120

J

Jajang Sukmahari 119

K

kader 21, 39, 46, 47, 60, 90, 92
KAMI Care Taker Dema vi,
ix, 66, 68, 70, 108,
132–134, 136
Kampus xvi–xx
kampus kerakyatan 32,
37, 115, 123, 130

kampus Pancasila 107
kampus perjuangan 32,
35, 37, 107, 130
komersialisasi kampus
116, 118, 131, 138
Otonomi kampus 115
pengepungan kampus 106
privatisasi kampus 6
kapitalisme global 121
kedaulatan negara 126, 135
Kelompok Berkeley 67, 78
Kelompok Cipayung 80
kelompok penekan 2–4, 6–14,
16–18, 28–30, 32, 47, 63,
125, 130, 135, 137, 140
kelompok studi 85
Keluarga Alumni Gajah Mada
(KAGAMA) 40, 105
keluarga Cendana 81
Keluarga Mahasiswa (KM) 84
Keluarga Mahasiswa Universitas
Gajah Mada (KM
UGM) xv, 2, 32
Kesatuan Aksi 84–108
Kesatuan Aksi Mahasiswa
Indonesia (KAMI) 5, 53
Kesatuan Aksi Pelajar
Indonesia (KAPI) 53, 101
Kesatuan Aksi Sarjana
Indonesia (KASI) 53
Key Jr., V. O. 11
Koento Widjojo 92
Komitet Gosudarstvennoy
Bezopasnosti (KGB) 57
Komunis Internasional
(Komintern) 46
Komunisme 19, 20, 23,
27, 43, 45, 48, 68
Kunto Wibisono 73, 105

L

- Lafran Pane 44
 larangan “text book thinking” 60
 Latif, Yudi 22, 35, 44–46
 Lukman F. Mokoginta 71

M

- Majelis Mahasiswa (MM) 34
 Majelis Permusyawaratan
 Mahasiswa (MPM) 3
 Marhaenisme 19, 20, 27,
 43, 44, 47, 48, 63,
 87, 133, 135, 136
 militer 5–30
 anti-militer 78
 diktator militer 55
 intel Militer 86
 konflik militer 51
 militerisme 72, 73, 80–82,
 106, 131, 137, 138
 pemerintahan otoritarian
 militeristis 66
 rezim militer 75
 rivalitas militer 76
 supervisi militer 67
 Mochtar Mas’oed 105
 Mohamad, Mahathir 54
 Muhammad Fanani 88
 Muslich Zainal Asikin 88

N

- Nahdlatul Ulama vi, 19
 Nasionalisme 6, 19, 20, 27,
 43, 133, 136, 144
 Nasionalis Radikal 21, 133, 135

O

- Oce Madril 111–114, 116,
 118–123, 138, 142
 oposisi 122–127

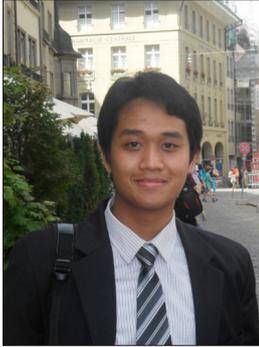
- kekuatan oposisi 53, 80
 Oposisi Berserak 9, 144
 oposisi konstruktif 122, 131
 oposisi total 122
 Orde 110–127
 Orde Baru ix, xv, xvi, xvii, 2, 5,
 7, 8, 29, 30, 43, 66–69, 71–
 78, 80–82, 84, 86–88, 92,
 93, 95–97, 99, 106–108,
 110, 112, 120, 121, 126,
 130–132, 134, 136, 138
 Orde Lama i, ii, ix, xv, xvi, 2, 4,
 7, 9, 10, 29, 32, 62, 63, 67,
 130–132, 134, 135, 138
 Pasca-Reformasi i, ii, x, 2,
 5, 30, 110, 113, 119,
 120, 125, 126, 130, 131,
 133, 136, 138, 145
 organisasi bawah tanah 84
 organisasi ekstra-universitas
 83–108
 Angkatan Muda Pemuda
 Indonesia (AMPI) 80
 BKMJ (Badan Kesedjahteraan
 Mahasiswa Jogjakarta) 42
 Consentration Gerakan
 Mahasiswa Indonesia
 (CGMI) 45
 Dewan Dakwah Islam
 Indonesia (DDII) 89
 Front Mahasiswa Nasionalis
 (FMN) 112
 Gerakan Mahasiswa
 KOSGORO 80
 Gerakan Mahasiswa Nasional
 Indonesia (GMNI) 44
 Gerakan Mahasiswa Sosialis
 (Gemsos) 46
 Himpunan Mahasiswa
 Islam (HMI) 44

- HMI Dipo 87, 103,
133, 134, 136
HMI Majelis Penyelamat
Organisasi (MPO) 87
Ikatan Cendekiawan Muslim
Indonesia (ICMI) 92, 97
Jamaah Shalahuddin
(JS) 88, 106
Jong Islamieten Bond (JIB) 44
Kesatuan Aksi Mahasiswa
Indonesia (KAMI) 5, 53
Kesatuan Aksi Mahasiswa
Muslim Indonesia
(KAMMI) 104
Komisariat Dewan Mahasiswa
(Kodema) 34
Liga Mahasiswa Nasionalis
Demokrat (LMND) 112
Mahasiswa Kristen
Indonesia v, 5
Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia (PMII) vii, 5
Perhimpunan Mahasiswa
Indonesia (Perhimi) 61
Persatuan Mahasiswa Katolik
Republik Indonesia
(PMKRI) vii, 5
Perserikatan Perhimpunan
Mahasiswa Indonesia
(PPMI) 35
organisasi intra-universitas
35, 84
Aliansi BEM Fakultas
se-UGM 123
Aliansi BEM Seluruh Indonesia
(BEM SI) x, 124
Badan Eksekutif Mahasiswa
(BEM) x, 5, 99, 101
BEM KM IPB 124
BEM Republik Mahasiswa
(Rema) UNY 124
gerakan mahasiswa ekstra
non-BEM 119
Orientasi Studi Mahasiswa
(OSMA) 71
OTB (Organisasi Tanpa
Bentuk) 92
Otonomi kampus 115
- P**
Pancasila 4, 20, 21, 27, 40, 44,
47, 48, 56, 63, 67, 87,
98, 107, 114, 115, 120,
121, 126, 133, 139, 144
Panglima Komando Pemulihan
Keamanan dan Ketertiban
(Pangkopkamtib) 76
Parakitri T. Simbolon 79
partai pelopor 24, 49
Partai Persatuan Tarbiyah
Islamiyah (Perti) 59
Partai politik 69
Golongan Karya (Golkar) 75
Partai Keadilan (PK) 112
Partai Komunis Indonesia
(PKI) 33
Partai Masyumi 19
Partai Nasional Indonesia
(PNI) 44
Partai Rakyat Demokratik
(PRD) xv, 104
Partai Sosialis Indonesia
(PSI) 46
pemberangusan 5, 30, 66, 99
pembubaran 5, 30, 66, 99
pemerintahan otoritarian
militeristis 66
Pemerintahan Persatuan
Nasional 112
Pemilihan Raya (Pemira)

- Mahasiswa 70, 103
- penanaman modal asing 72, 78
- pendudukan kampus 5
- Penempatan Tenaga Mahasiswa (PTM) 38, 131
- penyebaran kekuasaan 12
- Perguruan Tinggi vii, 42, 107, 114, 124
- peristiwa politik 74, 74–108
 - Agresi Militer Belanda 33
 - Brunei Gate 112
- pers mahasiswa 8, 69, 79, 119
- Pers mahasiswa 8
 - Gelanggang Mahasiswa 67, 69, 76, 82, 84, 90, 101
 - “Mahasiswa Indonesia” 7, 8, 69
- Poespoprodjo 22, 46, 143
- politik 111–127
 - aktor politik 18
 - alat permainan politik 6
 - arena politik 2, 6, 12, 18
 - demokrasi politik 54, 55, 56, 110, 122
 - demokratisasi politik 110, 113
 - elit politik 4, 6
 - gerakan politik 2, 17, 88, 118, 141
 - ideologi politik 4, 18, 19, 22, 135
 - insan politik 10
 - kebebasan berpolitik 12
 - kekuatan politik 6
 - kepentingan politik 14, 57
 - kesadaran politik 93, 95
 - komunikasi politik 14
 - Konflik politik 7
 - konstelasi politik 7
 - lembaga politik 16, 17, 28
 - manuver politik 51, 57
 - non-politik 89
 - partai politik ii, xviii, 11, 12, 40, 45, 47, 58, 86, 104, 111, 112
- perekrutn politik 14
- politik akomodatif 81, 97
- politik domestik 32
- politik formal xviii, 12, 13, 18
- politik golongan 58
- politik internasional 3, 8, 32, 49, 50, 57
- politik kampus 32, 66, 90
- politik liberal 49
- politik praktis 122
- prinsip politik 56
- revolusi politik 113
- serangan politik 45
- sistem politik xv, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 26, 112, 132, 135
- Stabilisasi Politik ix, 66
- strategi politik 81
- Tekanan politik 137
- transisi politik 7
- trauma politik 84
- Presiden Republik Indonesia 111–127
 - 1945-1967: Soekarno (Bung Karno) 4, 5, 21, 33, 38, 40–43, 52–54
 - 1967-1998: Soeharto 52, 66, 68, 71–77, 81, 82, 93, 97, 98, 103–107, 110, 132
 - 1998-1999: B.J. Habibie 106
- pressure group 2, 12, 17, 69
- pro- 4–30
 - pro-Aliran Kepercayaan 81
 - pro-Barat 78
 - pro-Bung Karno 59, 60
 - pro-demokrasi 9, 27
 - pro-gerakan dakwah kampus 92
 - pro-kapitalis 9, 81, 106

- pro-kapitalis asing dan militerisme 106
pro-mahasiswa 73
pro-Soemitro 76, 78
- R**
Raillon, François 7, 10
Rektor UGM 37–63
1949-1961: Sardjito, Prof. Dr. 33
1961-1966: Johannes, Prof. Ir. 33
1968-1973: Soeroso, Prawirohardjo (Drs. H.) 70, 73
1973-1981: Sukadji, Ranuwihardjo (Prof.) 73
1981-1986: Jacob, Teuku Prof. 106
1986-1990: Koesnadi Hardjasoemantri 3, 91, 100, 107, 140
1990-1994: Adnan, Prof. Dr. Mochammad 107
1998-2003: Amal, Prof. Ichlasul 43, 49, 51, 58, 59, 62, 67, 72, 74, 75, 78, 79, 81–83, 85, 91, 99, 104, 105, 107, 113, 142
2004-2007: Effendi, Prof. Sofian 116, 118
pro-AS 57
Resimen Mahasiswa (Menwa) UGM 85
Ridaya La Ode Ngkowe 103, 105
Robert Michels 28
- S**
Sairul Alim 88
Sarikat Islam (SI) 46
- Saur Hutabarat 69
Senat Mahasiswa vii, 84–86, 88, 99–101, 103, 105, 107
Sigit Nursyam 124
Slametmuljana 2, 6, 7, 10, 20, 21, 33, 40, 46, 144
Soedjono Humardani 75
Soemitro Djojohadikoesoemo 53, 67, 72, 78
Sosialisme Demokrasi 19, 133, 136
student government 4, 7, 8, 11, 33, 106
Sufa'at 34
Syamhari Baswedan 88
Syukron Makmun 119
- T**
Tarbiyah vii, x, 59, 91, 92, 103, 104, 111, 112, 121, 133, 134, 136
The Magnificent Seven 72
Tri Sutrisno 78, 98
- U**
UGM Style 74, 107, 127
Uhlin, Anders 9, 10, 23, 27
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 100
UU Penanaman Modal Asing viii, 68
- W**
Weber, Max xvi
- Y**
Yew, Lee Kuan 54

Tentang Penulis



Luthfi Hamzah Husin, putra Bandung kelahiran Braunschweig, Jerman, ini tercatat sebagai alumni dari Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM. Secara akademik, Luthfi menghabiskan pendidikan dasar hingga menengahnya di Bandung, kemudian sempat *nyantri* di sebuah pondok pesantren di Kuningan, Jawa Barat. Luthfi banyak terlibat sebagai peneliti pada beberapa riset, di antaranya adalah *Rumah Zakat dan Isu Kesejahteraan (2010)*, *Analysis of Yogyakarta Discourse: Developing Policy Infrastructure for Local Wisdom Actualization (2013)*, *Research Based Learning: Actualizing Human Right and Citizenship by Participatory Action Research (2013)*, dan *IID Policy Environment Mapping, Scanning Development Policy Efforts and Challenges in Southeast Asia: Towards a Truly Participative and Inclusive Growth (2014)*. Di samping itu, Luthfi juga aktif di beberapa organisasi dan lembaga, di antaranya sebagai pegiat Forum Indonesia Muda (2010), Presiden Mahasiswa BEM KM UGM 2011, *Coordinator of ASEAN Student Organization Network (ASONE) 2011*, Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada 2012-2013, dan peneliti di Government Laboratory Yogyakarta. Kini Luthfi tinggal di Yogyakarta bersama istrinya dan beraktivitas sebagai asisten pengajar dan peneliti di almamaternya.